



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH [RKPD]
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sebagai penjabaran RPJMD, RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD serta penetapan RKPD. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan *politis, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down*.

Setelah penyusunan rancangan awal RKPD, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan menyelaraskan dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Kemudian dilakukan Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait.

Sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun keempat RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, kedudukan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Rembang 2019 diharapkan dapat

mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada Tahun 2019 melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi tahun sebelum serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 disusun berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang berarti bahwa RKPD Kabupaten mempunyai relevansi dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD, RKPD Provinsi dan RKP. RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 disusun dengan mengacu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 terutama pada tema pembangunan jangka menengah tahun keempat. Sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, arah kebijakan pada tahun 2019 diprioritaskan untuk mendukung visi yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 juga memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019. Proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi untuk tahun 2019 dapat dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD melalui evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Proses ini merupakan pencermatan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang mempunyai relevansi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga perlu dipedomani.

Adanya relevansi suatu kebijakan bagi daerah apabila kebijakan

tersebut merupakan amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum atau khusus pada daerah tertentu, maupun apabila daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut dan daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Kebijakan nasional dan provinsi lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah pada tahun rencana karena memberikan peluang bagi pengembangan daerah atau berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, kebijakan tersebut dapat dicermati dari program dan kegiatan yang diagendakan pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Secara implisit dokumen RKP dan RKPD Provinsi menguraikan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi pada tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Selain memperhatikan dokumen perencanaan tahun rencana, dalam rangka mewujudkan keselarasan dan sinergitas pembangunan, maka perlu pula untuk mengkaji dan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; RPJMD Provinsi Jawa Tengah pasca pemilihan gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 serta perencanaan tata ruang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada Tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Rembang;
- b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas;

- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Menguraikan gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan RKPD untuk memperjelas pemahaman substansi pada bab-bab berikutnya.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menyajikan secara logisdasar-dasar analisis berupa gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disertai hasil evaluasi RKPD tahun lalu yang mengacu dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan serta rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan rumusan prioritas dan sasaran

	pembangunan daerah yang memuat hubungan visi/misi dengan tujuan/sasaran pembangunan RPJMD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019.
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Rembang Tahun 2019 terdiri dari dua kelompok urusan kewenangan yaitu urusan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, kewenangan pilihan serta program di luar urusan wajib dan pilihan.
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat penjabaran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan
BAB. VII	PENUTUP Menguraikan harapan terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi Umum Daerah

Aspek Geografi dan Demografi

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha). Data wilayah administratif menurut kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

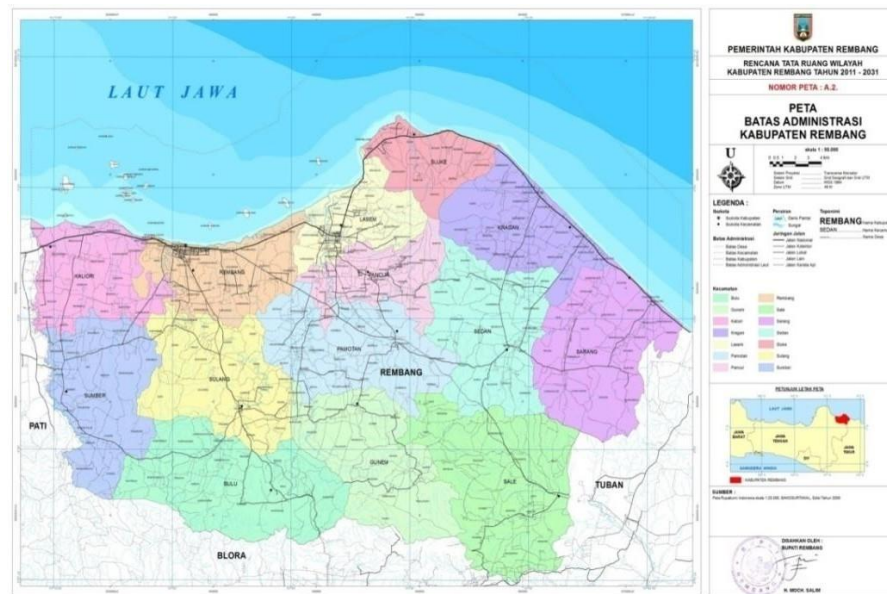
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
DiKabupaten Rembang

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(ha)	(%) thd total
1.	Sumber	18	7.673	7,57
2.	Bulu	16	10.240	10,10
3.	Gunem	16	8.020	7,91
4.	Sale	15	10.715	10,57
5.	Sarang	23	9.133	9,01
6.	Sedan	21	7.964	7,85
7.	Pamotan	23	8.156	8,04
8.	Sulang	21	8.454	8,34
9.	Kaliori	23	6.150	6,06
10.	Rembang	34	5.881	5,80
11.	Pancur	23	4.593	4,53
12.	Kragan	27	6.166	6,08
13.	Sluke	14	3.759	3,71
14.	Lasem	20	4.504	4,44
KabupatenRembang		294	101.408	100

Sumber: Kabupaten Rembang Dalam Angka Tahun 2017

Kabupaten Rembang berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Jawa Tengah dan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah Laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Blora disebelah Selatan, Kabupaten Patidi sebelah Barat dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur. Adapun peta

batas administrasi Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini.



Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling Timur di Provinsi Jawa Tengah dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 101.408 ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan.

Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 m dpl). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Cagar Alam Gunung Lasem.

c. Kondisi Topografi

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran

tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 11,81% terletak pada ketinggian 0–7 meter dpl, ketinggian 8-100 m dpl sebesar 56,83%, ketinggian 101- 500 m dpl sebesar 28,29% dan ketinggian 501–1.000 m dpl sebesar 3,07%. Wilayah Kabupaten Rembang seluas 46.367 ha (45,72%) mempunyai kelerengan sebesar 0-2%. Sedangkan 36.374 ha lainnya (35,84%) mempunyai kelerengan sebesar 3-15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 16-40% dan > 40% masing-masing seluas 13,78% dan 4,66% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

d. Kondisi Geologi

1) Struktur Tanah

Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi: a) Tanah Alluvial, meliputi 10 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman, b) Tanah Regosol, meliputi 5 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar pantai utara. Tanah jenis ini berasal dari sedimentasi pasir pantai, digunakan terutama untuk pertanian dan perkebunan, c) Tanah Grumosol, sebesar 32% dari luas wilayah Kabupaten Rembang, terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan, d) Tanah Mediteran Merah Kuning, meliputi kurang lebih 45 % dari seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jenis tanah ini terletak dibagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan dan biasanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput

2) Potensi Kandungan Tanah

Kabupaten Rembang memiliki kandungan tanah Andosol dan endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat, dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian. Dengan potensi yang cukup besar maka beberapa pabrik

semen telah dan sedang mengajukan permohonan perijinan untuk membuka usaha di Kabupaten Rembang.

e. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa embung, bendung, cekdam, dan sungai. Beberapa embung besar yang mensuplai ketersediaan air baku yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Panohan dan Embung Grawan. Sedangkan sungai besar yang ada adalah sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 Cekdam dan 293 daerah irigasi. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang teraliri air sepanjang tahun.

Diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah yang curah hujannya rendah adalah Kabupaten Rembang. Curah hujan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir (2011-2015). Curah hujan yang terendah yaitu terjadi pada tahun 2012 sebanyak 1.081,43 mm dengan 68 hari hujan.

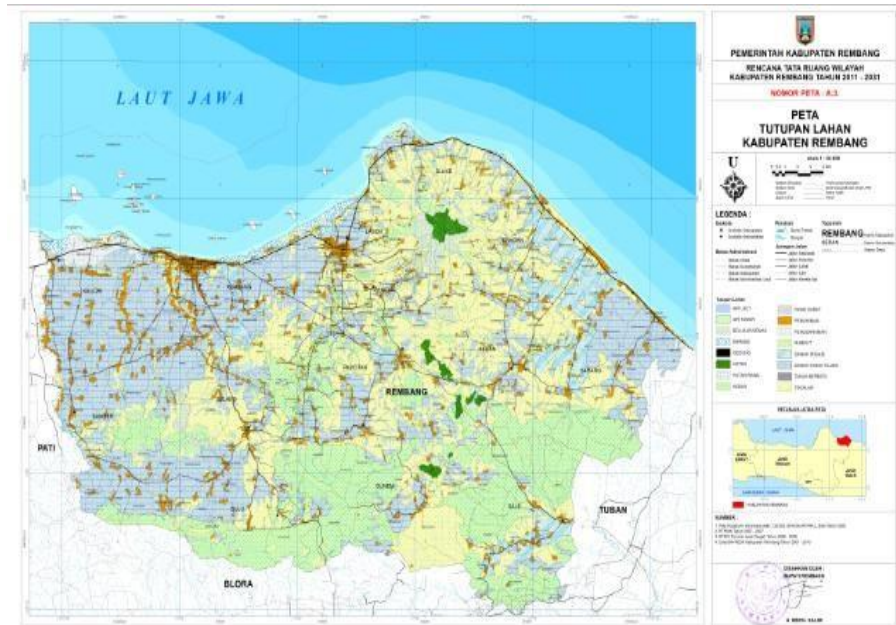
f. Kondisi Klimatologi

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu terendah sebesar 22°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C, sehingga suhu rata-rata di Kabupaten Rembang 27-33°C. Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.179,86 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember yaitu sebanyak 197 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus dan September yaitu sebanyak 10 dan 17 mm/bulan. Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut.

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan tata guna lahan, Kabupaten Rembang terdiri atas lahan sawah sebesar 29.020 hektar (28,62%), lahan bukan sawah sebesar 53.156 hektar (52,42%) dan lahan bukan pertanian sebesar 19.232 hektar (18,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar

adalah tegalan sebesar 32,94 %, hutan 23,45 % dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 %.Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini:



Gambar 2.2
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Rembang
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Potensi Pengembangan Wilayah

a. Strategi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan Perda Kabupaten Rembang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031, Kabupaten Rembang terbagi ke dalam berapa wilayah strategis yaitu wilayah strategis pertanian, perikanan, pertambangan, industri, dan kawasan pusat pelayanan. Strategi penataan wilayah menggunakan pendekatan kawasan dan potensi lokal yang merupakan upaya untuk mengatur pengembangan potensi secara spasial. Beberapa kawasan yang direncanakan mencakup berbagai aspek yaitu, Kawasan lindung, Kawasan rawan bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan pertanian terdiri dari Kawasan peruntukan tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; dan Kawasan peruntukan peternakan, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan pertambangan, Kawasan peruntukan industri, Kawasan peruntukan pariwisata.

Selain penetapan kawasan peruntukan dalam Perda Tata Ruang tersebut juga mencakup penetapan kawasan strategis. Kawasan strategis

dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah Kawasan koridor perbatasan Blora–Tuban–Rembang–Bojonegoro; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Kawasan pembangkit listrik tenaga uap Rembang.

b. Pengembangan Kawasan Lindung dan Budidaya

Kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Rembang ditetapkan ke dalam beberapa wilayah. Pengembangan kawasan budidaya mencakup beberapa wilayah yaitu untuk Kawasan lindung yang bertujuan untuk mempertahankan Kawasan hutan lindung; mempertahankan fungsi Kawasan lindung non hutan; merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir; dan mengembangkan ekowisata.

Kawasan lindung meliputi berbagai aspek yaitu Kawasan hutan lindung; kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; Kawasan lindung setempat; Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; Kawasan rawan bencana; Kawasan lindung geologi; dan Kawasan lindung lainnya. Sedangkan Kawasan budidaya bertujuan untuk peruntukan berbagai kepentingan yaitu: peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan hutan rakyat; peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; Kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Kawasan peruntukan budidaya lainnya. Salah satu pengembangan Kawasan peruntukan budidaya lainnya salah satunya adalah pengembangan wilayah peruntukan permukiman dan pengembangan usaha masyarakat termasuk usaha mikro, kecil dan menengah.

c. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Dalam upaya pembangunan pedesaan, sebagai salah satu solusi penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Rembang dipandang telah berhasil dalam memfasilitasi program pengembangan kawasan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD). Program ini telah berhasil mengembangkan Kawasan Wisata Batik Lasem yang didukung oleh Pertanian dan Peternakan. Disamping itu Pemerintah Kabupaten

Rembang juga telah menetapkan desa-desa di wilayah pesisir yang terdiri dari Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal dan Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang serta Desa Gedongmulyo, Desa Dasun dan Desa Tasiksono Kecamatan Lasem menjadi daerah Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM). Modal utama yang dimiliki oleh keenam desa tersebut diatas adalah kawasan pariwisata pantai yang didukung potensi kelautan, perikanan, konservasi mangrove dan potensi lainnya. Untuk pengembangan kawasan tersebut perlu adanya keterperpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kabupaten Rembang yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan bencana alam terdiri dari : kawasan rawan banjir, rawan longsor dan rawan bencana kekeringan.

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

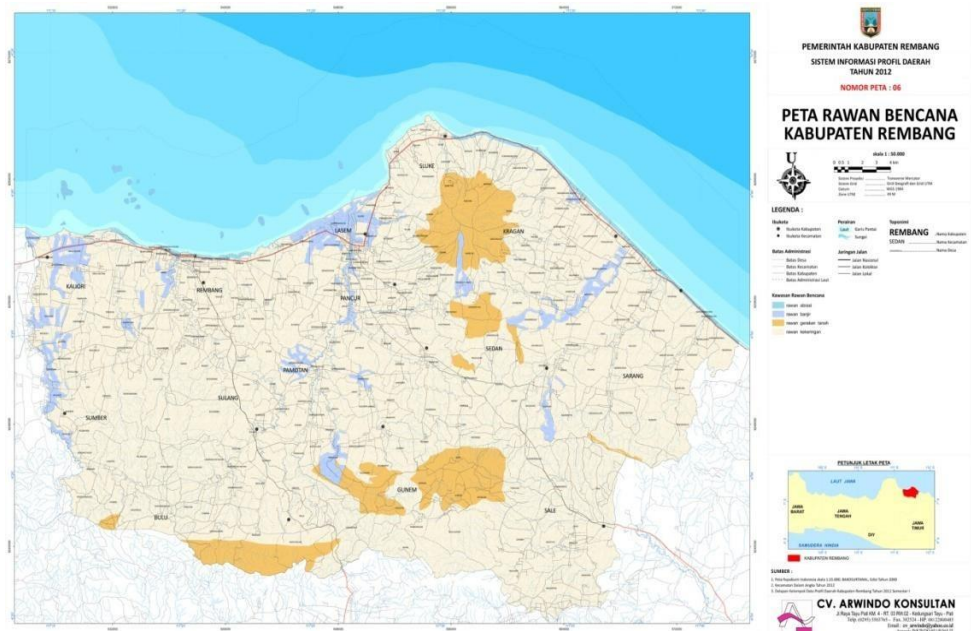
Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Berdasarkan inventarisasi dan identifikasi mangrove wilayah balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun Kabupaten Rembang Tahun 2006 menyebutkan bahwa pada kemiringan lereng, kelembaban tanah dan curah hujan semakin tinggi tingkatnya maka semakin rawan. Pada tekstur tanah semakin halus tekstur tanah maka akan semakin rawan. Berdasarkan parameter diatas Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir, hal ini menunjukkan tingkat bahaya banjir terhadap wilayah atau zona-zona berdasarkan gabungan parameter diatas, Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir. Hal ini menunjukkan tingkat bahaya banjir terhadap wilayah atau zona-zona berdasarkan pertimbangan analisis diatas dan bukan kondisi eksisting, adapun kondisi tersebut dapat dilihat pada peta potensi rawan bencana. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Kaliori, Rembang dan Lasem.

b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaannya mudah longsor karena berada pada zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Tanah longsor dijumpai di bagian selatan daerah Rembang yang berkembang tanah longsor jenis aliran bahan rombakan dan amblesan. Selain itu dijumpai pula kelurusan tebing yang berarah barat – timur. Di daerah Gunung Lasem dijumpai tanah longsor jenis luncuran bahan rombakan. Lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang terutama di bagian selatan dan timur, Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Gunem, Sulang dan Sedan.

c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi

Umumnya kawasan rawan bencana gelombang pasang identik dengan kawasan abrasi. Kawasan abrasi terjadi akibat rusaknya sabuk hijau..Berdasarkan hasil penelitian Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun Kabupaten Rembang menyatakan bahwa Kabupaten Rembang tergolong rawan abrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari dua variabel berpengaruh yaitu arah dan kecepatan arus, dan tekstur tanah.Abrasi merupakan masalah utama di Kabupaten Rembang terutama di Kecamatan Sarang. Abrasi juga terjadi di Desa Jatisari, Manggis, Blimbing dan Pangkalan. Abrasi ini termasuk abrasi berat, yang berarti : dapat menghilangkan daratan hingga beberapa meter per tahun. Abrasi ini lebih kuat pada musim barat. Abrasi pantai juga terjadi di Kecamatan Kaliori, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Pantai-pantai di daerah tersebut merupakan pantai yang tidak berkarang, sehingga rentan terhadap abrasi. Sedangkan untuk pantai yang berkarang tidak begitu rentan terhadap abrasi.Lokasi kawasan rawan bencana gelombang pasang dan rawan abrasi di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang (yang paling parah). Ada 7 prioritas titik rawan abrasi sepanjang Kecamatan Sluke-Sarang, tetapi baru ditangani 2 titik yang mendapat penanganan di Kecamatan Sarang. Sedangkan titik baru lebih banyak lagi ditemui di desa sebelah titik-titik yang sudah mendapat penanganan di Kecamatan Sarang.



Gambar 2.3.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Rembang
Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 sebanyak 624.081 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 311.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 313.081 jiwa. Rasio jenis kelamin Kabupaten Rembang sebesar 99,34 atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,58%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017*	2018**
Laki-Laki	307.004	309.564	312.057	314.569	317.172
Perempuan	309.897	311.570	314.079	316.629	319.120
Jumlah	616.901	621.134	626.136	631.198	636.292
Sex Ratio	99,07	99,36	99,36	99,35	99,39

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2017, data diolah

Penyebaran penduduk Kabupaten Rembang pada tahun

2016 terbanyak adalah Kecamatan Rembang dengan jumlah penduduk sebanyak 89.854 jiwa dimana posisi selanjutnya ada di Kecamatan Sarang dengan jumlah penduduk sebanyak 64.122 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Gunem Sebanyak 23.882 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

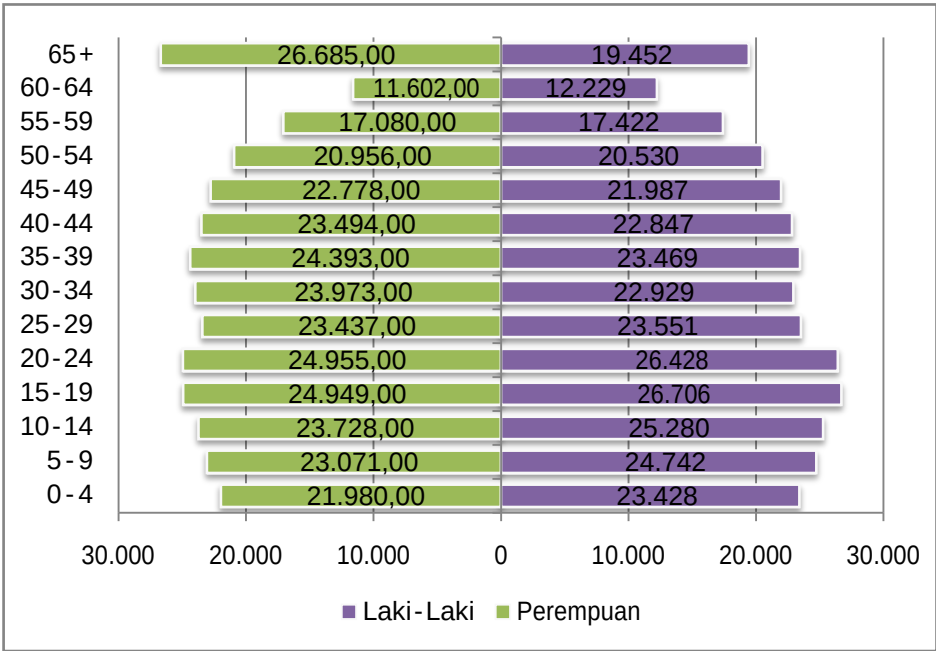
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2018

Kecamatan	2014	2015	2016	2017*	2018**
Sumber	34.630	34.752	34.917	35.081	35.246
Bulu	26.435	26.526	26.650	26.778	26.904
Gunem	23.641	23.780	23.948	24.118	24.289
Sale	37.198	37.423	37.695	37.978	38.255
Sarang	63.165	63.748	64.407	65.077	65.747
Sedan	53.335	53.695	54.122	54.555	54.997
Pamotan	45.369	45.545	45.775	46.004	46.234
Sulang	38.273	38.513	38.800	39.091	39.384
Kaliori	40.228	40.487	40.797	41.111	41.428
Rembang	88.452	89.304	90.274	91.258	92.253
Pancur	28.618	28.840	29.098	29.357	29.618
Kragan	61.205	61.754	62.380	63.010	63.646
Sluke	27.624	27.772	27.953	28.135	28.318
Lasem	48.728	48.995	49.320	49.646	49.973
Kabupaten Rembang	616.901	621.134	626.136	631.198	636.292

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2017, data diolah

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rembang tahun 2016 dapat dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan tidak produktif (0-14 dan 65+ tahun). Jumlah penduduk Kabupaten Rembang kelompok umur produktif sejumlah 435.715 jiwa dan penduduk tidak produktif sejumlah 188.366 jiwa. Kelompok umur terbanyak terdapat pada umur 15-19 tahun sebanyak 51.655 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut



Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur danJenis Kelamin
Kabupaten RembangTahun 2016
Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2017

c. Tingkat Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan, yaitu tahun 2012 sebesar 598 jiwa/km² dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 615 jiwa/km². Persebaran menurut kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang sebesar 1.528 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bulu dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 260 jiwa/km². Secara rinci kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

Kecamatan	2014	2015	2016	2017*	2018**
Sumber	451	453	455	457	459
Bulu	258	259	260	262	263
Gunem	295	297	299	301	303
Sale	347	349	352	354	357
Sarang	692	698	705	713	720
Sedan	670	674	680	685	691
Pamotan	556	558	561	564	567
Sulang	453	456	459	462	466

Kaliori	654	658	663	668	674
Rembang	1.504	1.519	1.535	1.552	1.569
Pancur	623	628	634	639	645
Kragan	993	1.002	1.012	1.022	1.032
Sluke	735	739	744	748	753
Lasem	1.082	1.088	1.095	1.102	1.110
Kabupaten Rembang	608	613	617	622	627

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan dan pemeratan ekonomi dapat ditunjukkan melalui sejumlah indikator makro meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, peningkatan PDRB perkapita, indeks gini, persentase penduduk miskin serta tingkat pengeluaran perkapita. Hasil capaian kinerja penyelenggaran urusan pemeritah pada aspek kesejahteraan dan pemeratan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

No	Aspek/Bidang/ Urusan/ Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Intrpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		
1	Pertumbuhan Ekonomi (YoY)	%	5.15	5.50	5.23	5.37	5.46	5,64	<
2	Laju Inflasi (YoY)	%	7.59	2.66	1.75	3,31	3.33	3,33	>
3	Peningkatan PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp Ribu	10.806	20.855	23.822	25.311	26.540	22.500	>
4	Indeks Gini	Indeks	0,33	0,3	0,31	0,32	0,3	0,29	<
5	Persentase Penduduk Miskin	%	19.5	19.28	18.54	18,19	15.48	14,97	<
6.	Tingkat Pengeluaran Perkapita	Rp Ribu/ta hun	7.401	8.021	9.306	10.118	11.131	10.000	>

Sumber : Data diolah, 2018

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja apabila disandingkan dengan penetapan target capaian RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 dapat memberikan gambaran tingkat kemajuan pembangunan daerah secara makro pada aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD. Pada tahun 2017, intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga serta stimulasi pada sisi produksi sektor usaha telah mencapai hasil yang positif dicerminkan dari indikator

inflasi dan PRDB perkapita telah melampaui target RPJMD. Namun pada aspek lain, kebijakan pembangunan daerah masih perlu lebih di fokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan, akselerasi pembangunan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini merujuk pada indikator pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, Indeks Gini serta pengeluaran perkapita yang diperkirakan belum dapat mencapai targetnya. Komitmen daerah untuk pencapaian target tengah diupayakan melalui pelaksanaan APBD pada tahun berjalan 2018, sehingga capaian indikator kinerja diharapkan mendekati target RPJMD dengan proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,46%, persentase penduduk miskin dapat diturunkan menjadi 15,48%, Indeks Gini dipertahankan pada kisaran 0,32 serta pengeluaran perkapita sebesar Rp. 11,13 juta. Demikian pula arah pembangunan ekonomi yang tengah berlangsung diharapkan mampu meningkatkan PRDB perkapita yang diproyeksikan mencapai Rp 25,54 juta serta mengendalikan tingkat inflasi pada kisaran 3,33.

Kesejahteraan Sosial

Aspek kesejahteraan sosial dapat ditunjukkan melalui sejumlah indikator meliputi indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, tingkat pengangguran terbuka serta tingkat pertumbuhan penduduk. Hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada aspek kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Aspek Kesejahteraan Sosial

No	Aspek/Bidang / Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2014	2015	2016	2017*	2018*		
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	67,4	68,18	68,6	69,45	70,14	68,5	>
2.	Indeks Pembangunan Gender	Skor	86,04	85,87	86,11	86,59	87,26	86,9	<
3.	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	66,63	70,35	69,78	70,16	70,45	68	>
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,23	4,51	4,21	3,62	3,27	4,10	>

No	Aspek/Bidang / Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018*		
5.	Persentase pertumbuhan penduduk	%	0,88	0,68	0,80	0,81	0,80	0,71	>

Sumber : Data diolah, 2018

Dengan komparasi terhadap target capaian RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pada aspek kesejahteraan sosial telah menunjukkan arah kemajuan yang tepat. Sampai dengan tahun 2017, kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi telah berpengaruh terhadap tercapainya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta pengurangan tingkat pengangguran diperkirakan telah melampaui target RPJMD. Sedangkan kebijakan pengarusutamaan gender dan pengendalian jumlah penduduk masih perlu ditingkatkan dengan merujuk pada belum tercapainya target indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan persentase pertumbuhan penduduk. Dengan alokasi anggaran tahun berjalan 2018 diproyeksikan indeks pembangunan gender dapat tercapai sebesar 87,26 yang berarti melampaui target RPJMD. Sedangkan persentase pertumbuhan penduduk diperkirakan masih dapat dikendalikan meskipun belum mencapai target.

Seni Budaya dan Olahraga

Aspek seni budaya dan olahraga dapat ditunjukkan melalui sejumlah indikator meliputi jumlah kelompok seni, jumlah gedung kesenian, jumlah medai serta jumlah lapangan olahraga. Hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada aspek seni budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Seni Budaya dan Olahraga

No	Aspek/Bidang	Satuan	Capaian Kinerja	Target	Interpret
----	--------------	--------	-----------------	--------	-----------

	/Urusan/Indikator		2014	2015	2016	2017*	2018**	2017	aspek belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
1.	Jumlah kelompok kesenian	kelp	305	305	438	202	202	330	<
2.	Jumlah gedung kesenian	buah	1	1	1	2	2	2	=
3.	Jumlah perolehan medali turnamen	buah	8	8	16	31	35	40	<
4.	Jumlah lapangan olahraga	buah	633	633	633	704	704	1690	<

Sumber : Data diolah, 2018

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pada aspek seni budaya dan olahraga pada tahun 2017 secara keseluruhan belum mencapai target capaian kinerja RPJMD 2016-2021 mencakup indikator jumlah kelompok kesenian, jumlah perolehan medali turnamen serta jumlah lapangan olahraga. Satu indikator yang telah tercapai sesuai targetnya adalah jumlah gedung kesenian. Berpijak pada evaluasi capaian indikator kinerja tersebut, maka kebijakan pemerintah daerah pada urusan kebudayaan serta pemuda dan olahraga masih perlu terus diupayakan untuk mencapai target indikator kerjanya.

2.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Pemerintahan Urusan Wajib

a. Pelayanan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pelayanan pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Hasil capaian kinerja penyelenggaran urusan pemerintah pada aspek pelayanan pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Intrpretasi belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		
1	Urusan Pendidikan								
	APK PAUD (umur 3-6 tahun)	%	69,09	72,58	75,09	78,52	81,14	84	<
	APS (Angka Partisipasi Sekolah) Umur 7 – 12 th	Skor	97,01	98,11	98,04	97,28	97,28	99,78	<
	APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 th	Skor	92,22	100	100	100	100	100	=
	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik	%	na	26,12	39,10	46,62	50,57	61,87	<
	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,92	6,94	6,97	6,94	7,5	<
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,46	11,73	12,02	12,05	12,04	12	>
2	Urusan Kesehatan								
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	14	8	15	13	7	7	<
	Kasus Kematian Bayi (AKB)	Kasus	125	134	143	135	120	120	<
	Akaba (Angka Kematian Balita)	Kasus	150	164	183	158	135	135	<
	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,18	0,21	0,12	0,11	0,16	0,16	>
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	%	48,98	44,96	55,59	62	88,64	66,01	<
	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	%	73,02	73,02	97	79	97	82,54	<
	Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	Kawasan	0	0	0	1	1	3	<
	Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	%	2,31	4,57	6,48	6,93	6,93	16,34	<
	Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	%	47	48	55	57	62	86,34	<
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	7,8	4,7	2,9	2,9	8,75	2,80	>
	Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	%	70	80,34	81,74	81,91	81,91	95,00	<
	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	%	71,25	77,42	79,98	81,13	81,13	83,50	<
	Persentase cakupan air baku	%	64	66	67	69	73	76	<
	Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	%	5,87	6,76	7,63	8,21	8,7	8,49	<
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		95,68	96,32	97,77	89,24	97,88	97,93	<
	Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui pemilu (Pilpres dan Pileg, Pilgub)	%	na	na	73,3	73,3	73,73	75,00	<
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	100	100	100	100	=
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	na	na	50	57	61	65	<
6	Urusan Sosial								
	Persentase PMKS yang ditangani	%	na	21,72	24,52	33,79	60,00	55,00	<

Sumber : Data diolah, 2018

Evauasi terhadap hasil capaian kinerja mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, uruasan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Pada urusan pendidikan target RPJMD tahun 2017 hanya tercapai pada indicator APS usian 13-15 tahun, sedangkan sebagian besar indikator capaian kinerja belum memenuhi target. Pada urusan Kesehatan hanya tercapai pada indikator penurunan prevalensi gizi buruk. Urusan Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang hanya tercapai pada indikator jalan dan jembatan dalam kondisi baik. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tercapai pada target pesentase luas penanganan kawasan kumuh. Urusan ketentraman, Ketertiban umum dan pelindungan masyarakat tercapai pada indikator rasio jumlah linmas dan penegakan perda. Sementara pada urusan sosial terkait indikator penanganan PMKS belum mencapai target.

b. Pelayanan Pemerintahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Pelayanan pemerintahan urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandiaan kebudayaan, perpustakaan serta kearsipan. Hasil capaian kinerja penyelenggaran urusan pemeritah pada aspek pelayanan pemerintahan urusan wajib non pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		
1	Urusan Tenaga Kerja								

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,23	4,51	4,21	3,62	3,27	4,10	>
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Rasio KDRT	Rasio	0,013	0,011	0,008	0,009	0,001	0,001	<
	Cakupan desa ramah anak	%	33	46	51	58	72	65	<
	Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah	%	25,8	25,8	22,7	23,3	23,3	31,00	<
	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	41	49	53	56	70	60,00	<
3	Urusan Pangan								
	Skor PPH	Skor	86,8	85,9	86,85	87,58	86,2	87,7	<
	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	k/kal/ka pita	5.956	6.141	6.325	6.515	6.710	6.710	<
4	Urusan Pertanahan								
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,55	0,65	0,86	0,86	0,87	1,2	<
5	Urusan Lingkungan Hidup								
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/th	5,12	4,66	5,07	5,35	5	5	>
	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	%	59,2	61,1	62,7	63,3	63	66,50	<
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Persentase penduduk ber-KTP	%	80,32	80,32	89,65	100	100	100	=
	Persentase bayi ber-akte kelahiran	%	94,25	96,45	97,08	97,91	100	100	<
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Posyandu aktif	jumlah	1.234	1.225	1.227	1.228	1.228	1.225	>
	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0,4	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	<
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Cakupan peserta KB aktif	%	98,08	82,10	94,51	85,84	100	100	<
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	19,71	18,76	5,48	14,15	6,67	6,73	<

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	82,75	83,57	82,98	83,61	83,64	83,61	=
	Persentase Drop Out (DO) Keluarga Berencana	%	14,19	13,12	12,83	12,51	11,31	12,08	<
	Cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	91,97	92,12	91,47	91,96	91,9	91,64	>
9	Urusan Perhubungan								
	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	94	94	90	91	91	90,00	>
	Persentase ketersediaan angkutan pedesaan	%	69	67	60	68	69	70,00	<
10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	2,13	2,52	2,43	2,22	2,60	3,01	<
	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%	100	100	100	100	100	100	=
	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	86,97	86,97	100	100	100	100	=
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
	Persentase koperasi aktif	%	78,8	82,37	53,06	90,02	90,02	86,00	>
	Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	%	6,38	6,33	6,31	6,4	6,4	8,25	<
	Persentase KSP/USP dan koperasi sehat	%	32	35	36	37	37	39,00	<
12	Urusan Penanaman Modal								
	Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rp/tahun	646.829	3.672.901	5.172.530	5.772.530	6.057.712	4.521.408	>
13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga								
	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan nasional	bua h	8	8	16	31	35	40	<
	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	=
14	Urusan Statistik								
	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	50	60	70	50	50	80	<
15	Urusan Persandian								

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		
	Persentase Surat/Santel Yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	=
16	Urusan Kebudayaan								
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	3	12	12	12	14	<
17	Urusan Perpustakaan								
	Angka kunjungan perpustakaan per tahun	Org	14.272	14.199	14.211	15.719	17.800	17.100	<
18	Urusan Kearsipan								
	Pengelolaan arsip secara baku	%	43.5	52	55.3	60	61	68,1	<

Sumber : Data diolah, 2018

Evauasi terhadap hasil capaian kinerja urusan wajib non pelayanan dasar, dapat diketahui bahwa rata-rata masih belum mencapai target. Sejumlah indikator yang telah mencapai target yaitu Persentase penduduk ber-KTP, Posyandu aktif, Persentase angkutan umum yang laik jalan, Presentase koperasi aktif, Persentase organisasi kepemudaan yang dibina serta Persentase Surat/Santel Yang dikelola. Sedangkan sejumlah besar indikator lain masih belum tercapai.

Pelayanan Pemerintah Urusan Pilihan

Pelayanan pemerintahan urusan pilihan meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian serta transmigrasi. Hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemeritah pada aspek pelayanan pemerintahan urusan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Pilihan

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai(<) sesuai(=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
	Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	%/th	1,14	0,86	4,68	5,5	6,5	2	>
2	Urusan Pariwisata								
	Persentase pertumbuhan pendapatan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	%/th	3,8	5,2	3,5	5,3	5	5	>
	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,43	0,44	0,49	0,51	0,58	2,2	<
3	Urusan Pertanian								
	Nilai Tukar Petani	Skor	100,15	100,64	100,38	99,37	n/a	100,68	<
	Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	Ton/Ha	5,72	6,18	3,71	4,55	4,79	6,28	<
	Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	Skor	0,93	1,14	1,02	1,76	1,06	1,06	>
	Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	Skor	0,56	0,77	0,63	0,81	1,13	1,17	<
4	Urusan Perdagangan								
	Persentase pertumbuhan ekspor	%	0,71	0,93	1,27	1,49	4	4	<
	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	13,7	13,5	13,5	13,5	14,50	14,20	<
5	Urusan Perindustrian								
	Kontribusi sektor industri pengolahan	%	20,8	21,3	21,8	22,2	22,7	21,40	>
	Prosentase jumlah usaha industri kecil dibandingkan jumlah seluruh industri	%	39,92	39,85	39,97	40,05	42,00	43,00	<
	Jumlah Klaster Industri	klaster	4	4	4	4	10	9	<
6	Urusan Transmigrasi								
	Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	11	10	10	10	10	10	=

Sumber : Data diolah, 2018

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja urusan pilihan menunjukkan bahwa sejumlah indikator yang telah tercapai yaitu Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun, Persentase pertumbuhan pendapatan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia, Kontribusi sektor industri pengolahan serta Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum.

(PDU), namun sebagian besar indikator lain masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah

Pelayanan pemerintahan unsur penunjang pemerintahan daerah meliputi fungsi perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan dan pelaitahsn serta fungsi lainnya. Hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemeritah pada aspek pelayanan pemerintahan unsur penunjang pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Unsur Penunjang

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					Target 2017	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui(>)
			2014	2015	2016	2017*	2018**		
1	Fungsi Perencanaan Pembangunan								
	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan.	%	na	na	60	67	70	60	>
	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	na	na	80	83	90	85	<
	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD	%	na	na	87,39	95,15	97	85	>
	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	na	na	80	95	100	95	=
2	Fungsi Keuangan								
	Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	<
	Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	%	13,46	14,12	11,32	18,22	15,94	13.47	>
3	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								
	Rata-rata Nilai SKP	Skor	na	81,22	83,21	84,37	88,12	87	<
4	Fungsi Lainnya								
	Nilai PMPRB	Nilai	na	na	53	57	59	64	<
	Nilai SAKIP	Nilai	na	na	55,49	55,04	58	62	<
	Rata-rata Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Skor	na	75,79	76,20	76,20	76,20	77	<
	Tingkat maturitas SPIP	Nilai	na	1	1	2	2	2	=
	Tingkat kapabilitas APIP	Level	na	1	2	2	2	3	<

Sumber : Data diolah, 2018

Evauasi terhadap hasil capaian kinerja Pelayanan pemerintahan unsur penunjang pemerintahan daerah dalam fungsi perencanaan telah

tercapai pada indikator persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perncanaanserta persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD. Dalam fungsi keuangan telah tercapai pada indikator Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan pada fungsi kepegawain telah mencapai indikator rata-rata nilai SKP.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional.

Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Disesuaikan atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan suatu ukuran untuk menilai daya beli relatif suatu wiilayah dengan wilayah lainnya dengan asumsi barang-barang dan jasa-jasa di kedua wilayah tersebut berbiaya sama. Dalam penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan digunakan teknik penyesuaian terhadap pengeluaran perkapita. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.12
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

Indikator	Pengeluaran per Kapita (Rp.000)				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Rembang	7.401	8.021	9.306	10.118	11.131

Sumber: BPS dan Rembang Dalam Angka 2017

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator produksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan

perbandingan/rasio antara Indeks yang diterima petani (It) dengan Indeks yang dibayar petani (Ib). Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian yang dihasilkan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Rembang mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 105,12 menjadi 100,38 pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh naik-turunnya indeks yang diterima petani (indeks harga hasil produksi pertanian) sedangkan indeks yang dibayar petani (indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian) juga mengalami hal yang sama.

Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

a. Perhubungan

1) Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 hektardan terbagi ke dalam 14 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 629,10 km ruas jalan kabupaten dan 238.600 km jalan poros desa. Jumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 pada tahun 2017 sebanyak 130.515 unit. Perkembangan jumlah kendaraan di kabupaten Rembang tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Kendaraan diKabupaten Rembang
Tahun 2014-2017

No	Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Mobil Penumpang	5.787	6.703	7.615	8.642	9.819
2	Bus	988	1.139	1.213	1.238	1.387
3	Mobil Barang	2.741	2.988	3.107	3.454	3.592
4	Sepeda Motor	115.472	123.502	148.877	157.145	166.573

Sumber: SIPD, 2018

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat sarana jalan terhadap jumlah kendaraan, dalam

rangka memberikan kemudahan akses kepada seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Dari data tabel di atas maka rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan pada tahun 2017 adalah 1 dibanding 150 yang berarti bahwa setiap 1 km jalan dapat menampung kendaraan sebanyak 150 unit.

2) Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa Tengah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Tersedia 7 terminal tipe C di wilayah Kabupaten Rembang yang melayani transportasi baik dalam kota maupun ke luar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2017 adalah sebanyak 492.247 orang. Sedangkan jumlah barang yang dapat terangkut sebanyak 265.864 ton.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dinhubkominfo Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Satlantas Polres Rembang secara rutin memberikan penyuluhan dan pembinaan berlalu lintas yang berkeselamatan kepada pemilik, pengemudi kendaraan angkutan umum barang maupun orang.

b. Penataan Ruang

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Sejak terbitnya Perda RTRW maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian sampai saat ini belum tersedia data terkait persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 dilaksanakan evaluasi Perda RTRW guna mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah yang begitu cepat.

2) Luas Wilayah Industri

Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.200 hektar. Adapun pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Kragan dan Sarang.

3) Luas Wilayah Kebanjiran

Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir memang belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir dapat diketahui ternyata terdapat 5 wilayah kecamatan yang rawan terkena bencana banjir, yaitu Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan dan Lasem.

4) Luas Wilayah Kekeringan

Selain banjir, Kabupaten Rembang juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah tengah misalnya Gunem, Pancur, Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan, Lasem. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan.

5) Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama di luar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa, maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktivitas non pertanian yang memiliki karakteristik pola perkembangan menyebar, kompleksitas dan mobilitas tinggi. Di Kabupaten Rembang 8 kecamatan yang memiliki klasifikasi kawasan perkotaan, yaitu Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Kaliori, Rembang, Kragan, Sluke dan Lasem. Sedangkan 6 kecamatan lainnya masih diklasifikasikan sebagai kawasan perdesaan.

c. Pariwisata

Usaha-usaha pariwisata yang ada belum semuanya terdata dan memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sedang yang sudah terdata masing-masing daya tarik wisata alam/ budaya/

buatan ada 38 buah, Jasa Transportasi Wisata 7 buah, Jasa Perjalanan Wisata 7 buah, Jasa Makanan dan Minuman 34 buah, Jasa Penyediaan Akomodasi ada 18 buah (hanya hotel bintang dan non bintang, sedangkan homestay Desa Wisata dan Bumuh Perkemahan belum terdata), Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi ada 2 buah, Jasa Informasi Pariwisata 2 buah, Jasa Pramuwisata 4 orang, Wisata Tirta 11 buah, Usaha Spa 3 buah.

1) Jumlah Rumah Makan dan Tenaga Kerja

Jumlah rumah makan di Kabupaten Rembang dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2014 rumah makan di Kabupaten Rembang berjumlah 23 buah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu berjumlah 31 buah. Tenaga kerja di rumah makan Kabupaten Rembang mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 230 orang, dan meningkat sebanyak orang pada tahun 2016.

2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah hotel bintang dan non bintang sebanyak 18 buah. Namun yang layak/ dapat didata hanya 17 terdiri dari 1 hotel bintang dan 16 hotel non bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang. Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem.

d. Utilitas Publik

1) Listrik

Peran sektor energi telah menunjukkan peningkatan nyata dalam pembangunan daerah yaitu memacu efek berantai ekonomi. Berdasarkan data elektrifikasi dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana sampai dengan akhir tahun 2015 telah mencapai 91,18%. Pembangunan jaringan tegangan juga terus mengalami penambahan baik jaringan tegangan menengah (JTM) maupun jaringan tegangan rendah (JTR). Selengkapna Perkembangan Rasio elektrifikasi, pembangunan jaringan tenaga menengah dan pembangunan jaringan tenaga rendah di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.66 berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Rasio Elektrifikasi, Pembangunan Jaringan Tenaga Menengah Dan Pembangunan Jaringan Tenaga RendahDi Kabupaten Rembang

Tahun 2014-2018

NO.	Item	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
1.	Rasio Elektrifikasi (%)	87,82	91,18	89,42	90,8	90,8
2.	Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197
3.	Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)	3,124	0,562	0,562	0,562	0,562

Sumber: PLN Distribusi Jateng dan DIY ,2017

2) Air bersih

Sejalan dengan perwujudan struktur ruang RTRWK maka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum Kabupaten Rembang seyogyanya terus melanjutkan mendorong peningkatan layanan air bersih dan irigasi, program pembangunan sungai terpadu, pembangunan embung-embung, serta peningkatan prasarana sarana drainase dan air limbah. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.15
Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014

No.	layanan	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Air minum %	70	80,34	83,27	85,66	87,10
2	Sanitasi (dasar)%	71,25	77,42	79,98	80,64	82,33
3	Persampahan %	20,4	20,7	21,2	21,9	22,5

Sumber: DPKP Kabupaten Rembang, 2017

Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data Polres Rembang tahun 2017 masih

mencatat aporan kasus pidana sejumlah 96kasus. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasio penanganan kasus tindak kriminal semakin menunjukkan peningkatan hingga mencapai angka 90,6 Hal ini menunjukkan kesigapan dan komitmen seluruh pihak dalam penanganan tindak kriminal guna mewujudkan kondusivitas dan keamanan daerah. Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.16
Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Tindak Kriminal		
		Kasus	Tertangani	Rasio
1.	2014	52	32	61,5
2.	2015	84	81	96,4
3.	2016	21	19	90,4
4.	2017	96	87	90,6
5.	2018*	57	57	100

Sumber: Polres Rembang 2018(data diolah)

Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang.

b. Kemudahan Perijinan

Pelayanan perijinan di Kabupaten Rembang saat ini dilaksanakan oleh Pelayanan Perijinan Terpadu dengan metode satu pintu. Keberadaan pelayanan perijinan terpadu diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Jenis perijinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang meliputi Izin HO, Tanda daftar perusahaan (TDP), Tanda

Daftar Gudang (TDG), SIUP, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Eksploitasi Pertambangan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perijinan bervariasi, mulai dari 6 hari sampai 10 hari. Lebih rinci Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.17
Jenis Ijin dan Lama Proses Pengurusannya

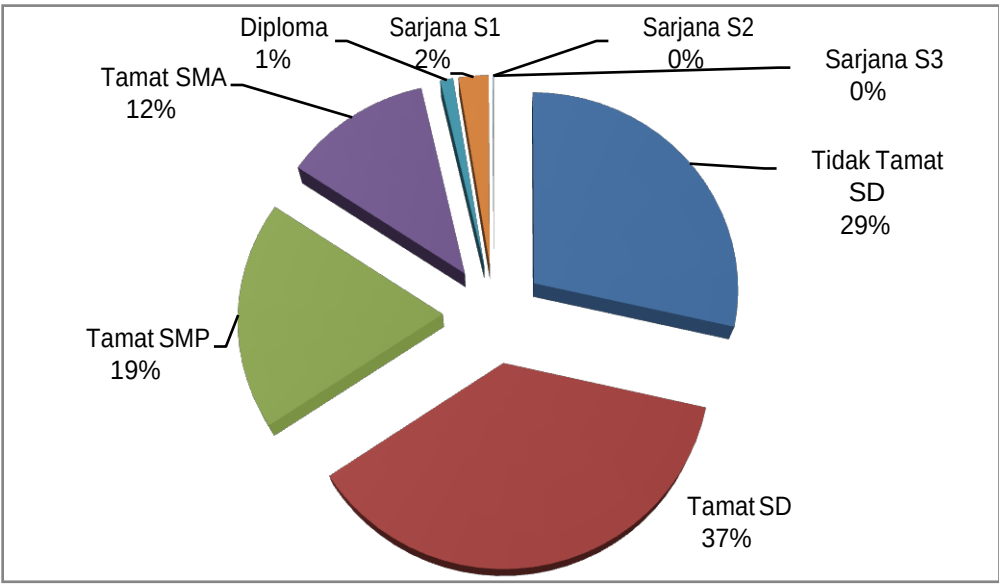
No	Jenis Ijin	Lama Proses Ijin
1.	Izin HO	10 hari
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5 hari
3.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 hari
4.	SIUP	5 hari
5.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 hari
6.	Izin Eksploitasi Pertambangan	6 hari

Sumber: DPMPTSPNAKER Kabupaten Rembang Tahun 2017

Sumber Daya Manusia

- a. Persentase Penduduk berdasarkan pendidikan tertinggi

Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014–2018 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2.5
Grafik Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2017

Sumber: SIPD, 2017

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Rembang berpendidikan tamat SD sederajat, kemudian kelompok besar kedua adalah penduduk tidak tamat SD, berikutnya adalah kelompok penduduk tamat SLTP sederajat, kelompok

penduduk tamat SLTA sederajat serta yang terakhir kelompok penduduk taatan Perguruan Tinggi mulai jenjang diploma hingga starta 3.

b. Rasio ketergantungan

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) di Kabupaten Rembang tahun 2016 adalah sebanyak 437.151 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia non produktif adalah 188.985 jiwa. Berdasarkan data tersebut rasio ketergantungan di Kabupaten Rembang sebesar 43,23. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kabupaten Rembang menanggung 43,23 orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi. Angka ketergantungan tinggi yaitu angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat dilakukan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah maupun dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2017 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil

atau keluaran yang direncanakan

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
- 6) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2017, tahun berjalan 2018 serta realisasi RPJMD dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Rembang

N O	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja Program(outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021		RealisasiCapaian Kinerja RPKDs/d Tahun Lalu 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD (%)		RealisasiKinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2018		TingkatCapaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018		OPD PENANGGUNGJ AWAB
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
1	Urusan Pendidikan																	Dindikpora
	Program Pendidikan Anak Usia Dini				6,128,683,0 74		987,000,00 0		917,151,9 85		3,435,000,0 00		374.53 %		4,422,000,0 00		72.15 %	
		APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	96		78.52		84		81.14		96.60%		81.14		84.52%		
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik	%	42		5.1		37		5.1		13.78%		5.10		12.14%		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)				359,326,68 7,961		50,764,694, 700		53,772,92 0,066		113,913,29 2,700		211.84 %		164,677,98 7,400		45.83 %	

		Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	Skor	85		77.52		79.00		77.52		98.13%		77.52		91.20%		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	Skor	70		51.75		55.50		51.75		93.24%		51.75		73.93%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	98		87.32		92		87.32		94.91%		87.32		89.10%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	88		63.16		82		63.16		77.02%		63.16		71.77%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88		76.71		82		76.71		93.55%		76.71		87.17%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70		48.5		61		48.5		79.51%		48.50		69.29%		
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal				18,603,367,321		440,000,000		2,783,977,415		1,249,000,000		44.86%		1,689,000,000		9.08%	
		Persentase kelulusan kejar paket A, B, C	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		

		Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin	%	6.8		100		4.8		100		2083.33%		100.00		1470.59%		
		Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas	%	99.08		83.42		99.05		83.42		84.22%		83.42		84.19%		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				25,790,498,977		13,531,600,000		3,859,525,291		15,055,200,000		390.08%		28,586,800,000		110.84%	
		Guru Persentase yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	84.00		90.89		80.00		90.89		113.61%		90.89		108.20%		
		Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	37		65.41		31		65.41		211.00%		65.41		176.78%		
		Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	93		51.11		87		51.11		58.75%		51.11		54.96%		

		Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	100		52.61		97		52.61		54.24%		52.61		52.61%		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				13,197,618,699		4,213,100,000		1,975,011,930		3,152,400,000		159.61%		7,365,500,000		55.81%	
		Persentase capaian SPM pendidikan dasar pada tingkat kabupaten	%	100.00		97		92.00		97		105.43%		97.00		97.00%		
		Persentas pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	%	100		100		98		100		102.04%		100.00		100.00%		
		Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	100		97.4		100		97.4		97.40%		97.40		97.40%		
		Cakupan pelayanan penerbitan izin pendidikan	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		

	Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah				2,810,063,5 16		0		500,565,9 30		48,000,000		9.59%		48,000,000		1.71%	
		Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang tertangani	%	40		100		20		100		500.00 %		100.0 0		250.00 %		
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus				2,497,834,2 37		0		444,947,4 93		83,000,000		18.65%		83,000,000		3.32%	
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SD	%	50		64.71		30		64.71		215.70 %		64.71		129.42 %		
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SMP	%	50		20.33		30		20.33		67.77%		20.33		40.66%		
	Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal				1,248,917,1 18		0		222,473,7 47		145,000,00 0		65.18%		145,000,00 0		11.61 %	
		Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal pendidikan karakter dan budi pekerti	%	90		57.24		50		57.24		114.48 %		57.24		63.60%		

2	Urusan Kesehatan																	Dinkes
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				80,099,347,102		76,925,000		11,986,796,231		4,978,855,000		41.54%		5,055,780,000		6.31%	
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100		98.18		98.8		98.18		99.37%		98.18		98.18%		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				44,791,292,634		3,215,069,000		6,702,977,205		12,830,691,000		191.42%		16,045,760,000		35.82%	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75		100		75		100		133.33%		100.00		133.33%		
		Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	%	100		83		80		83		103.75%		83.00		83.00%		
		Persentase penurunan AKI	skor	5		14		6		14		233.33%		14.00		280.00%		
		Persentase penurunan AKB	skor	100		135		120		135		112.50%		135.00		135.00%		

		Persentase Desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	%	100		81.9		90		81.9		91.00%		81.90		81.90%	
		Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	35		3.7		20		3.7		18.50%		3.70		10.57%	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan				7,339,723,357		143,000,000		1,098,383,089		105,400,000		9.60%		248,400,000		3.38%
		Persentase kasus keracunan makanan yang ditangani	%	100.00		98		99.00		98		98.99%		98.00		98.00%	
		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	100		98		98		98		100.00%		98.00		98.00%	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				3,440,505,095		40,000,000		514,868,535		325,000,000		63.12%		365,000,000		10.61%

		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	92		72.55		85		72.55		85.35%		72.55		78.86%		
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100		41.84		100		41.84		41.84%		41.84		41.84%		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				1,719,064,333		135,000,000		257,256,452		113,400,000		44.08%		248,400,000		14.45%	
		Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	8,5		9.1		8.70		9.1		104.60%		9.10		#VALUE!		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
		Rasio posyandu per satuan balita	%	11.42		35.99		11.13		35.99		323.36%		35.99		315.15%		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				1,563,439,560		50,000,000		233,967,343		76,800,000		32.83%		126,800,000		8.11%	
		Cakupan rumah sehat	%	82.5		74		75		74		98.67%		74.00		89.70%		
		Cakupan rumah bebas jentik	%	100		81.5		80		81.5		101.88%		81.50		81.50%		

		Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat	%	100		83.9		95		83.9		88.32%		83.90		83.90%	
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	%	100		73.54		90		73.54		81.71%		73.54		73.54%	
		Cakupan jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi syarat	%	100		87.2		75		87.2		116.27 %		87.20		87.20%	
		Cakupan Sanitasi dan Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat	%	100		78.01		80		78.01		97.51%		78.01		78.01%	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				15,381,118,389				2,301,770,721		978,563,000		42.51%		978,563,000		6.36%
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %	

		Cakupan Desa / kelurahan Univer- sal Child Immunization (UCI)	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100		47.3		100		47.3		47.30%		47.30		47.30%		
		Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang tertangani	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
		Persentase penanganan kasus diare per 1000 penduduk yang tertangani	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
		Persentase kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
		Persentase ODHA terdata yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ATR)	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		

		Persentase kasus Filariasis (kaki gajah) yang ditangani	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Persentase penanganan penderita malaria	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular				10,337,294,711		0		1,841,416,577		125,000,000		6.79%		125,000,000		1.21%	
		Prevalensi tekanan darah tinggi	%	5		8.2		5		8.2		164.00 %		8.20		164.00 %		
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	1.5		0.74		1.5		0.74		49.33%		0.74		49.33%		
		Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	%	7		3		7		3		42.86%		3.00		42.86%		
		Persentase Desa/Kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	50		22.8		25		22.8		91.20%		22.80		45.60%		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				19,816,127,388		330,000,000		2,965,465,883		451,667,000		15.23%		781,667,000		3.94%	

		Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)	%	87.5		100		50		100		200.00 %		100.00		114.29 %		
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus disediakan oleh RSUD	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				226,585,233,287		4,375,153,000		33,908,279,140		11,619,000,000		34.27%		15,994,153,000		7.06%	

		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	%	0.26		0.81		0.26		0.81		311.54 %		0.81		311.54 %		
		Ratio bedrawat inap per 10.000 penduduk	skor	85		84		83		84		101.20 %		84.00		98.82%		
		Persentase puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	100		92		100		92		92.00%		92.00		92.00%		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				625,375,82 ₄		0		93,586,93 ₇		78,000,000		83.34%		78,000,000		12.47 %	
		Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan	%	100.00		82		90.00		82		91.11%		82.00		82.00%		
		Rasio dokter per satuan penduduk (10.000 penduduk)	skor	48		0.88		42		0.88		2.10%		0.88		1.83%		
		Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	%	100		11.76		70		11.76		16.80%		11.76		11.76%		

	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita				597,452,793		45,650,000		89,408,280		49,700,000		55.59%		95,350,000		15.96%	
		Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100		100		100		100		100.00%		100.00%		100.00%		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				656,644,615		25,000,000		98,266,284		35,000,000		35.62%		60,000,000		9.14%	
		Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	%	80		73.3		80		73.3		91.63%		73.30		91.63%		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				2,607,598,304		339,350,000		390,224,773		2,332,618,000		597.76%		2,671,968,000		102.47%	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99		99.8		95		99.8		105.05%		99.80		100.81%		
		Cakupan kunjungan bayi	%	96		94.5		92		94.5		102.72%		94.50		98.44%		

		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	85		90.4		75		90.4		120.53 %		90.40		106.35 %		
		Cakupan pelayanan nifas	%	95		96.5		89		96.5		108.43 %		96.50		101.58 %		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan				345,207,455		56,095,000		51,659,989		284,400,000		550.52 %		340,495,000		98.63 %	
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kualitas SDM Kesehatan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas				236,882,235,066		130,627,034,184		35,449,216,321		139,627,034,184		393.88 %				0.00%	

		Persentase peningkatan fasilitas kesehatan terakreditasi	%	100		93.75		100		93.75		93.75%		93.75		93.75%		
	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata				438,128,880,154	9,200,000,000		65,565,598,216		29,600,000,000		45.15%		38,800,000,000		8.86%		
		Skor Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat (I/SKM) RSUD	Skor	80.00		78.26		80.00		78.26		97.83%		78.26		97.83%		
		BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	80		78.10		80		78.10		97.63%		78.10		97.63%		
		AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	%	4		3.44		4		3.44		86.00%		3.44		86.00%		
		TOI (Turn Over Interval)	%	2		0.94		2		0.94		47.00%		0.94		47.00%		
		BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	%	50		84.83		50		84.83		169.66%		84.83		169.66%		
		NDR (Net Death Rate)	%	20		17.88		20		17.88		89.40%		17.88		89.40%		

		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	%	90		76.30		76.98		76.30		99.12%		76.30		84.78%		
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	%	90		79.54		86.1		79.54		92.38%		79.54		88.38%		
		Angka Kematian BBLR (1.500gr - 2.500 gr) di Rumah Sakit	%	2.5		2.14		3.7		2.14		57.84%		2.14		85.60%		
		Ketersediaan Obat di Rumah Sakit	%	99		98.60		98.4		98.60		100.20%		98.60		99.60%		
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				18,733,756,774		0		3,337,106,200		0		0.00%		0		0.00%	
		Cakupan jaminan kesehatan penduduk miskin	%	100		75		92.3		75		81.26%		75.00		75.00%		
3.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																	Dputaru
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				654,029,287,127		60,400,000,000		97,874,902,577		87,348,000,000		89.24%		147,748,000,000		22.59%	

		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	85		62		66.01		62		93.93%		62.00		72.94%		
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	90.06		79		81		79		97.53%		79.00		87.72%		
		Tingkat aksesibilitas (panjang jalan/luas wilayah)	%	94		82		85		82		96.47%		82.00		87.23%		
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				274,413,098,239		15,680,000,000		41,065,676,698		20,200,000,000		49.19%		35,880,000,000		13.08%	
		Persentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan per tahun	%	82		47		55		47		85.45%		47.00		57.32%		
		Persentase jembatan dalam kondisi baik yang direhabilitasi per tahun	%	100		79		90		79		87.78%		79.00		79.00%		
	Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan				4,728,382,415		0		842,282,435		180,000,000		21.37%		180,000,000		3.81%	

		Pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				31,788,478,504		525,000,000		4,757,117,606		4,850,000,000		101.95 %		5,375,000,000		16.91 %	
		proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	98		92		94		92		97.87%		92.00		93.88%		
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong				5,628,382,415		3,698,500,000		842,282,435		18,800,000,000		2232.03%		22,498,500,000		399.73 %	
		persentase drainase jalan dalam kondisi baik	%	80		62.44		70		65.3		93.29%		65.30		81.63%		
		persentase drainase lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	%	60		20		30		25		83.33%		25.00		41.67%		

	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				8,755,261,534		400,000,000		1,310,217,121		320,000,000		24.42%		720,000,000		8.22%	
		Persentase luapan limpasan saluran air jalan protokol yang tertangani	%	100		85		100		87		87.00%		87.00		87.00%		
	Program pembangunan sistem informasi irigasi				4,728,382,415		0		842,282,435		464,090,600		55.10%		464,090,600		9.81%	
		Pemanfaatan sistem infromasi irigasi dalam perumusan kebijakan	%	100		0		100		50		50.00%		50.00		50.00%		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				42,412,413,030		4,353,000,000		6,346,979,983		10,846,500,000		170.89%		15,199,500,000		35.84%	
		Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	98.12		81.00		87.60		81.00		92.46%		81.00		82.55%		
		rasio ketersediaan air irigasi untuk pertaian rakyat	%	0.82		-		0.72		-		#VALUE!		-		#VALUE!		

	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya				54,601,563,184		3,350,000,000		8,171,075,489		3,850,000,000		47.12%		7,200,000,000		13.19%	
		persentase embung dan sungai kewenangan kabupaten dalam kndisi baik	%	88		57		83		62		74.70%		62.00		70.45%		
	Program penyediaan dan pengolahan air baku				1,178,697,637				250,000,000		845,204,000		338.08%		845,204,000		71.71%	
		Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari	%	88		65		76		65		85.53%		65.00		73.86%		
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				1,414,437,165				300,000,000		950,000,000		316.67%		950,000,000		67.16%	
		Cakupan akses air Minum		100.00		81.91		95.00		81.91		86.22%		81.91		81.91%		

		Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik	%	4		0		3.2		0		0.00%		-		0.00%		
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				1,414,437,165				300,000,000		0		0.00%		0		0.00%	
		Pusat pertumbuhan	kawasan	6		1		3		1		33.33%		1.00		16.67%		
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				145,041,951,455		950,000,000		21,705,399,357		0		0.00%		950,000,000		0.65%	
		persentase infrastruktur pedesaan (air bersih) dalam kondisi baik	%	73		53		67		57		85.07%		57.00		78.08%		
	Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah				2,357,395,275				500,000,000		0		0.00%		0		0.00%	
		persentase kondisi gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	93		-		87		-		#VALUE !		-		#VALUE !		
	Program pembinaan jasa konstruksi				1,885,916,220				400,000,000		135,000,000		33.75%		135,000,000		7.16%	

		persentase peserta pembinaan yang lulus uji kompetensi	%	100	-	100	-	#VALUE !	-	#VALUE !							
	Program perencanaan tata ruang				1,650,176,692	1,000,000,000	350,000,000	719,000,000	205.43%	1,719,000,000	104.17%						
		persentase penetapan rencana detil tata ruang menjadi peraturan daerah	%	100	0	60	0	0.00%	-	0.00%							
	Program pengendalian pemanfaatan ruang				1,650,176,692		350,000,000	0	0.00%	0	0.00%						
		persentase pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	100	0	70	0	0.00%	-	0.00%							
4.	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman																DPKP
	Program lingkungan sehat perumahan				1,471,052,307	0	262,043,424	7,572,438,000	2889.76%	7,572,438,000	514.76%						
		Cakupan sanitasi layak	%	100	81.13	83.5	81.13	97.16%	81.13	81.13%							
	Program pengembangan perumahan				2,101,503,296	350,000,000	374,347,749	4,114,000,000	1098.98%	4,464,000,000	212.42%						

		Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	%	90		0		85		0		0.00%		-		0.00%		
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				1,751,052,307		0		262,043,424		120,000,000		45.79%		120,000,000		6.85%	
		Persentase kawasan permukiman kumuh	%	0.0		290.45		2.8		290.45		10373.21%		290.45		#DIV/0!		
	Program pengelolaan areal pemakaman				2,501,503,296		500,000,000		374,347,749		663,000,000		177.11%		1,163,000,000		46.49%	
		persentase ketersediaan tempat pemakaman umum	%	40		0		25		0		0.00%		-		0.00%		
5.	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	SatpolPP
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				8,661,455,161		1,440,000,000		1,296,179,081		1,452,000,000		112.02%		2,892,000,000		33.39%	Dinkesbangpolinmas
		persentase konflik sosial yang tertangani	%	100		100		100		100		100.00%	#DIV/0!	100.00		100.00%		

		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100		100		100	1,998,412,345	100		100.00%	0.00%	100.00		100.00%		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				8,082,982,524		976,500,000		1,209,611,164		1,114,000,000		92.10%		2,090,500,000		25.86%	BPBD
		Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	%	13		89		11		89		809.09%		89.00		684.62%		
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100		2940		100		2940		2940.00%		2,940.00		2940.00%		
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				2,782,922,416		0		416,461,871		36,000,000		8.64%		36,000,000		1.29%	
		Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	%	100		90		100		90		90.00%		90.00		90.00%		
	Program Pendidikan Politik Masyarakat				375,225,494		60,000,000		56,152,162		66,000,000		117.54%		126,000,000		33.58%	

		Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	%	75		73.3		60		73.3		122.17 %		73.30		97.73%		
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan pendidikan politik	%	100		33		90		33		36.67%		33.00		33.00%		
	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				375,225,494		380,000,000		56,152,162		479,000,000		853.04 %		859,000,000		228.93 %	
		Persentase kriminalitas yang tertangani	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	100		87.66		100		87.66		87.66%		87.66		87.66%		
	Program Penegakan Peraturan Daerah				5,565,844,833		1,270,000,000		832,923,741		588,000,000		70.59%		1,858,000,000		33.38 %	
		persentase pelanggaran Perda yang ditangani	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		

	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan				656,719,780		870,000,000		116,983,672		0		0.00%		870,000,000		132.48%	
		rasio poskamling per 10.000 penduduk	%	100		95		75		95		126.67%		95.00		95.00%		
		cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana						0		3,607,242,500		45,000,000		1.25%		45,000,000		#DIV/0!	
		Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
		Persentase Sarpras sanitasi di daerah bencana	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				18,373,541,706		700,000,000		2,749,584,216		767,000,000		27.90%		1,467,000,000		7.98%	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%	100		76.66		100	3,751,532,200	76.66		76.66%	0.00%	76.66		76.66%		

		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	11		15		11		15		73.33%		15.00		73.33%	
		persentase pasar tradisional yang terpasang sistem pemadam kebakaran	%	100		60		60		60		100.00 %		60.00		60.00%	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				18,373,541, 706		2,870,000,0 00		2,749,584, 216		555,000,00 0		20.18%		3,425,000,0 00		18.64 %
		Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	80		65		70	3,751,532, 200	65		92.86%	0.00%	65.00		81.25%	
6.	Urusan Sosial																Dinsospkb
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				2,970,535,1 63		263,000,00 0		444,537,9 52		96,000,000		21.60%		359,000,00 0		12.09 %
		Pertumbuhan KUBE-FM	kelompok	150		45		79		45		56.96%		45.00		30.00%	

		Persentase PMKS yang ditangani	%	70		49.83		60		49.83		83.05%		49.83		71.19%	
		Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	100		85		95		85		89.47%		85.00		85.00%	
		Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	45		49.83		45		49.83		110.73 %		49.83		110.73 %	
		Persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Kerja (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	60		50		60		50		83.33%		50.00		83.33%	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				2,345,159,340		210,000,000		350,951,015		722,000,000		205.73 %			0.00%	

		Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tinggal darurat	%	84		80		84		80		95.24%		80.00		95.24%		
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100		80		95		80		84.21%		80.00		80.00%		
		Persentase penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Persentase PMKS yang mendapatkan bansos	%	100		49.83		60		49.83		83.05%		49.83		49.83%		
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				312,687,912		150,000,000		46,793,469		62,000,000		132.50 %		212,000,000		67.80 %	

		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	80		35		50		35		70.00%		35.00		43.75%	
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo				312,687,912		40,000,000		46,793,469		116,000,000		247.90%		156,000,000		49.89%
		Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam kondisi baik	%	70		70		70		70		100.00%		70.00		100.00%	
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				938,063,736		100,000,000		140,380,406		20,000,000		14.25%		120,000,000		12.79%

		Persentase Eks penyangang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	%	100		100		80		100		125.00 %		100.0 0		100.00 %		
		persentase napi, pengguna narkoba, dan penderita penyakit sosial lainnya serta generasi muda yang memanfaatkan hasil pembinaan	%	100		80		70		80		114.29 %		80.00		80.00%		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				7,254,359,5 57		527,000,00 0		1,085,608, 472		760,000,00 0		70.01%		1,287,000,0 00		17.74 %	
		Persentase Peningkatan Kemitraan pelaku usaha kesejahteraan sosial	%	80		0		65		0		0.00%		-		0.00%		

		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100		22		70		22		31.43%		22.00		22.00%		
		Persentase lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) telah dibina	%	100		100		90		100		111.11 %		100.00		100.00 %		
	Program Penanganan Anak Terlantar				1,178,697,637		0		250,000,000		22,000,000		8.80%		22,000,000		1.87%	
		Persentase penanganan anak-anak terlantar	%	90		73		75		73		97.33%		73.00		81.11%		
	Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.				942,958,110		0		200,000,000		45,000,000		22.50%		45,000,000		4.77%	
		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	%	100		100		90		100		111.11 %		100.00		100.00 %		

	Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin				707,218,582		0		150,000,000		200,000,000		133.33%		200,000,000		28.28%	
		Persentase validasi data kemiskinan makro dan mikro	%	95		90		90		90		100.00%		90.00		94.74%		
	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat				1,178,697,637		0		250,000,000		55,000,000		22.00%		55,000,000		4.67%	
		Persentase Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	%	90		0		80		0		0.00%		-		0.00%		
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
1	Urusan Tenaga Kerja																	Dinpmptspnaker
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				12,438,725,137		1,290,000,000		1,861,444,181		884,000,000		47.49%		2,174,000,000		17.48%	
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	523		224		421		224		53.21%		224.00		42.83%		

		persentase fasilitas pelatihan yang bersertifikat	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				2,689,116,043		242,500,000		402,423,830		155,000,000		38.52%		397,500,000		14.78 %	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	80		60		66.97		60		89.60%		60.00		75.00%		
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	90		80		82.6		80		96.85%		80.00		88.89%		
		Rasio penduduk yang bekerja	%	96		75		95.9		75		78.21%		75.00		78.13%		
		Tingkat pengangguran terbuka	%	3.9		3.62		4.1		3.27		125.38 %		3.27		119.27 %		
		Rasio ketergantungan	%	41		0		44		0		0.00%		-		0.00%		
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				4,909,200,218		315,000,000		734,657,457		209,000,000		28.45%		524,000,000		10.67 %	
		persentase lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	%	100		70		100		70		70.00%		70.00		70.00%		

	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				942,958,110		0		200,000,000		25,000,000		12.50%		25,000,000		2.65%	
		persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
		persentase keikutsertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan	%	100		80		100		80		80.00%		80.00		80.00%		
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	Dinsospkb
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan				906,794,945		0		135,701,059		224,000,000		165.07%		224,000,000		24.70%	
		Persentase APBDes Responsife gender dan perlindungan anak	%			70		80		70		87.50%		70.00		#DIV/0!		

		Persentase OPD yang memiliki anggaran responsif anak	%	100		51		61		51		83.61%		51.00		51.00%		
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan				942,958,110		0		200,000,000		399,000,000		199.50%		399,000,000		42.31%	
		Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
		Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
		Persentase lembaga layanan perlindungan yang aktif di Desa	%	90		89		70		89		127.14%		89.00		98.89%		
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan				375,225,494				56,152,162		465,000,000		828.11%				0.00%	
		persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%	40		35.8		30		35.8		119.33%		35.80		89.50%		

		persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD	%	35		22.22		25		22.22		88.88%		22.22		63.49%	
		persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	40		44.15		10		44.15		441.50 %		44.15		110.38 %	
	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan				3,439,567,031		1,505,000,000		514,728,155		333,000,000		64.69%		1,838,000,000		53.44 %
		Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah	%	30		28		30		28		93.33%		28.00		93.33%	
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %	
	Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak			1 Pergub	3,564,642,196		605,000,000		533,445,542		482,000,000		90.36%		1,087,000,000		30.49 %

		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Rasio SDM yang memiliki sertifikasi mengelola ABK terhadap ABK	%	50		15		35		15		42.86%		15.00		30.00%		
		Cakupan tingkat pembinaan terhadap forum anak	%	100		55		55		55		100.00 %		55.00		55.00%		
		Rasio ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan anak terhadap jumlah anak	%	50		20		30		20		66.67%		20.00		40.00%		
		Rasio kegiatan / event dengan kelompok anak	%	50		30		35		30		85.71%		30.00		60.00%		
	Program Pemberdayaan Perempuan anak				3,564,642,196				533,445,542		528,000,000		98.98%		528,000,000		14.81 %	
		Persentase perlindungan khusus terhadap anak	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		

		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	0.75		55		60		55		91.67%		55.00		7333.33%		
	Progam Sistem Data Gender dan AnakProgram Pemberdayaan Perempuan anak				3,564,642,196		75,000,000		533,445,542		28,000,000		5.25%		103,000,000		2.89%	
		Presentase program, anggaran dan kegiatan yang memecahkan isu gender dan anak	%	100		50		70		50		71.43%		50.00		50.00%		
		Rasio SKPD yang sudah menyusun PPRG/A	%	100		82		85		82		96.47%		82.00		82.00%		
3	Urusan Pangan																	Dintanpan
	Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah				938,063,736		0		140,380,406		93,000,000		66.25%		93,000,000		9.91%	
		Jumlah regulasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	jumlah	10		1		7		1		14.29%		1.00		10.00%		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				5,659,651,206		513,000,000		846,961,782		0		0.00%		513,000,000		9.06%	

		Rata-rata konsumsi pangan per kapita	skor	2232		1976.9		2230		1976.9		88.65%		1,976.90		88.57%	
		Rata-rata konsumsi protein nabati	%	40		61.9		55		61.9		112.55%		61.90		154.75%	
		Rata-rata konsumsi protein hewani	%	60				45				0.00%		-		0.00%	
		Rata-rata konsumsi ikan per kapita	%	25		20		22		20		90.91%		20.00		80.00%	
		Persentase lumbung pangan yang mendapat pendampingan	%	65		50		50		50		100.00%		50.00		76.92%	
		Persentase pengembangan Desa Mandiri Pangan	%	30		3.4		16		7		43.75%		7.00		23.33%	
	Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan				4,121,226,679		0		616,737,916		0		0.00%		0		0.00%
		persentase ketersediaan bahan pangan utama	%	100				98				0.00%		-		0.00%	

	Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan				2,060,613,340		0		308,368,958		0		0.00%		0		0.00%	
		cakupan pembinaan dan pengawasan kemandirian pangan	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
	Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan				4,121,226,679		0		616,737,916		260,000,000		42.16%		260,000,000		6.31%	
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kcal/kapita /hari	7330		6100		6710		6100		90.91%		6,100.00		83.22%		
		Persentase Penurunan tingkat rawan pangan	%	4.52		7		6		7		116.67%		7.00		154.87%		
		persentase ketersediaan cadangan pangan di daerah rawan pangan	%	100		80		90		80		88.89%		80.00		80.00%		
	Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan				4,121,226,679		0		616,737,916		22,000,000		3.57%		22,000,000		0.53%	

		Nilai ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	nilai	70.86		100		60.00		100		166.67%		100.00		141.12%		
		persentase Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina	%	100		100		80		100		125.00%		100.00		100.00%		
		persentase pengembangan model pemantauan, distribusi, harga dan cadangan pangan	%	100		90		85		90		105.88%		90.00		90.00%		
	Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar				4,121,226,679		0	616,737,916		390,000,000		63.24%		390,000,000		9.46%		
		Skor PPH	skor	88.3		86.2		87.70		86.2		98.29%		86.20		97.62%		
		persentase pemanfaatan hasil pendampingan dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		

	Program Desa Mandiri Pangan				2,188,815,384		0		327,554,280		271,000,000		82.73%		271,000,000		12.38%	
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya tanaman pangan, horikultura dan peternakan skala kecil	%	15		6		8		6		75.00%		6.00		40.00%		
4.	Urusan Pertanahan																	DPKP
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				2,345,159,340		0		350,951,015		0		0.00%		0		0.00%	
		persentase pemanfaatan sistem informasi spasial aset daerah	%	100		0		100		0		0.00%		-		0.00%		
		persentase pemanfaatan sistem informasi di tingkat Desa/Kelurahan	%	100		0		100		0		0.00%		-		0.00%		
	Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				2,313,890,548		70,000,000		346,271,668		128,000,000		36.97%		198,000,000		8.56%	

		persentase lahan tanah aset daerah yang bersertifikat	%	100		30		70		35		50.00%		35.00		35.00%		
	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan				2,313,890,548		0		346,271,668		0		0.00%		0		0.00%	
		persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100		0		100		0		0.00%		-		0.00%		
		persentase penyelesaian izin lokasi	%	100		0		100		0		0.00%		-		0.00%		
5.	Urusan Lingkungan Hidup																	DLH
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				2,063,740,219		3,192,500,000		308,836,893		8,542,000,000		2765.86%		11,734,500,000		568.60%	
		Persentase sampah terangkut	%	50		61		33.96		61		179.64%		61.00		122.00%		
		Persentase penanganan sampah	%	100		83		90		83		92.22%		83.00		83.00%		

		rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	14		9.8		8		9.8		122.50 %		9.80		70.00%		
		persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik	%	80		41		50		41		82.00%		41.00		51.25%		
		persentase RT yang melakukan pemilahan sampah	%	70		24		30		24		80.00%		24.00		34.29%		
		Persentase bank sampah aktif	%	70		33		40		33		82.50%		33.00		47.14%		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				4,659,049,8 88		430,000,00 0		697,222,6 82		1,249,000,0 00		179.14 %		1,679,000,0 00		36.04 %	
		Persentase penanganan kasus pencemaran/kerus akan LH	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
		indeks kualitas air	skor	10		27		20		23		86.96%		23.00		43.48%		

		indeks kualitas udara	skor	95		56		85		56		65.88%		56.00		58.95%		
		indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	skor	70.15		66		64.15		66		102.88%		66.00		94.08%		
		persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi	%	60		2		30		2		6.67%		2.00		3.33%		
		persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL	%	65		15		35		20		57.14%		20.00		30.77%		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				4,533,974,723		380,000,000		678,505,295		293,000,000		43.18%		673,000,000		14.84%	
		Luasan kawasan konservasi	Ha	160		0		152	0	0		0.00%		-		0.00%		
		persentase luas lahan dan hutan kritis	%	10		20		40		20		50.00%		20.00		200.00%		
		persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan	%	22		20		30		20		66.67%		20.00		90.91%		
		persentase sumber air dalam kondisi baik	%	80		80		80		80		100.00%		80.00		100.00%		

		daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	skor	1		0.88		0.9		0.88		97.78%		0.88		88.00%		
		persentase tutupan vegetasi	%	75		65		75		65		86.86%		65.00		86.86%		
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				312,687,912		0		46,793,469		0		0.00%		0		0.00%	
		Persentase rehabilitasi SDA	%	60		25		48		25		52.08%		25.00		41.67%		
		persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	100		0		100		0		0.00%		-		0.00%		
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				187,612,747		56,000,000		28,076,081		54,000,000		192.33%		110,000,000		58.63%	
		Persentase validasi data dan informasi SLHD	%	90		100		83		100		120.48%		100.00		111.11%		
		Pemanfaatan data informasi lingkungan hidup	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		

		persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				125,075,165		40,000,000		18,717,387		45,000,000		240.42 %		85,000,000		67.96 %	
		Indeks kualitas LH	indeks	68.50		66		68.00		66		97.06%		66.00		96.35%		
		persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut				781,719,780		50,000,000		116,983,672		90,000,000		76.93%		140,000,000		17.91 %	
		Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha	11		6		7		6		85.71%		6.00		54.55%		
		Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi	%	80		40		50		40		80.00%		40.00		50.00%		
		Persentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif	%	60		30		30		30		100.00 %		30.00		50.00%		

	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				2,018,087,784		1,045,000,000		302,005,046		2,046,000,000		677.47%		3,091,000,000		153.16%	
		Rasio luasan RTH	Rasio	30		0.6		2		0.6		30.00%		0.60		2.00%		
		Persentase Luas RTH Perkotaan Publik	%	20		5		15		7		46.67%		7.00		35.00%		
	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan				938,063,736		0		140,380,406		0		0.00%				0.00%	
		Lokasi pengembangan ekowisata	Lokasi	8		6		5		6		120.00%		6.00		75.00%		
		persentase ODTW berbasis ecowisata dan jasa lingkungan	%	60		30		30		30		100.00%		30.00		50.00%		
		NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan	%	60		30		30		30		100.00%		30.00		50.00%		
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				312,687,912		0		46,793,469		0		0.00%		0		0.00%	

		Peran serta masyarakat dalam konservasi	pokmas	30		0		23		0		0.00%		-		0.00%		
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH	%	100		0		100		0		0.00%		-		0.00%		
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil																	Dindukcapil
	Program penataan Administrasi Kependudukan				13,505,509,979		847,652,000		2,021,087,587		2,676,658,500		132.44%		3,524,310,500		26.10%	
		Persentase penduduk ber KTP	%	100		98.4		100		98.4		98.40%		98.40		98.40%		
		rasio kepemilikan KTP elektronik	%	100		98.4		100		98.4		98.40%		98.40		98.40%		
		rasio kepemilikan akta kelahiran bayi (0-1 tahun)	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
		rasio kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk	%	96		20.09		90		20.09		22.32%		20.09		20.93%		

		rasio kepemilikan akta kematian	%	70		100		40		100		250.00 %		100.00		142.86 %		
		rasio kepemilikan kartu identitas anak (1-10 tahun)	%	80		0		40		0		0.00%		-		0.00%		
	Program pengembangan data dan informasi kependudukan				1,563,439,560		0		233,967,343		0		0.00%		0		0.00%	
		persentase pemanfaatan database dan profil penduduk dalam perumusan kebijakan	%	100		0		100		0		0.00%		-		0.00%		
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	Dinpermades
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat				2,564,040,878		765,000,000		383,706,443		948,000,000		247.06 %		1,713,000,000		66.81 %	
		Rata-rata Persentase kesesuaian Program RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah	%	100		90		65		90		138.46 %		90.00		90.00%		

		Rata-rata persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMdes	%	20		96		13		96		738.46 %		96.00		480.00 %		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat yang telah diberdayakan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	%	78		70		59		70		118.64 %		70.00		89.74%		
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah				2,564,040,8 78		0		383,706,4 43		67,000,000		17.46%		67,000,000		2.61%	
		persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	%	100		92		100		92		92.00%		92.00		92.00%		
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum				1,809,095,5 09		0		383,706,4 43		45,000,000		11.73%		45,000,000		2.49%	

		Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%	50.0 0		72		22.7 2		72		316.90 %		72.00		144.00 %		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa				3,242,188,8 39		1,255,000,0 00		577,541,8 46		379,000,00 0		65.62%		1,634,000,0 00		50.40 %	
		Persentase Desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawab an pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat				1,876,127,4 72		0		280,760,8 12		290,000,00 0		103.29 %		290,000,00 0		15.46 %	
		Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%	20		30		12		30		250.00 %		30.00		150.00 %		
		Persentase Penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%	60		9		30		9		30.00%		9.00		15.00%		

		Persentase Kader Pembangunan Masyarakat yang terlatih	%	90		96		75		96		128.00 %		96.00		106.67 %		
	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa				1,250,751,648		115,000,000		187,173,874		150,000,000		80.14%		265,000,000		21.19 %	
		Persentase desa yang membentuk BUMdes	%	28		15		15		15		100.00 %		15.00		53.57%		
		Persentase BUM Desa yang didampingi	%	100		91		95		91		95.79%		91.00		91.00%		
		Persentase BKAD yang didampingi	%	100		100		85		100		117.65 %		100.00		100.00 %		
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa				2,388,935,647		960,000,000		357,502,100		243,000,000		67.97%		1,203,000,000		50.36 %	
		persentase penduduk miskin yang dientaskan	%	40		13		20		13		65.00%		13.00		32.50%		
		persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	%	95		20		30		20		66.67%		20.00		21.05%		

	Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan				2,431,641,629		0		433,156,385		0		0.00%				0.00%	
		persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS	%	89		89		88.6		89		100.45%		89.00		100.00%		
	Program Penanggulangan kemiskinan				1,719,783,516		0		257,364,077		0		0.00%		0		0.00%	
		Persentase pelaksanaan regulasi TKPKD	%	90		65		70		65		92.86%		65.00		72.22%		
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																Dinsospkb	
	Program Keluarga Berencana			2	4,219,656,944		2,607,752,000		751,661,480		6,545,790,000		870.84%		9,153,542,000		216.93%	
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2				2.04				0.00%		-		0.00%		
		Cakupan peserta KB aktif	%	100				100				0.00%		-		0.00%		
		Rasio akseptor KB	%	840.69				837.06				0.00%		-		0.00%		

		Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2.25				3				0.00%		-		0.00%		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmen Need)	%	6.5				6.67				0.00%		-		0.00%		
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	%	30				33				0.00%		-		0.00%		
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	83.7				83.64				0.00%		-		0.00%		
		Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0.67				0.77				0.00%		-		0.00%		
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2				2.04				0.00%		-		0.00%		

	Program Pelayanan Kontrasepsi				3,746,751,355		0		667,421,240		224,000,000		33.56%		224,000,000		5.98%	
		Angka Drop ut KB	%	9				11.31				0.00%		-		0.00%		
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100				100				0.00%		-		0.00%		
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri				4,219,657,127		0		751,661,513		1,198,000,000		159.38%		1,198,000,000		28.39%	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100				100				0.00%		-		0.00%		
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD	%	100				100				0.00%		-		0.00%		

	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja				1,873,375,677		0		333,710,620		248,000,000		74.32%		248,000,000		13.24%	
		Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	%	100				100				0.00%		-		0.00%		
	Program Ketahanan Keluarga				2,185,604,957		0		389,329,057		93,000,000		23.89%		93,000,000		4.26%	
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	88.88				88				0.00%		-		0.00%		
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	79.84				79.02				0.00%		-		0.00%		
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	92.72				91.9				0.00%		-		0.00%		

	Program promosi kesehatan Ibu. bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita				2,185,604,957		0		389,329,057		27,000,000		6.94%		27,000,000		1.24%	
		Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB	%	93.72				92.9				0.00%		-		0.00%		
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD				2,497,834,237		0		444,947,493		27,000,000		6.07%		27,000,000		1.08%	
		Cakupan kelompok Bina keluarga balita (BKB) yang terintegrasi	%	80				65				0.00%		-		0.00%		
9.	Urusan Perhubungan																	Dinhub
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				1,438,364,395		142,500,000		215,249,956		165,000,000		76.66%		307,500,000		21.38%	
		Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	100		80		80		80		100.00%		80.00		80.00%		

	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				2,032,471,428		305,000,000		304,157,546		742,000,000		243.95%		1,047,000,000		51.51%	
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	0.9		0.9		0.9		0.9		100.00%		0.90		100.00%		
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan				469,031,868		310,000,000		70,190,203		104,000,000		148.17%		414,000,000		88.27%	
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	%	350		420		400		420		105.00%		420.00		120.00%		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				218,881,538		0		32,755,428		90,000,000		274.76%		90,000,000		41.12%	
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	84		76		78		76		97.44%		76.00		90.48%		

	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				4,054,499,079		600,000,000		606,752,190		970,000,000		159.87%		1,570,000,000		38.72%	
		Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	94		76		80		76		95.00%		76.00		80.85%		
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				62,537,582		15,000,000		9,358,694		27,000,000		288.50%		42,000,000		67.16%	
		Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji	%	100		98		100		98		98.00%		98.00		98.00%		
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas				2,188,815,384		330,000,000		327,554,280		490,000,000		149.59%		820,000,000		37.46%	
		Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan	%	0.98		96		0.97		96		9896.91%		96.00		9795.92%		
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran				1,751,052,307		270,000,000		262,043,424		205,000,000		78.23%		475,000,000		27.13%	

		Persentase rambu - rambu laut yang terpasang dalam kondisi baik	%	100		80		90		80		88.89%	#DIV/0!	80.00		80.00%		
		Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik	%	100		90		100		90		90.00%		90.00		90.00%		
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika																	Dinkominfo
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa				2,657,847,252		365,000,000		397,744,483		205,000,000		51.54%		570,000,000		21.45%	
		Persentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab. go.id	%	100		100		94		100		106.38%		100.00		100.00%		
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	%	80		60		65		60		92.31%		60.00		75.00%		
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		

		Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	%	100		100		90		100		111.11 %		100.00		100.00 %		
		Persentase PD telah memiliki website (%)	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	%	50		88		30		88		293.33 %		88.00		176.00 %		
	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi				625,375,824		95,000,000		93,586,937		110,000,000		117.54 %		205,000,000		32.78 %	
		Cakupan pengawasan menara BTS	niai	185		100		160		100		62.50%		100.00		54.05%		
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi				1,414,437,165		0		300,000,000		345,000,000		115.00 %		345,000,000		24.39 %	
		Presentase Layanan Publik berbasis TIK	%	80		78		60		78		130.00 %		78.00		97.50%		

		persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	%	100		100		60		100		166.67 %		100.00		100.00 %		
		persentase interkoneksi internet dan jaringan intranet kabupaten, kecamatan, desa dan perangkat daerah	%	65		27		50		27		54.00%	#DIV/0!	27.00		41.54%		
		persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	%	100		50		100		50		50.00%		50.00		50.00%		
	Program kerjasama informasi dan media massa				1,178,697,637		0		250,000,000		47,700,000		19.08%		47,700,000		4.05%	
		Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan	%	45		100		37		100		270.27 %		100.00		222.22 %		
		persentase expo skala nasional yang diikuti dalam satu tahun	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		

	Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi				1,650,176,692		0		350,000,000		72,000,000		20.57%		72,000,000		4.36%	
		persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi TIK	%	55		0		40		0		0.00%		-		0.00%		
11.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	Dinindagkopuk m
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi				562,838,241		40,000,000		84,228,244		5,000,000		5.94%		45,000,000		8.00%	
		Persentase KSP / USP sehat	%	53				42				0.00%		-		0.00%		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				1,500,901,977		130,000,000		224,608,649		214,500,000		95.50%		344,500,000		22.95%	
		Persentase koperasi aktif	%	94		90		92		90		97.85%		90.02		95.77%		
		Persentase koperasi dalam kondisi sehat	%	45		37		39		37		94.87%		37.00		82.22%		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				625,375,824		75,000,000		93,586,937		36,000,000		38.47%		111,000,000		17.75%	

		Persentase UMKM yang mengikuti pameran / promosi	%	10		5		8				0.00%		-		0.00%		
		persentase aksesibilitas UMKM	%	100		50		70		55		78.57%		55.00		55.00%		
	Program Fasilitas Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha				525,375,82 ₄		0		93,586,93 ₇		10,000,000		10.69%		10,000,000		1.90%	
		Persentase peningkatan penyaluran Modal LKM koperasi dan UKM	%	30		10		20		10		50.00%		10.00		33.33%		
	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				687,913,40 ₆		150,000,00 ₀		102,945,6 ₃₁		63,000,000		61.20%		213,000,00 ₀		30.96 %	
		Persentase UMKM kreatif	%	10		5.0		7.0		5.0		71.43%		5.00		50.00%		
		Persentase peningkatan skala usaha UMKM	%	10		2		8		5		62.50%		5.00		50.00%		
		Prosentase pertumbuhan Usaha Mikro dan kecil terhadap total UKM	%	5		1		5		2		40.00%		2.00		40.00%		
		Produktivitas UMKM	%	15		10		12		10		83.33%		10.00		66.67%		

		Persentase pertumbuhan koperasi terhadap total UKM	%	2		1		2		1		50.00%		1.00		50.00%		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah				2,438,965,713		230,000,000		364,989,055		21,000,000		5.75%		251,000,000		10.29%	
		Rasio UMKM dengan peningkatan skala usaha	%	≥ 5				≥ 5				#VALUE!		-		#VALUE!		
	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru				312,687,912		100,000,000		46,793,469		200,000,000		427.41%		300,000,000		95.94%	
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	87				38.23				0.00%		-		0.00%		
1 2.	Urusan Penanaman Modal																	Dinpmptspnaker
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				1,282,020,439		205,000,000		191,853,221		202,000,000		105.29%		407,000,000		31.75%	
		Persentase prospektus investasi yang mendapat LOI	%	60				45				0.00%		-		0.00%		

		Proporsi investor sektor prioritas terhadap keseluruhan sektor	%	80			80				0.00%		-		0.00%		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				687,913,406		80,000,000		102,945,631		179,000,000		173.88%		259,000,000		37.65%
		Peningkatan Nilai investasi	Rp.trilyun	5		5.81		4.261		6		136.36%		5.81		116.20%	
		Proporsi investor PMDN terhadap total investasi	%	50				35				0.00%		-		0.00%	
		Persentase komplain terhadap Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang ditangani	%	100				100				0.00%		-		0.00%	
		Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	%	100				80				0.00%		-		0.00%	
		Persentase PMA/PMDN diKabupatenRembang yang taat aturan	%	100				85				0.00%		-		0.00%	

	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal				1,807,336,131		230,000,000		270,466,249		160,000,000		59.16%		390,000,000		21.58%	
		Persentase tindak lanjut pengaduan	%	100				80				0.00%		-		0.00%		
		persentase Pengembangan SIPM	%	100				100				0.00%		-		0.00%		
		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti/ditangani	%	100				100				0.00%		-		0.00%		
	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal				1,222,109,435		40,000,000		182,887,593		0		0.00%		40,000,000		3.27%	
		Persentase penanaman modal sesuai perijinan	%	100				80				0.00%		-		0.00%		
		persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja lokal > 50%	%	100				50				0.00%		-		0.00%		

		persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP	%	100				100				0.00%		-		0.00%	
	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan				1,026,689,435		195,000,000		182,887,593		27,000,000		14.76%		222,000,000		21.62%
		Persentase pelayanan perijinan melalui SIPISE	%	50				20				0.00%		-		0.00%	
		Persentase pelaksanaan SOP perijinan	%	80				67				0.00%		-		0.00%	
13.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga																Dindikpora
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				812,988,571				121,663,018		772,700,000		635.11%		772,700,000		95.04%
		jumlah kebijakan berkaitan dengan kepemudaan	Dok	4				2				0.00%		-		0.00%	
		Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	22				19				0.00%		-		0.00%	
		Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri	Orang	24				24				0.00%		-		0.00%	

		persentase organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam bentuk pelatihan manajemen	%	70				40				0.00%		-		0.00%		
		persentase tindaklanjut dari dokumen rencana aksi pemuda daerah	%	80				40				0.00%		-		0.00%		
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				312,687,912				46,793,469		15,000,000		32.06%		15,000,000		4.80%	
		Jumlah pengurus cabor yang terlatih	Pengurus	60				40				0.00%		-		0.00%		
		persentase tenaga pelatih bersertifikat	%	100				90				0.00%		-		0.00%		
		persentase kepengurusan organisasi cabor yang terdaftar	%	100				80				0.00%		-		0.00%		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				5,784,726,371				865,679,169		912,000,000		105.35%		912,000,000		15.77%	
		persentase atlet peraih medali di event tingkat Karesidenan	%	170				155				0.00%		-		0.00%		

		persentase atlet peraih medali di event tingkat provinsi	%	60				45				0.00%		-		0.00%		
		persentase atlet peraih medali di event tingkat nasional	%	10				7				0.00%		-		0.00%		
		Persentase komunitas olahraga yang aktif	%	100				85				0.00%		-		0.00%		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				3,126,879,119			467,934,686		180,000,000		38.47%		180,000,000		5.76%		
		rasio gelanggang olah raga per 1000 penduduk	%	1,86				1,83				#VALUE !		-		#VALUE !		
		rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	%	0,0029				0,0026				#VALUE !		-		#VALUE !		
14.	Urusan Statistik																	Dinkominfo
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				3,126,879,119		85,000,000	467,934,686		195,000,000		41.67%		280,000,000		8.95%		

		Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100		90		92		90		97.83%		90.00		90.00%		
		persentase publikasi dokumen Rembang Dalam Angka yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		persentase publikasi dokumen NTP yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		persentase publikasi dokumen PDRB sektoral tingkat kecamatan yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		persentase publikasi dokumen statistik kemiskinan, kependudukan, pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
												#DIV/0!	#DIV/0!	-		#DIV/0!		

1 5.	Urusan Persandian																	Dinkominfo
	Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah				3,155,242,2 89				472,179,2 09		20,000,000		4.24%		20,000,000		0.63%	
		persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
1 6.	Urusan Kebudayaan																	Dinbudpar
	Program pengembangan nilai budaya				1,248,917,1 18		750,000,00 0		222,473,7 47		166,000,00 0		74.62%		916,000,00 0		73.34 %	
		persentase pengelolaan nilai- nilai budaya tradisi dalam masyarakat	%	70		65		70		65		92.86%		65.00		92.86%		
	Program pengelolaan kekayaan budaya				1,248,917,1 18		0		222,473,7 47				0.00%		0		0.00%	

		persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	%	70		30		40		30		75.00%		30.00		42.86%		
	Program pengelolaan keragaman budaya				936,687,839		0		166,855,310		554,000,000		332.02%		554,000,000		59.14%	
		persentase pengelolaan keragaman budaya secara profesional	%	40		20		25		20		80.00%		20.00		50.00%		
	Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya				936,687,839		0		166,855,310		70,000,000		41.95%		70,000,000		7.47%	
		persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya yang tertangani	%	60		20		40		20		50.00%		20.00		33.33%		
		Persentase cagar budaya yang direvitalisasi	%	9		5		7		5		71.43%		5.00		55.56%		
		Jumlah pemanfaatan cagar budaya	Jumlah	5		2		3		2		66.67%		2.00		40.00%		
	Program Pembinaan Kesenian Masyarakat				936,687,839		0		166,855,310		191,000,000		114.47%		191,000,000		20.39%	

		Perkembangan kelompok kesenian tradisional	Kelompok	411		300		350		300		85.71%		300.00		72.99%		
	Program Pembinaan Sejarah Lokal				936,687,839		0		166,855,310		100,000,000		59.93%		100,000,000		10.68%	
		Dokumentasi sejarah lokal	Dok	7		4		5		4		80.00%		4.00		57.14%		
	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa				281,419,121		45,000,000		42,114,122		40,000,000		94.98%		85,000,000		30.20%	
		Cakupan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan	Organisasi	13		6		9		6		66.67%		6.00		46.15%		
17.	Urusan Perpustakaan																	Dinarpus
	Program pengembangan budaya baca				1,248,917,118		1,000,000,000		222,473,747		353,000,000		158.67%		1,353,000,000		108.33%	
		persentase minat baca masyarakat	%	70		64		64		64		100.00%		64.00		91.43%		
	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan				1,636,081,425		0		291,440,608		215,000,000		73.77%		215,000,000		13.14%	

		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	70		40		40		40		100.00 %		40.00		57.14%		
		Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik	%	98		95		95		95		100.00 %		95.00		96.94%		
		Cakupan naskah kuno yang dilestarikan	rasio	350		295		295		295		100.00 %		295.00		84.29%		
18.	Urusan Kearsipan																	Dinarpus
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				2,188,815,384		630,000,000		327,554,280		210,000,000		64.11%		840,000,000		38.38 %	
		Persentase arsip yang dialihmediakan	%	50		30		30		30		100.00 %		30.00		60.00%		
		Persentase arsip yang dimusnahkan	%	100		50		50		50		100.00 %		50.00		50.00%		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan				1,248,917,118		35,000,000		222,473,747		161,000,000		72.37%		196,000,000		15.69 %	
		Persentase Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku	%	90		65		65		65		100.00 %		65.00		72.22%		

[illegible]

	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				3,939,867,690		355,000,000		589,597,705		1,381,000,000		234.23%		1,736,000,000		44.06%	
		Peningkatan Produksi ikan	ton	27,200		6,318		11,700		6,318		54.00%	#DIV/0!	6,318.00		23.23%		
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya ikan skala skala kecil	%	10		4		6		4		66.67%		4.00		40.00%		
		Produktivitas perikanan budidaya	ton/ha									#DIV/0!		-		#DIV/0!		
		-udang vaname		30		1.3		24		1.3		5.42%		1.30		4.33%		
		-bandeng		38		0.6		30		0.6		2.00%		0.60		1.58%		
		Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya ikan	%	36		33		34		33		97.06%		33.00		91.67%		
		Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan	%	46		43		44		43		97.73%		43.00		93.48%		
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan				375,225,494		0		56,152,162		70,000,000		124.66%		70,000,000		18.66%	

		persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna yang direkomendasikan	%	60		20		30		20		66.67%		20.00		33.33%		
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan				625,375,82 ₄		1,011,877,6 ₄₂				50,000,000				1,061,877,6 ₄₂		169.80%	
		persentase peningkatan konsumsi ikan	%	10		10		10		10		100.00%		10.00		100.00%		
		persentase peningkatan produk perikanan yang bersertifikat	%	10		10		10		10		100.00%		10.00		100.00%		
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar				1,561,146,3 ₉₈		0		278,092,1 ₈₃		45,000,000		16.18%		45,000,000		2.88%	
		persentase terkelolanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar secara berkelanjutan	%	100		50		60		50		83.33%		50.00		50.00%		
	Program pengembangan nelayan kecil				1,873,375,6 ₇₇		0		333,710,6 ₂₀		450,000,00 ₀		134.85%		450,000,00 ₀		24.02%	

		persentase peningkatan pendapatan nelayan kecil	%	10		10		10		10		100.00 %		10.00		100.00 %		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha				1,248,917,118		0		222,473,747		190,000,000		85.40%		190,000,000		15.21 %	
		Usaha produktif keluarga nelayan	Unit	2,939		2,740		2,853		2,740		96.04%		2,740.00		93.23%		
		Persentase rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan	%	30		15		23		15		65.22%		15.00		50.00%		
	Program pengelolaan TPI terpadu				936,687,839		16,234,000,000		166,855,310		22,630,000,000		13562.65%		38,864,000,000		4149.09%	
		Nilai raman	Rp.Milyar	504,05		410.814		0		410.814		#DIV/0!		410.81		#VALUE!		
2.	Urusan Pariwisata																	Dinbudpar
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				10,787,732,962		755,000,000		1,614,374,667		747,000,000		46.27%		1,502,000,000		13.92 %	
		persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	45		30		30		30		100.00 %		30.00		66.67%		

		persentase peningkatan jumlah ODTW yang dipromosikan	%	50		50		50		50		100.00 %		50.00		100.00 %		
		Rata-rata lama menginap	hari	2		1.2		1.4		1.2		85.71%		1.20		60.00%		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				29,828,050,371		4,320,000,000		4,463,741,275		2,066,000,000		46.28%		6,386,000,000		21.41 %	
		Kawasan DTW strategis	DTW	10		8		8		8		100.00 %		8.00		80.00%		
		persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	50		10		20		10		50.00%		10.00		20.00%		
		Persentase pramuwisata bersertifikat	%	33		2		25		2		8.00%		2.00		6.06%		
		persentase pengelola Tourist Information Center bersertifikat	%	28		5		13		7		53.85%		7.00		25.00%		
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata				2,720,384,834		150,000,000		407,103,177		231,000,000		56.74%		381,000,000		14.01 %	

		Peningkatan SDM pariwisata	pokdarwis	19		13		14		13		92.86%		13.00		68.42%	
		persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100		85		100		85		85.00%		85.00		85.00%	
	Program pengembangan ekonomi kreatif				1,414,437,165		0		300,000,000		100,000,000		33.33%		100,000,000		7.07%
		Penyediaan ruang kreatif	Ruang	6		3		4		3		75.00%		3.00		50.00%	
		persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	%	90		50		60		50		83.33%		50.00		55.56%	
3.	Urusan Pertanian																Dintanpan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				3,039,326,504		634,000,000		454,832,515		1,267,000,000		278.56%		1,901,000,000		62.55%
		Peningkatan kelas pelaku utama	poktan	70		48.28		50		48.28		96.56%		48.28		68.97%	
		cakupan pembinaan kelompok petani	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%	

		persentase kelompok tani yang mendapatkan insentif pertanian	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				25,859,290,318		1,050,000,000		3,869,819,854		5,072,000,000		131.07 %		6,122,000,000		23.67 %	
		Persentase peningkatan jumlah UPJA	%	10		7.14		9.00		7.14		79.33%		7.14		71.40%		
		Prosentase peningkata kelas UPJA	%	5		4.76		4.00		4.76		119.00 %		4.76		95.20%		
	Program Peningkatan Produksi Pertanian				12,266,621,710		600,000,000		1,835,689,056		947,000,000		51.59%		1,547,000,000		12.61 %	
		Peningkatan Produktivitas tanaman padi	ton/ha	6.43		4.79		6.28		4.79		76.27%		4.79		74.49%		
		Peningkatan Produktivitas tanaman jagung	ton/ha	4.88		4.89		4.60		4.89		106.30 %		4.89		100.20 %		
		Peningkatan Produktivitas tanaman kedelai	ton/ha	1.03		1.4		1.00		1.4		140.00 %		1.40		135.92 %		
		Peningkatan Produktivitas tanaman cabe	ton/ha	6.64		3.79		6.32		3.79		59.97%		3.79		57.08%		

		Peningkatan Produktivitas tanaman bawang merah	ton/ha	8.34		6.34		8.09		6.34		78.37%		6.34		76.02%		
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan				8,177,745,000		1,565,000,000		1,223,792,000		247,000,000		20.18%		1,812,000,000		22.16%	
		Peningkatan Produktivitas tanaman kelapa	ton/ha	0.92		0.92		0.80		0.92		115.00%		0.92		100.00%		
		Peningkatan Produktivitas tanaman tebu	ton/ha	4.80		4.79		4.50		4.79		106.44%		4.79		99.79%		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				10,631,389,006		915,000,000		1,590,977,933		1,790,000,000		112.51%		2,705,000,000		25.44%	
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	indeks	1.07		0.99		1.06		0.99		93.40%		0.99		92.52%		
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Unggas	indeks	1.06		1.09		1.05		1.09		103.81%		1.09		102.83%		
	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan				6,316,295,821		375,000,000		945,228,066		383,500,000		40.57%		758,500,000		12.01%	
		Indeks efektivitas inseminasi buatan (Service per conception)	indeks	1.50		1.98		1.54		1.98		128.57%		1.98		132.00%		

		Prosentase penurunan angka kesakitan ternak	%	50.00	8.62		58.00	8.62		14.86%	8.62		17.24%			
	Program Pengembangan Agribisnis				10,343,823,000		1,295,000,000	1,651,070,000	1,547,000,000	93.70%		2,842,000,000	27.48%			
		Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian	indeks	1.20	1.13		1.17	1.13	96.58%	1.13		94.17%				
	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian				23,866,049,570		9,104,000,000	3,893,290,567	23,894,500,000	613.74%		32,998,500,000	138.27%			
		Indeks pertanaman lahan sawah	indeks	1.50	1.21		1.38	1.21	87.68%	1.21		80.67%				
		Prosentase jalan pertanian dalam kondisi baik	%	80.00	50.39		65.00	50.39	77.52%	50.39		62.99%				
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)				14,602,525,488		7,050,000,000	2,185,254,984	0	0.00%		7,050,000,000	48.28%			
		Peningkatan Produktivitas tanaman tembakau	ton/ha	1.10	1.65		0.95	1.65	173.68%	1.65		150.00%				
4	Urusan Perdagangan															Dinindagkopuk m
	Program Peningkatan Kemetrolagian dan perlindungan Konsumen				1,031,870,109		60,000,000	154,418,446	810,500,000	524.87%		870,500,000	84.36%			

		persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	%	100		67		70		67		95.71%		67.00		67.00%		
		persentase produk yang tidak layak dikonsumsi	%	1		1		1		1		100.00 %		1.00		100.00 %		
		Persentase cakupan sidang tera ulang	%	90		77		82		77		93.90%		77.00		85.56%		
		Persentase pasar/toko tertib tera	%	80		50		75		50		66.67%		50.00		62.50%		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				281,419,121		30,000,000		42,114,122		27,000,000		64.11%		57,000,000		20.25 %	
		Persentase peningkatan ekspor	%	66		12		23		12		52.17%		12.00		18.18%		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				15,034,489,761		435,000,000		2,249,898,054		18,819,825,000		836.47 %		19,254,825,000		128.07 %	
		Persentase kelengkapan jenis data dan informasi perdagangan	%	90		70		75		70		93.33%		70.00		77.78%		

		persentase pelaku usaha yang berijin	%	100		54		100		54		54.00%		54.00		54.00%		
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				187,612,747		15,000,000		28,076,081		15,000,000		53.43%		30,000,000		15.99%	
		persentase PKL dan asongan yang menempati lokasi sesuai peruntukan	%	100		1		100		1		1.00%		1.00		1.00%		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi				66,032,807,869		13,473,769,000		9,881,751,115		1,677,400,000		16.97%		15,151,169,000		22.94%	
		Persentase cakupan wilayah layanan perdagangan	%	90		80		83		80		96.39%		80.00		88.89%		
		persentase pasar kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
	Program Pengembangan Sistem Distribusi				1,876,127,472		0		280,760,812		180,000,000		64.11%		180,000,000		9.59%	

		Persentase pelaksanaan pengembangan sistem distribusi	%	50		20		30		20		66.67%		20.00		40.00%		
	Program Pembinaan Pedagang				22,675,939,761		250,000,000		3,393,434,268		246,125,000		7.25%		496,125,000		2.19%	
		Persentase peningkatan peran serta pedagang	%	50		25		30		25		83.33%		25.00		50.00%		
	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan				93,806,374		50,000,000		14,038,041		25,000,000		178.09%		75,000,000		79.95%	
		Jumlah kemitraan usaha perdagangan	Jumlah	10		6		8		6		75.00%		6.00		60.00%		
		Kontribusi Sektor Perdagangan	rasio	30		13.5		30		13.5		45.00%		13.50		45.00%		
	Program Promosi Produk Unggulan Daerah				2,970,535,163		1,100,000,000		444,537,952		422,375,000		95.01%		1,522,375,000		51.25%	
		Persentase peningkatan omzet produk unggulan	%	50		30		35		30		85.71%		30.00		60.00%		

		persentase keikutsertaan event promosi produk unggulan daerah tingkat nasional	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting				936,687,839		0		166,855,310		20,000,000		11.99%		20,000,000		2.14%	
		Persentase kecukupan stok barang	%	90		70		75		70		93.33%		70.00		77.78%		
5	Urusan Perindustrian																	Dinindagkopuk m
	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				1,563,439,560		175,000,000		233,967,343		47,000,000		20.09%		222,000,000		14.20 %	
		Rasio produksi dan kapasitas terpasang	Rasio	0,95		0		0,92		0		#VALUE !		-		#VALUE !		
		persentase industri yang menerapkan standarisasi dalam tahun berkenaan	%	60		10		30		10		33.33%		10.00		16.67%		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				1,876,127,472		290,000,000		280,760,812		109,275,000		38.92%		399,275,000		21.28 %	

		Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	3.00		2.7		1.75		2.7		154.29 %		2.70		90.00%		
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				312,687,912		50,000,000		46,793,469		150,000,000		320.56 %		200,000,000		63.96 %	
		Persentase penerapan teknologi industri	%	80		55		60		55		91.67%		55.00		68.75%		
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial				625,375,824		100,000,000		93,586,937		129,000,000		137.84 %		229,000,000		36.62 %	
		Pertumbuhan sentra industri	Sentra	50		30		30		30		100.00 %		30.00		60.00%		
		persentase peningkatan sentra industri potensial yang dikukuhkan	%	20		20		20		20		100.00 %		20.00		100.00 %		
	Program Penataan Struktur Industri				312,687,912		25,000,000		46,793,469		25,000,000		53.43%		50,000,000		15.99 %	
		Pertumbuhan klaster industri	klaster	8		9		6		9		150.00 %		9.00		112.50 %		

		persentase peningkatan klaster industri berbasis komoditas unggulan	%	15		0		15		0		0.00%		-		0.00%		
	Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif				1,094,407,692		75,000,000		163,777,140		229,000,000		139.82%				0.00%	
		Persentase IKM memperoleh HAKI	%	1.00		0.12		0.60		0.12		20.00%		0.12		12.00%		
	Pembinaan Lingkungan Sosial				1,876,127,472		430,000,000		280,760,812		100,000,000		35.62%				0.00%	
		Pertumbuhan pelaku industri	orang	200		80		185		80		43.24%		80.00		40.00%		
	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah				1,561,146,398		0		278,092,183		250,000,000		89.90%		250,000,000		16.01%	
		persentase produk unggulan daerah yang terdaftar	%	100		0		100		0		0.00%		-		0.00%		
	Pembinaan Industri				312,687,912		50,000,000		46,793,469		43,000,000		91.89%				0.00%	

		Presentase produk unggulan memenuhi SNI	%	25		1		15		1		6.67%		1.00		4.00%	
6	Urusan Transmigrasi																Setda
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				950,571,252				142,252,145				0.00%		0		0.00%
		persentase peningkatan transmigran swakarsa dan umum	%			5		10		5		50.00%		5.00		#DIV/0!	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
1	Sekretariat Daerah																Setda
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				938,063,736		1,192,212,061		140,380,406		2,314,000,000		1648.38%		3,506,212,061		373.77%
		Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%	

	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				6,163,078,744		1,340,000,000		922,299,266		876,000,000		94.98%		2,216,000,000		35.96%	
		Persentase regulasi daerah yang dilakukan evaluasi	%	36		0		32		0		0.00%		-		0.00%		
		Persentase rancangan produk hukum yang ditetapkan	%	80		100		66		100		151.52%		100.00		125.00%		
		Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan				1,438,364,395		240,000,000		215,249,956		126,000,000		58.54%		366,000,000		25.45%	
		Persentase PD yang dievaluasi serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja	%	90		60		70		60		85.71%		60.00		66.67%		

		Persentase peningkatan SOP dan SPP	%	80		55		60		55		91.67%		55.00		68.75%		
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	%	100		84.55		100		84.55		84.55%		84.55		84.55%		
	Program pengembangan kualitas kebijakan publik				2,185,604,957		0		389,329,057		60,000,000		15.41%		60,000,000		2.75%	
		Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	%	60		25		30		25		83.33%		25.00		41.67%		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik				1,344,558,021		80,000,000		201,211,915		0		0.00%		80,000,000		5.95%	
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	%	100		80		90		80		88.89%		80.00		80.00%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	93		76.86		90		76.86		85.40%		76.86		82.65%		

		Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat				948,672,035		475,000,000		201,211,915		344,000,000		170.96 %		819,000,000		86.33 %	
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100		100		90		100		111.11 %		100.00		100.00 %		
	Program Kerjasama Pembangunan				2,185,604,957		75,000,000				129,000,000				204,000,000		9.33%	
		Persentase kerjasama yang aktif	%	95		100		95		100		105.26 %		100.00		105.26 %		
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				2,185,604,957		0		389,329,057		0		0.00%		0		0.00%	
		Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		

	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur				2,185,604,957		0		389,329,057		75,000,000		19.26%		75,000,000		3.43%	
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	%	3,7%		0		2.1		0		0.00%		-		#VALUE!		
2	Kepegawaian daerah																BKD	
	Program Pendidikan Kedinasan				4,191,400,101		582,975,000		627,239,307		210,000,000		33.48%		792,975,000		18.92%	
		Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	%	85		100		70		100		142.86%		100.00		117.65%		
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah				11,393,246,850		750,000,000		1,704,989,283		1,159,047,000		67.98%		1,909,047,000		16.76%	
		Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	25		14		16		14		87.50%		14.00		56.00%		
		Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	%	75		55		60		55		91.67%		55.00		73.33%		

	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				20,078,316, 202		3,691,025,0 00		3,004,702, 207		2,060,953,0 00		68.59%		5,751,978,0 00		28.65 %	
		Persentase ASN yang mengikuti kegiatan assessment	%	65		54		57		54		94.74%		54.00		83.08%		
		Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi	%	98		92		94		92		97.87%		92.00		93.88%		
		Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	%	100		92		94		92		97.87%		92.00		92.00%		
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
3	Sekretariat DPRD																	Set DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				94,748,577, 307		19,118,848, 000		14,179,04 0,535		21,392,786, 000		150.88 %		40,511,634, 000		42.76 %	

		persentase raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi perda	%	90		100		90		100		111.11 %		100.00		111.11 %		
4	Pengawasan																	Inspektorat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				25,462,301,745		5,014,110,000		3,810,410,866		4,121,000,000		108.15 %		9,135,110,000		35.88 %	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai ditindaklanjuti	%	85		50.13		85		50.13		58.98%		50.13		58.98%		
		persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	%	100		18.75		80		18.75		23.44%		18.75		18.75%		
		persentase OPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi yang bersih dan melayani)	%	80		50		60		50		83.33%		50.00		62.50%		

		persentase penanganan laporan gratifikasi	%	100		-		100		-		#VALUE !		-		#VALUE !		
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				939,126,875		5,014,110,000		140,539,504		113,000,000		80.40%		5,127,110,000		545.94%	
		Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi	%	100		0		86		0		0.00%		-		0.00%		
		persentase jumla tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/bimtek/sertifikasi JFA/IB/TB	%	100		100		100		100		100.00%		100.00		100.00%		
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				1,858,929,637		159,575,000		278,187,171		149,000,000		53.56%		308,575,000		16.60%	

		Persentase perangkat daerah yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI)	%	17,9 4		-		11		-		#VALUE !		-		#VALUE !		
		Level kapabilitas Inspektorat	level	12		2		2		2		100.00 %		2.00		16.67%		
5	Keuangan Daerah																	DPPKAD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4,371,209,9 14		138,000,00 0		778,658,1 13		59,000,000		7.58%		197,000,00 0		4.51%	
		opini BPK	nilai	WTP		WDP		WTP		WDP				WDP		#VALUE !		
		Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100		100		100		100		100.00 %		100.0 0		100.00 %		
		predikat SAKIP	nilai	B		CC		B		CC				CC				
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				66,918,183, 691		8,702,967,0 00		10,014,24 6,821		5,549,400,0 00		55.42%		14,252,367, 000		21.30 %	

		Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dgn standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu	%	100		75		85		75		88.24%		75.00		75.00%		
		persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2003	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		persentase ketepatan waktu penyampaian laparan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	%	100		100		100		100		100.00 %		100.00		100.00 %		
		persentase OPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu	%	100		80		100		80		80.00%		80.00		80.00%		
		persentase Akuntabilitas pelaporan aset daerah	%	100		90		100		90		90.00%		90.00		90.00%		

	Program pengelolaan Pendapatan Daerah				6,244,585,591		0		1,112,368,733		5,177,250,000		465.43%		5,177,250,000		82.91%	
		persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	%	5		5		5		5		100.00%		5.00		100.00%		
6	Perencanaan Pembangunan				40,242,934,267				6,022,319,410				0.00%				0.00%	Bappeda
	Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan				3,126,879,119		200,000,000		467,934,686		200,000,000		42.74%		400,000,000		12.79%	
		Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu	%	100		100		75		100		133.33%		100.00		100.00%		
	Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek				2,814,191,207		275,000,000		421,141,218				0.00%		275,000,000		9.77%	
		persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi	%	80		65		65		65		100.00%		65.00		81.25%		
	Program Perencanaan pembangunan daerah				12,219,843,599		1,655,000,000		1,828,688,753		1,467,000,000		80.22%		3,122,000,000		25.55%	

		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	100		117		85		117		137.65 %		117.00		117.00 %		
		persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipatif dan akuntabel	%	90		60		82		60		73.17%		60.00		66.67%		
	Program Perencanaan pembangunan ekonomi				3,595,910,987		400,000,000		538,124,889		216,000,000		40.14%		616,000,000		17.13 %	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	90		90		82		90		109.76 %		90.00		100.00 %		
	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya				3,908,598,899		1,655,000,000		584,918,358		375,000,000		64.11%		2,030,000,000		51.94 %	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud	%	0.9		80		82		80		97.56%		80.00		8888.89 %		

	Program Kerjasama Pembangunan				5,003,006,591		1,655,000,000		748,695,498		337,000,000		45.01%		1,992,000,000		39.82%	
		Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan	%	60		40		45		40		88.89%		40.00		66.67%		
		persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100		100		86		100		116.28%		100.00		100.00%		
	Program Pengembangan wilayah perbatasan				2,185,604,957		0		389,329,057				0.00%		0		0.00%	
		persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan	%	0.85		100		65		100		153.85%		100.00		11764.71%		
	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				375,225,494		0		56,152,162				0.00%		0		0.00%	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	85		100		77		100		129.87%		100.00		117.65%		

	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				3,439,567,0 31		710,000,00 0		514,728,1 55		252,000,00 0		48.96%		962,000,00 0		27.97 %	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA	%	0.9		100		82		100		121.95 %		100.0 0		11111. 11%		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana				1,561,146,3 98		0		278,092,1 83				0.00%		0		0.00%	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana	%			100		75		100		133.33 %		100.0 0		#DIV/0!		
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				375,225,49 4		0		56,152,16 2				0.00%		0		0.00%	
		persentase aparatur perencana bersertifikat kompetensi	%	0.95	0	60		87		60		68.97%		60.00		6315.7 9%		
	Program Perencanaan Tata Ruang				2,497,834,2 37		0		444,947,4 93				0.00%		0		0.00%	

		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang	%	100	0	100		87		100		114.94 %		100.00		100.00 %		
	Program Pemanfaatan Ruang				1,873,375,677		0		333,710,620			0.00%		0		0.00%		
		persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaan tata ruang	%	100	0	100		87		100		114.94 %		100.00		100.00 %		
	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang				5,384,485,844		390,000,000		805,783,530		67,000,000	8.31%		457,000,000		8.49%		
		persentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang	%	100	0	100		87		100		114.94 %		100.00		100.00 %		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				3,434,522,075		0		611,802,803			0.00%		0		0.00%		

		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	%	100	0	100		87		100		114.94 %		100.00		100.00 %		
	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan				1,561,146,398		0		278,092,183		201,000,000		72.28%		201,000,000		12.88 %	
		Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.	%	75		60		65		60		92.31%		60.00		80.00%		
		Persentase tindak lanjut hasil moneyv	%	100	0	83		87		83		95.40%		83.00		83.00%		

Sumber: data diolah 2018

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan celah harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan tersebut terutama berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah serta permasalahan yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan Priorita Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Prioritas permasalahan daerah dirumuskan dengan mencermati permasalahan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD serta prioritas lain dari kebijakan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah yang bersifat wajib. Dengan menelaah kembali evaluasi terhadap hasil capaian indikator kinerja terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD, maka pada tahun 2019 sejumlah permasalahan prioritas daerah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut.

a. Penurunan Angka Kemiskinan

Sebagai salah satu agenda MDGs, upaya pengentasan angka kemiskinan telah secara simultan dijalankan melalui berbagai kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan. Namun demikian apabila dicermati lebih jauh, secara empiris laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang masih mengalami kelambanan. Kondisi ini dapat dicermati melalui tingkat penurunan persentase kemiskinan yang rata-rata hanya berkisar 1 persen per tahun. Perbaikan perekonomian dirasakan belum banyak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Kelambanan proses penurunan persentase kemiskinan ini merupakan salah satu bentuk indikasi terbelenggunya kehidupan penduduk miskin yang berada pada keadaan kemiskinan kronis (*chronic poverty*). Penduduk miskin kronis terjadi pada kondisi dimana tingkat pengeluaran konsumsi

penduduk jauh dibawah garis kemiskinan, yang umumnya disebabkan tidak mempunyai cukup akses terhadap sumberdaya ekonomi. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kemiskinan mendatang harus lebih cermatmenitik beratkan kebijakanyang berdampak langsung bagi pengentasan kemiskinan struktural, dengan tujuan meningkatkan akses yang lebih besar pada sumberdaya ekonomi terutama melalui peningkatan kualitas penduduk miskin.

b. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang dasawarsa terakhir berada pada kondisi stabil stagnan di tengah situasi perekonomian nasional yang belum ideal dalam menciptakan iklim usahayang kondusif untuk dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai kenyataanya juga belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Sementara pada saat yang bersamaan struktur perekonomian daerah sedang mengalami transformasi ke fase industrialisasi yang ditandai dengan semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian serta tumbuh melambat karena kendala produktivitas. Sektor pertanian justru seharusnya menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling dominan di Kabupaten Rembang. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi mendatang perlu didorong oleh sumber-sumber pertumbuhan sektor sekunder dan tersier dengan tetap memperhatikan sektor agraris sebagai penyangga perekonomian daerah dengan tingkat serapan tenaga kerja terbesar serta yang terpenting menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

c. Perwujudan *Good Governance*

Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal di Kabupaten Rembang. Pola pikir dan budaya kerja belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak

dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan *E-government* ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada sisi perencanaan pembangunan daerah, implementasi *e-planning* dalam proses perencanaan tahunan telah diinisiasi melalui sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (SIPANDU) yang perlu didukung dengan ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan.

d. Perluasan Kesempatan Kerja

Meskipun persentase pengangguran di Kabupaten Rembang telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian potensi pertumbuhan angkatan kerja baru perlu upaya antisipasi dengan kesiapan lapangan kerja serta peningkatan kompetensinya agar memiliki produktivitas kerja yang lebih baik. Peningkatan kompetensi angkatan kerja di Kabupaten Rembang, yang terutama didominasi pencari kerja berpendidikan SLTA, perlu diupayakan dengan meningkatkan standar sertifikasiketrampilan/keahliantenaga kerja baru sehingga mampu berdaya saing pada saat memasuki pasar kerja. Sementara perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja harus dapat ditingkatkan dengan menciptakan peluang sektor usaha padat karya serta mendorong kewirausahaan masyarakat.

e. Kualitas Infrastruktur

Penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan memadai dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi aktivitas masyarakat masih mengalami kendala. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dalam kondisi bagus sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas perekonomian dan pengembangan kawasan pertumbuhan di Kabupaten Rembang. Demikian pula kondisi infrastruktur irigasi masih perlu dibenahi

untuk mencapai peningkatan produktivitas pertanian. Sedangkan penyediaan pemukiman layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu difokuskan pada upaya pembenahan RTLH dan penanganan kawasan kumuh. Wilayah Rembang juga perlu mengembangkan potensi sumberdaya air dengan memperbanyak bangunan penampung serta dan sumber air tanah. unggulan. Sementara untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan pula penyediaan infrastruktur yang memadai pada sektor-sektor ekonomi unggulan

f. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan agenda pembangunan Kabupaten Rembang. Tingkat kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakatang terukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) masih relatif tertinggal dibandingkan wilayahsekitar Kabuopaten Rembang.Untuk itu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pendidikan serta ekonomi masyarakat harus secara konsisten ditingkatkan secara berkesinambungan.

g. Pembangunan Desa

Pelaksanaan kewenangan desa telah berimplikasi terhadap dinamika pembangunan di tingkat desa, kucuran dana pembangunan desa yang relatif besar dapat dirasakan telah mendorong akselerasi pembangunan desa meskipun juga masih memunculkan eksternalitas dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian sasaran. Kesiapan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk mengawal pelaksanaan pembangunan desa harus semakin ditingkatkan melalui pendampingan dan pembinaan teknis maupun administratif agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaanya.

h. Kondusivitas Daerah

Kondisivitas daerah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban harus terus dapat terpelihara untuk menjamin kententrman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi. Upaya antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban perlu menjadi perhatian semua pihak memasuki tahun politik dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

i. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Persoalan pendidikan di Kabupaten Rembang terutama dapat dilihat pada aspek pemerataan pelayanan pendidikan, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, keteterjangkauan pelayanan pendidikan, standar kualitas pendidikan serta tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta PAUD. Kondisi ini dicerminkan dengan belum optimalnya partisipasi jenjang pendidikan TK dan PAUD terutama di daerah perdesaan. Demikian pula angka rata-rata lama sekolah masih relatif rendah.

j. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Rembang masih relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah sekitar dilihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Persoalan kesehatan masih muncul dari kejadian terjangkitnya penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Permasalahan kesehatan yang menjadi fokus perhatian terutama dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah yaitu terjadinya kasus kematian ibu maternal yang disebabkan pendarahan dan eklamsia serta kasus kematian bayi dan balita yang disebabkan oleh kasus asfeksia, BBLR dan infeksi penyakit lainnya. Demikian pula permasalahan gizi masyarakat dengan kejadian kasus balita *stunting* belum menjadi prioritas penanganan. Selain itu permasalahan yang terkait kesehatan masyarakat adalah Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menyebabkan tingginya kasus DBD. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta tingginya mobilitas penduduk turut menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti TB dan HIV AIDS. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat kedepan perlu mendorong peran serta masyarakat (PSM) dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya.

k. Revitalisasi Sektor Pertanian

Kontribusi serta pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dan melambat, namun pertanian masih memberikan kontribusi terbesar

dalam struktur PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Menurunnya kontribusi sektor pertanian pada struktur perekonomian Kabupaten Rembang terutama disebabkan penurunan tingkat produktivitas lahan pertanian. Persoalan kurangnya ketersediaan air baku untuk irigasi dan tertinggalnya teknologi pertanian mengakibatkan Indeks Pertanaman (IP) rendah serta kegagalan panen. Upaya revitalisasi sektor pertanian perlu dijalankan melalui intensifikasi dengan introduksi teknologi pertanian yang memadai. Disamping memperbaiki infrastruktur dan tata kelola irigasi serta memperbanyak tampungan air untuk pertanian.

l. Daya Saing Pariwisata

Lemahnya daya saing pariwisata dapat dinilai melalui indikator jumlah kunjungan wisata, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di sejumlah ODTW di Kabupaten Rembang. Persaingan antar daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata menjadi tantangan bagi Kabupaten Rembang untuk meningkatkan potensi wisatanya di tingkat regional. Meskipun telah bermunculan ODTW baru yang dikelola masyarakat, upaya menarik kunjungan wisata perlu semakin ditingkatkan dengan memperbaiki aspek aksesibilitas, amenities, atraksi dan aktivitas serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana destinasi pariwisata yang didukung SDM pelaku pariwisata yang memadai.

m. Peningkatan Ketahanan Pangan

Kualitas konsumsi pangan penduduk yang belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang adalah salah satu persoalan pangan di Kabupaten Rembang. Indikator skor pola pangan harapan (PPH) masih menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Disamping terdapat sejumlah wilayah desa yang mengalami ke rawanan pangan dan kerentanan ketahanan pangan pada skala rumah tangga. Upaya diversifikasi pangan serta pengelolaan sistem cadangan pangan daerah akan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Rembang.

n. Peningkatan Daya Tarik Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang dapat didorong dengan masuknya investasi pada sektor-sektor ekonomi potensial. Guna meningkatkan daya tarik investasi, upaya yang perlu dilakukan adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha yang didukung oleh promosi prospek investasi, pemberian insentif serta kemudahan pelayanan investasi. Mengingat persoalan pengangguran di Kabupaten Rembang, maka pengembangan investasi perlu diarahkan pada sektor ekonomi yang mampu memberikan kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat. Investasi lebih banyak diberikan pada industri padat karya maupun sektor UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang besar.

o. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Sumberdaya alam di Kabupaten Rembang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Rembang. Namun demikian pemanfaatan sumberdaya alam ini harus memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Penanganan isu strategis ini dapat dilaksanakan melalui upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada setiap kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup serta penanganan bencana.

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan penelaahan terhadap permasalahan perangkat daerah yang dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang perlu segera ditangani melalui program dan kegiatan pada tahun 2019. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendidikan

Permasalahan urusan pendidikan yang teridentifikasi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD. Hal ini disebabkan belum tercukupinya

ketersediaan lembaga PAUD. Masih adanya angka putus sekolah untuk SD dan SMP sederajat serta angka melanjutkan sekolah belum optimal. Persoalan pendidikan juga terletak pada kualitas pendidik pada jenjang pendidikan PAUD dan SD/MI. Demikian pula masih rendahnya sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Sedangkan pada fungsi penunjang pendidikan belum tercukupinya dukungan tenaga kependidikan (tenaga administrasi) dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang tahun 2019 perlu diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tatakelola pelaksanaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan.

b. Kesehatan

Permasalahan yang masih menjadi perhatian utama pada urusan kesehatan adalah terjadinya kasus kematian ibu serta kasus kematian bayi dan balita, prevalensi balita *stunting* serta meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagai dampak rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dasar serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan diarahkan pada upaya terwujudnya peningkatan derajat kesehatan, melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang merata dan bermutu; meningkatkan manajemen kesehatan yang dinamis, akuntabel dan transparan; meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas; meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau serta mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin; meningkatkan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan serta mutu dan pelayanan di bidang farmasi dan alat kesehatan termasuk obat asli Indonesia, makanan minuman dan perbekalan kesehatan; serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan; serta meningkatkan peran serta dan kemandirian

masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, mengembangkan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) dan bencana serta penyehatan lingkungan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Rembang dapat dievaluasi dari kondisi infrastruktur yang belum memadai baik mencakup sistem drainase di perkotaan, kondisi jalan dan jembatan, kurangnya bangunan penampung air dan saluran irigasi serta lemahnya pengendalian tata ruang. Kebijakan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum diarahkan pada upaya fasilitasi peningkatan jalan poros nasional dan provinsi untuk memudahkan akses hingga pedesaan, optimalisasi jalan poros antar desa dengan lapis *hotmix* atau cor beton, tercukupinya irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Rembang, pembangunan embung-embung besar representatif untuk mencukupi kebutuhan irigasi. Kebijakan penataan ruang daerah diarahkan pada upaya mewujudkan program pengendalian pemanfaatan ruang dan kerjasama perencanaan dan penataan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengungkapkan masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan tersentuh program penataan lingkungan, belum optimalnya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta banyaknya kondisi rumah tidak layak huni. Kebijakan pembangunan daerah di bidang perumahan diarahkan pada upaya peningkatan dan penataan permukiman, penyediaan sarana prasarana perumahan dasar serta penanganan RTLH dan kawasan kumuh.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Masih terjadinya kejadian kriminal di wilayah Kabupaten Rembang, belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat. Kebijakan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah perdesaan dan wilayah perbatasan, menguatkan kelembagaan dalam masyarakat untuk meningkatkan ketertiban dan

keamanan secara swadaya dalam rangka mengantisipasi ancaman kamtibmas dan menanggulangi penyakit sosial masyarakat, serta meningkatkan perlindungan masyarakat dan rakyat terlatih dalam penanganan awal gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat.

f. Sosial

Sejumlah permasalahan pada urusan sosial yang teridentifikasi adalah masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani, mengakibatkan rendahnya cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, minimnya persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Kebijakan penyelenggaraan urusan bidang sosial diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS, penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana, serta pengembangan rasa kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

g. Tenaga Kerja

Permasalahan fundamental urusan Tenaga kerja terkait dengan laju pertumbuhan penduduk usia kerja berkorelasi dengan bertambahnya angkatan kerja. Pertambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja menyebabkan terjadinya tingkat pengangguran terbuka yang terlihat dari jumlah pencari kerja yang belum mampu ditempatkan. Kebijakan pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing, menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, melaksanakan pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum.

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi terhadap capaian IPG menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender. Permasalahan lain adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan daerah, rendahnya keberdayaan perempuan, belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender pada seluruh PD sebagai dasar untuk perencanaan program kegiatan maupun pengambilan kebijakan, serta masih minimnya jumlah Desa Ramah Anak. Kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di arahkan padapeningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

i. Pangan

Pada urusan pangan, permasalahan terutama terkait dengan kualitas konsumsi pangan penduduk dengan meningkatnya ancaman penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan, sehingga memerlukan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Sementara pada aspek ketersediaan pangan belum dilakukan pengelolaan cadangan pangan melalui sistem CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Daerah) dan CPM (Cadangan Pangan Masyarakat). Kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya mengembangkan sistem database perencanaan dan ketersediaan informasi ketahanan pangan, serta melaksanakan analisa ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.

j. Pertanahan

Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat.. Kebijakan penyelenggaraan kewenangan pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta fasilitasi dan sinkronisasi program-program pemerintah dibidang pertanahan

k. Lingkungan Hidup

Masih rendahnya penanganan sampah, Masih rendahnya pengelolaan sampah pada sistem pengangkutan, Rendahnya aktivitas pemantauan terhadap status baku mutu air, Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; Hal ini ditandai dengan Masih banyaknya perusahaan yang belum menyusun dan melaksanakan RKL/RPL maupun UKL/UPL. Masih banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Indeks Kualitas Lingkungan hidup belum tercapai sesuai dengan standar nasional yaitu 68,5 Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Belum optimalnya upaya rehabilitasi hutan mangrove. Masih adanya lahan kritis. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada pendayagunaan sumber daya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan, pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air, pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam perlestarian hutan, serta peningkatan sarana dan prasarana layanan persampahan, drainase dan air limbah.

l. Kependudukan dan Catatan Sipil

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Belum optimalnya informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan. Kebijakan pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil dengan cepat, murah dan transparan serta menciptakan suasana responsive antar lembaga dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terkait dengan peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat juga pada pemberdayaan

PKK dan Posyandu. serta rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Kesiapan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penerapan undang-undang tentang desa masih belum optimal. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat; mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan; mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam mendukung pembangunan; memantapkan kehidupan social budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan masyarakat, berbangsa dan bernegara; mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha-usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengembangan pasar desa melalui pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; serta peningkatan fungsi dan system informasi melalui penyediaan data profil desa.

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga masihn mengalami masalah yang bdapat dievaluasi dari rendahnya cakupan peserta KB aktif MKJP, tingginya angka Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) dan *Drop Out* (DO), tingginya cakupan PUS dengan usia di bawah 20 tahun. serta rendahnya cakupan tribina pada desa/kelurahan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kebijakan pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada upaya menggerakkan dan mendayakan seluruh masyarakat dalam program KB.

o. Perhubungan

Permasalahan urusan perhubungan adalah belum memadainya penyediaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM), baik yang melayani penumpang dalam kabupaten maupun yang menghubungkan antar kabupaten, tingginya jumlah angka

kecelakaan, kurangnya ketersediaan fasilitas jalan pada jalan kabupaten/kota, rendahnya jumlah persentase kapal yang bersertifikasi, belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan kegiatan operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, lemahnya pengawasan terhadap kendaraan berat dan pemanfaatan pangkalan truk serta belum tercukupinya fasilitas perlengkapan jalan. Kebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan; meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum; meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan; dan meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan.

p. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang mudah diamati pada urusan komunikasi dan informatika adalah pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas, belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada *e-Government* dan penerapan *blueprinte-Government* serta belum tersedianya unit pengaduan *online* terpadu. Persoalan ini berawal dari terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi serta masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi. Kebijakan pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan pada upaya mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa, meningkatkan kerjasama bidang informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas bidang informasi dan komunikasi, serta memberikan jasa pelayanan yang prima kepada masyarakat di segala bidang layanan.

q. Koperasi dan UMKM

Pada urusan koperasi dan UMKM, permasalahan yang teridentifikasi adalah masih terdapat koperasi yang tidak aktif, rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omzet; rendahnya partisipasi UMKM mengikuti pameran promosi produk serta belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif. Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan pada upaya pengembangan iklim usaha

kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; pengembangan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru; optimalisasi perdagangan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen yang dilindungi; pengembangan kapasitas kualitas sarana prasarana perdagangan; pengoptimalan kapasitas dan kemampuan teknologi industri guna peningkatan kuantitas dan kualitas produk.

r. Penanaman Modal Daerah

Permasalahan urusan penanaman modal berawal dari kurangnya promosi potensi Kabupaten Rembang kepada calon investor sehingga belum mampu meningkatkan minat investasi. Disamping masih kurangnya kegiatan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan investasi. Kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal diarahkan pada upaya menjadikan Kabupaten Rembang layak investasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip pelayanan yang prima, meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan maupun fasilitasi investasi yang ditunjang sarana dan prasarana yang mencukupi, meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal serta meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.

s. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga adalah belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi, rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda, belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan kegiatan kepemudaan yang ada, kurangnya penyelenggaraan event olahraga serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga yang memadai. Kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas generasi pemuda, meningkatkan dan mengembangkan generasi muda dalam kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan, melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obat

terlarang dan zat adiktif lainnya, meningkatkan dan pengembangan kualitas manajemen bidang keolahragaan, meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi dikalangan masyarakat dan meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga.

t. Statistik

Permasalahan urusan statistik terkait dengan kelengkapan data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah, belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah, serta belum tersedianya *database* yang berisi data dan informasi yang valid dan *up to date*. Kebijakan pembangunan bidang statistik di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya mewujudkan ketersediaan data yang akurat dan *up to date* sebagai dasar perencanaan pembangunan melalui pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi statistik.

u. Persandian

Permasalahan urusan persandian adalah pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

v. Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, permasalahan yang teridentifikasi adalah belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Rembang, masih rendahnya pembinaan kelompok kesenian, belum tersedianya Gedung Kesenian/ sarana dan prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni, serta masih sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya. Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya daerah; meningkatkan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya daerah; meningkatkan dan mengembangkan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

w. Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan adalah rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan daerah, masih sedikitnya jumlah perpustakaan di tingkat kecamatan, dan jumlah perpustakaan keliling serta masih terbatasnya jumlah pustakawaan yang tersertifikasi. Kebijakan pembangunan perpustakaan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan minat baca masyarakat melalui peningkatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan sekolah dan masyarakat, serta peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat.

x. Kearsipan

Pada urusan kearsipan, permasalahan fundamental adalah masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga terampil maupun ahli. Selain itu terdapat permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah, rendahnya duplikasi arsip ke dalam bentuk digital, serta rendahnya pengelolaan arsip secara baku. Kebijakan pembangunan bidang kearsipan Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya memberikan pelayanan prima kepada instansi maupun masyarakat di bidang kearsipan, meningkatkan kesadaran aparatur terhadap arti penting arsip serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan arsip statis.

y. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan masih menghadapi sejumlah permasalahan yaitu belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu kelompok nelayan tangkap, kelompok pembudidaya, maupun kelompok pengolah ikan, rendahnya produksi perikanan budidaya, rendahnya konsumsi ikan per kapita penduduk Kabupaten Rembang, rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, belum optimalnya rata-rata pendapatan nelayan serta masih terbatasnya sarana dan prasarana TPI. Kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, Meningkatkan pengelolaan kawasan persisir, Meningkatkan produktifitas perikanan budidaya serta Meningkatkan pengelolaan produksi olahan hasil perikanan dan

kelautan.

z. Pariwisata

Permasalahan urusan pariwisata terlihat dari jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata., masih rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wisatawan di Kabupaten Rembang, belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan desa wisata, kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata termasuk jasaperhotelan,serta belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif. Persoalan tersebut menyebabkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PADmasih rendah. Kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya meningkatkan dan mengembangkan pemasaran pariwisata daerah, meningkatkan dan mengembangkan potensi usaha pariwisata daerah sertameningkatkan dan mengembangkan SDM dan peran serta masyarakatserta dunia usaha pariwisata

aa. Pertanian

Permasalahan urusan pertanian yang dapat teridentifikasi meliputi kualitas produk pertanian belum optimal, pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas, belum optimalnya produktivitas pangan utama padi, minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan semakin menurun, belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan, belum terbangunnya kawasan agro industri dan agropolitan, terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dan kelompok tani mengenai teknik penyuluhan dan budidaya pertanian / pengembangan agribisnis pertanian, tingginya biaya produksi dalam usaha peternakan serta rendahnya penerapan teknologi pertanian. Kebijakan pembangunan bidang pertanian diarahkan pada upaya penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, baik pada tingkat budidaya maupun pasca panen; peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian; mewujudkan kawasan komoditas unggulan pertanian dan mengembangkan usaha tani terpadu; peningkatan mekanisme distribusi dan jejaring pemasaran komoditas pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan; memperkuat modal usaha dan

meningkatkan kemampuan manajemen petani; menyediakan sarana prasarana dan komponen kegiatan penyuluhan serta menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepada kelompok tani.

bb. Perdagangan

Permasalahan urusan perdagangan adalah belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar, belum tersedianya pusat perdagangan bagi agrobisnis dan hasil peternakan, lemahnya perlindungan konsumen di Kabupaten Rembang, belum optimalnya ekspor komoditas dari Kabupaten Rembang serta belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM memasuki eraperdagangan bebas. Kebijakan pembangunan di bidang perdagangan diarahkan pada upaya optimalisasi perdagangan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen yang dilindungi; pengembangan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional; pengembangan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru; pengembangan kapasitas kualitas sarana perdagangan; optimalisasi perdagangan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen yang dilindungi; dan menyelenggarakan atau mengikuti acara dan program yang mengangkat dan mempromosikan produk unggulan daerah.

cc. Perindustrian

Permasalahan urusan perindustrian mencakup aspek belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pengembangan Industri kecil dan Menengah, lemahnya akses modal bagi industri kecil, jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi perijinan menurun serta belum adanya kawasan industri yang dikelola secara modern. Kebijakan pembangunan bidang industri di Kabupaten Rembang diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi industri guna peningkatan kuantitas dan kualitas produk; meningkatkan kualitas produk industri; pengoptimalan kapasitas dan kemampuan teknologi industri guna peningkatan kuantitas dan kualitas produk; peningkatan iklim kondusif investasi yang

mendukung terciptanya struktur industri yang mempunyai keterkaitan antara industri hulu dan hilir; dan peningkatan apresiasi masyarakat untuk mengkonsumsi produk kreatif sekaligus menghargai Hak Kekayaan Intelektual.

dd. Satpol PP

Permasalahan pada Satpol PP adalah belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak kejahatan, belum optimalnya penanganan tindak pidana kriminal dan penanganan kasus penyakit masyarakat; belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, terbatasnya jumlah anggota Satpol PP, memudarnya pelaksanaan Siskamling pada masing-masing kelurahan/desa, serta terbatasnya jumlah pembinaan politik daerah.

ee. Sekretariat Daerah

Permasalahan pada Sekretariat daerah terkait aspek penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru, belum semua unit-unit pelayanan PD memiliki pedoman standar pelayanan publik (SPP) dan melaksanakan evaluasi pelayanan publik (pengukuran IKM) secara berkala, belum semua unit aktifitas PD telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP, belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah, belum optimalnya evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah, belum adanya *roadmap* reformasi birokrasi serta belum optimalnya pelaksanaan PATEN di masing masing kecamatan.

ff. Sekretariat DPRD

Permasalahan Sekretariat DPRD adalah belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Kebijakan diarahkan pada upaya penguatan peran Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi kegiatan persidangan, pengelolaan sarana/prasarana dan pendanaan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten Rembang.

gg. Kepegawaian

Permasalahan urusan kepegawaian terkait aspek kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta belum optimalnya manajemen ASN Kebijakan pembangunan di bidang kepegawaian daerah diarahkan

pada upaya meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur; meningkatnya profesionalitas, moralitas dan kompetensi ASN melalui diklat dan tugas belajar; pengembangan karier secara kompetitif berdasarkan prestasi kerja.

hh. Keuangan Daerah

Permasalahan keuangan daerah adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang bersifat terpadu, belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi retribusi daerah, belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah serta belum tercapainya opini BPK dengan kategori WTP atas pelaporan keuangan daerah.

ii. Inspektorat Daerah

Permasalahan inspektorat daerah terkait dengan meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (PD), kurangnya kapasitas SDM pemeriksa sehingga tingkat kelulusan dalam diklat penjenjangan belum optimal, kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) serta belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing PD. Kebijakan pembangunan di bidang pengawasan daerah diarahkan pada upaya mewujudkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas dan mewujudkan sistem pengawasan yang efektif.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang juga perlu disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi nasional, terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019 dan RKP Tahun 2019. Sebagaimana dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, agenda prioritas pembangunan nasional mencakup pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan serta kondisi perlu yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya prioritas nasional tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaannya diupayakan melalui pendekatan pembangunan yang bersifat holistik-tematik, integratif dan spasial dengan kebijakan anggaran belanja tidak mendasarkan lagi pada *money follow function* tetapi berdasarkan *money follow program* serta lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan prioritas pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu mendapat perhatian adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

Dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan ekonomi nasional juga ditujukan pada upaya meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA)

yang berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

Kebijakan ekonomi nasional mencakup pula pada upaya pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

Pemerintah pusat juga berkomitmen dalam upaya mengembangkan dan pemerataan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pada tahun 2019, arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional, antara lain mencakup:

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
- 2) Laju inflasi sebesar 3,5%;

- 3) PDB perkapita sebesar Rp.72.217ribu;
- 4) Indeks Gini sebesar 0,36;
- 5) Tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0%;
- 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar76,3;
- 7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar4,0–5,0%.

Guna mewujudkan sasaran pembangunan nasional serta memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah, maka tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional (R K P) Tahun 2019 adalah “**Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas**”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 menetapkan lima program priopritas nasional yang meliputi:

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
- 4) Kemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air.
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Kebijakan ekonomi nasional yang dijabarkan dalam RKP Tahun 2019 pada hakekatnya diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi global serta pertumbuhan ekonomi domestik yang mengalami peningkatan. Dari sisi permintaan, pemerintah berupaya menggunakan instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah kebijakan pada aspek belanja negara difokuskan pada optimalisasi belanja negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. arah kebijakan pada aspek Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), difokuskan padapeningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja TKDD secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas. Sementara dari sisi penawaran, enam sektor utama yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup besar diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Keenam sektor tersebut adalah industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas; pertanian dalam arti luas; perdagangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa

keuangan. Kebijakan ekonomi nasional yang sedang direncanakan tersebut diharapkan akan berdampak positif terhadap prospek ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2019.

Adapun kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 lebih mengarah untuk menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi tahun sebelumnya, mengingat periode perencanaan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah berakhir. Dalam masa peralihan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tersebut, pembangunan ekonomi daerah Jawa Tengah tahun 2019 berpijak pada upaya mendukung pencapaian sasaran RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahap III, yaitu pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah berlandaskan keunggulan SDM, pelayanan dasar yang semakin luas, infrastruktur wilayah berkualitas, kondusivitas wilayah yang mantap, serta kemampuan iptek yang meningkat. Arah kebijakan tersebut selanjutnya telah dirumuskan menjadi agenda prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam dokumen RKPD Jawa Tengah 2019 yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang sebagai bahan rujukan.

Adapun RKPD Jawa Tengah tahun 2019 mengangkat tema ***“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”***. Tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah kemudian dijabarkan dalam tujuh program prioritas sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan Kemiskinan,
- 2) Penguatan Daya Saing Ekonomi,
- 3) Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM,
- 4) Pengelolaan SDA-LH dan Penanggulangan Bencana,
- 5) Ketahanan Pangan dan Energi,
- 6) Kesenjangan Wilayah, serta
- 7) Tata Kelola Pemerintahan.

Melalui penjabaran kebijakan ekonomi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih akan bergantung pada kekuatan fiskal yang dimiliki untuk menopang pembangunan infrastruktur. Sementara konsumsi rumah

tangga akan meningkat jika pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar relatif stabil, dan mendukung peningkatan upah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah dapat didorong melalui peningkatan pertumbuhan 3 (tiga) sektor unggulan Jawa Tengah yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; serta perdagangan besar-eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor lain yang juga diperkirakan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah konstruksi, informasi dan keuangan, dan jasa keuangan. Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 di proyeksikan tumbuh pada kisaran 5,4 – 5,8 persen lebih rendah dari proyeksi Pemerintah Pusat. Sementara itu, inflasi Jawa Tengah tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 4 ± 1 persen dengan asumsi terjaganya ketersediaan, distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat; optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional serta arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, maka upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu menjadi dasar pijakan dalam menyelaraskan arah kebijakan ekonomi di Kabupaten Rembang. Penyelarasan kebijakan ekonomi ini sangat penting mengingat bahwa secara empiris variabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang belum berkorelasi kuat pada penurunan angka kemiskinan. Persentase kemiskinan Kabupaten Rembang hingga saat ini masih berada pada deretan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah sehingga memerlukan upaya yang lebih sistematis.

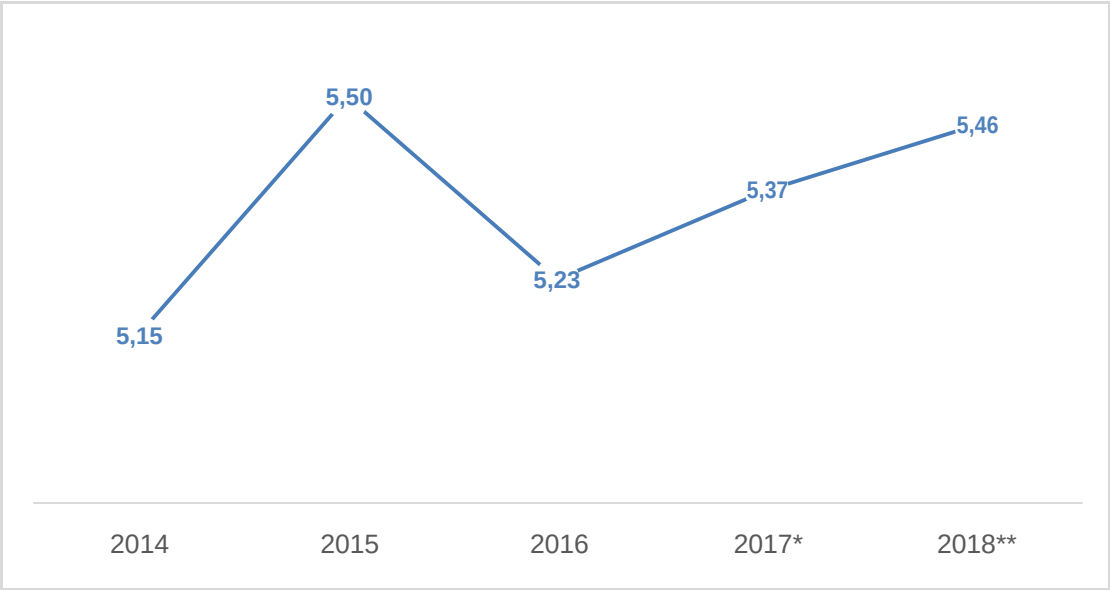
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Kemajuan ekonomi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dinilai dari tiga macam ukuran yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh

adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut berdasarkan aspek pertumbuhan produktivitas. Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi.

Pemerintah daerah pada hakekatnya telah mengusahakan agar ekonomi Kabupaten Rembang tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang diperkirakan sebesar 5,37% masih lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 sebesar 5,64%. Belum tercapainya target pertumbuhan tersebut didasari perkiraan pertumbuhan sektor-sektor dominan yang masih rendah bahkan cenderung menurun. Perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang 2014-2018 dapat digambarkan pada grafik berikut.

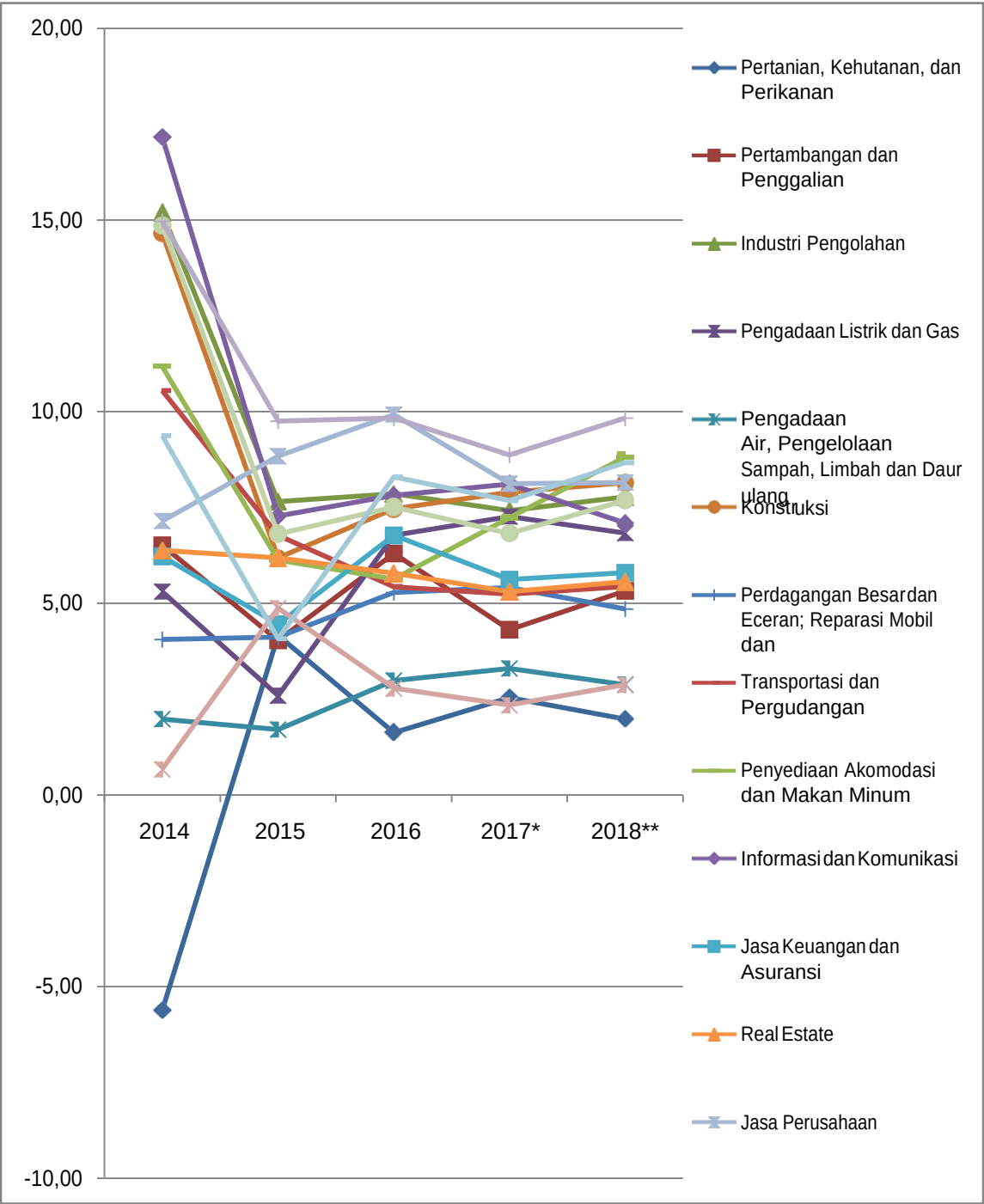


Gambar 3.1.
Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2017, data diolah

Disisi lain, apabila dilihat dari kontribusi sektoral terhadap perekonomian Rembang, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuhbelas

sektor pembentuk PDRB tumbuh positif di setiap sektor meskipun untuk sektor primer pertanian justru tingkat pertumbuhan lebih rendah dibandingkan listrik, perdagangan dan jasa. Dari gambar berikut dapat dilihat bahwa hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi diperkirakan akan terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa perusahaan serta informasi dan komunikasi. Berikut ini gambaran perkembangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Rembang 2014-2018.



Gambar 3.2
Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Kabupaten Rembang Tahun 2014- 2018
Sumber: Rembang dalam angka, 2017, data diolah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu dasar pengukuran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang menunjukkan keseluruhan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Rembang selama kurun waktu tertentu. Untuk melihat secara riil perkembangan PDRB maka digunakan pendekatan tahun dasar atau atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan ADHK 2010, perkembangan PDRB tahun 2017 diperkirakan mengalami kenaikan pada seluruh sektor, perkembangan tertinggi terjadi pada sektor dominan yaitu sektor pertanian, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Nilai PDRB riil pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 12,02 tilyun rupiah dan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 12,68 trilyun rupiah. Perkembangandan Proyeksi PDRB Kabupaten Rembang Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

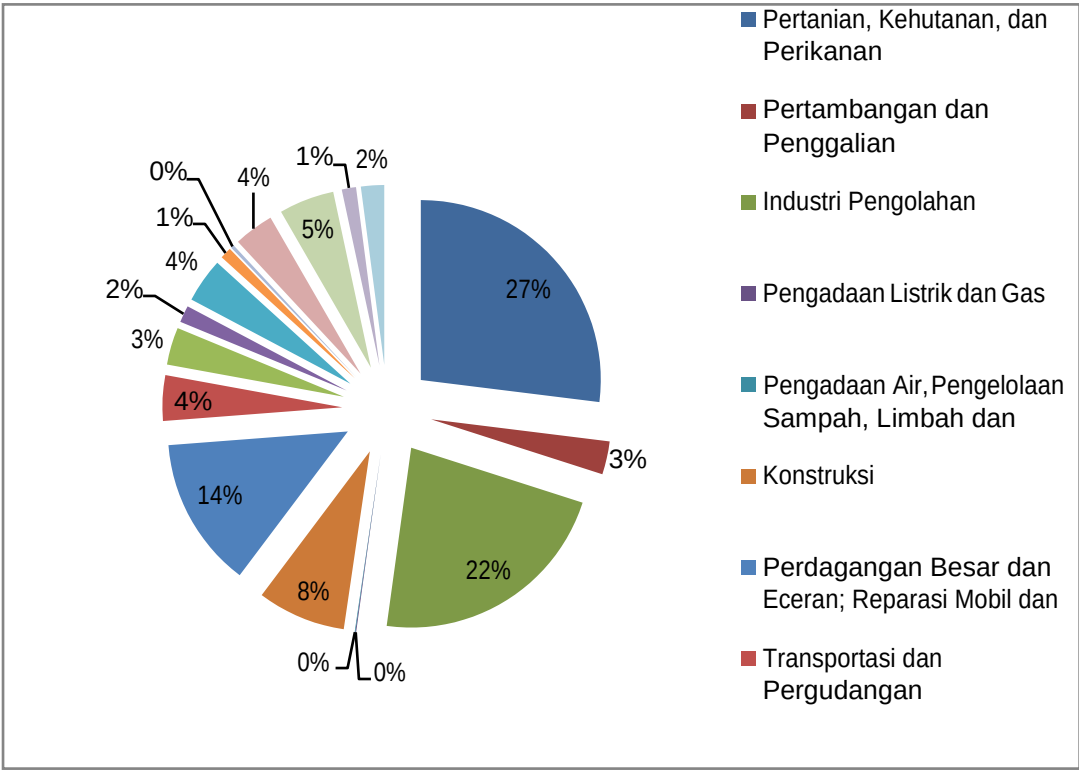
Tabel 3.1
Perkembangandan Proyeksi PDRBKabupaten Rembang
MenurutSektorAtasDasarHargaKonstan2010
Tahun2014-2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.992,91	3.117,53	3.168,23	3,248.70	3,313.03
B	Pertambangan dan Penggalian	310,77	323,29	343,65	358,47	377,54
C	Industri Pengolahan	2.143,28	2.307,39	2.488,77	2.673,43	2.881,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,20	9,44	10,07	10,80	11,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,55	5,64	5,81	6,00	6,17
F	Konstruksi	776,63	824,64	886,13	956,05	1,033,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.406,73	1.464,60	1.541,93	1.625,35	1.704,18
H	Transportasi dan Pergudangan	414,92	443.04	467,12	491,59	518,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336,23	356,83	376,93	404,18	439,83

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
J	Informasi dan Komunikasi	145,37	155,94	168,12	181,76	194,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	407,15	425,30	454,10	479,62	507,44
L	Real Estat	105,52	112,04	118,52	124,80	131,74
M,N	Jasa Perusahaan	28,19	30,68	33,72	36,46	39,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391,05	410,09	421,48	431,34	443,72
P	Jasa Pendidikan	486,88	520,05	559,13	597,32	643,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117,62	129,09	141,78	154,36	169,53
R,S, T,U	Jasa lainnya	206,28	214,68	232,50	250,35	272,06
Produk Domestik Regional Bruto		10.284,27	10.850,27	11.418,01	12,030.60	12,687.75

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2016,data diolah

Struktur perekonomian di Kabupaten Rembang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten Rembang. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkiraan pada tahun 2017 sektor pertanian masih memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rembang yaitu sebesar 3,24 trilyun rupiah dengan kontribusi sektoral 27%. Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dengan nilai PDRB sebesar 2,67 trilyun dengan kontribusi sektoral 22%. Perkembangan kontribusi sektoral dari tahun ke tahun dapat menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Rembang tengah mengalami transformasi ke arah industri. Perkiraan struktur ekonomi kabupaten Rembang pada tahun 2017 dapat diilustrasikan melalui grafik berikut.



Gambar 3.3
Struktur Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2017*
Sumber: BPS, Rembang Dalam Angka, 2016, data diolah

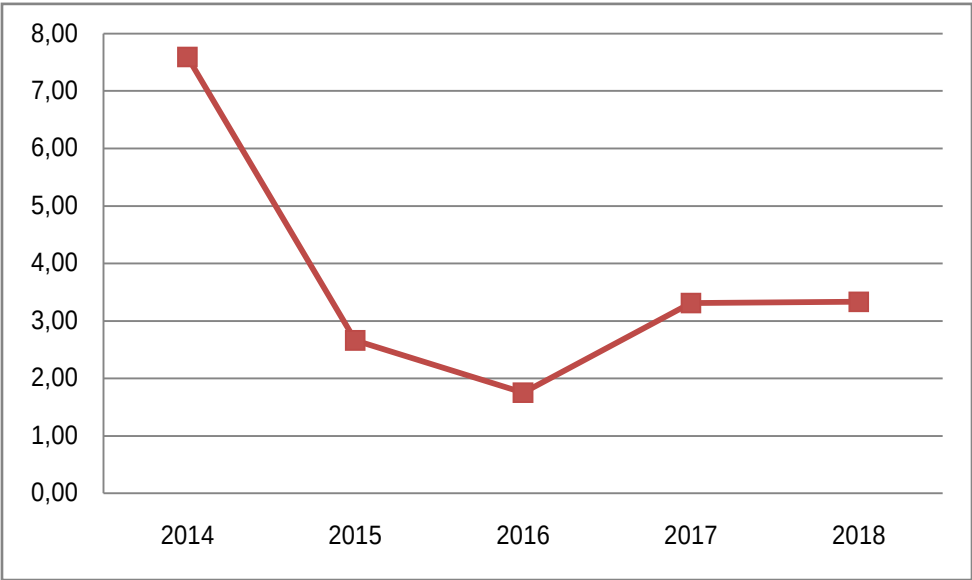
Inflasi

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara makro dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi. Tingkat inflasi yang terkendali masih diperlukan guna mendorong sektor produksi tetap berlangsung.

Tingkat inflasi dapat diperhitungkan setiap bulan maupun setiap tahun (YoY) melalui metode Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan sampel lebih kurang 322 komoditi sebagaimana telah dipublikasikan oleh BPS. Selain itu inflasi juga dapat diketahui pula dengan menggunakan indeks implisit PDRB. Berdasarkan metode tersebut dapat diketahui bahwa tingkat inflasi Kabupaten Rembang (YoY)

pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,31%, atau lebih tinggi dari tahun 2016 yang sebesar 1,75%. Kondisi inflasi Kabupaten Rembang tahun 2017 juga lebih rendah dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 3,71%.

Kenaikan inflasi Kabupaten Rembang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga pada kelompok bahan makanan yang juga dipengaruhi oleh kenaikan BBM maupun tarif dasar listrik (TDL). Kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi energi akan berpengaruh pada kenaikan harga-harga komoditas yang dapat menyebabkan inflasi. Pada tahun 2018 pemerintah mempunyai kebijakan mencabut subsidi listrik 900 VA yang akan diikuti dengan kenaikan TDL. Kebijakan ini kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap inflasi, sehingga diperkirakan angka inflasi Kabupaten Rembang berada pada kisaran 3% ± 1%.



Gambar 3.4
Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Rembang, 2016, data diolah

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang diperkirakan akan tetap tumbuh meskipun mengalami stagnasi ditengah sejumlah tantangan yang berpengaruh pada sektor produksi dan konsumsi masyarakat. Di sektor konsumsi, tantangan perekonomian daerah berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat yang dipengaruhi naik

turunnya harga BBM, kenaikan harga komoditas pangan serta kenaikan indeks pengeluaran masyarakat karena kenaikan TDL, elpiji dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara daya saing sektor produksi juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal yang terutama disebabkan oleh tingkat efisiensi faktor produksi dan rendahnya produktifitas.

Namun disisi lain prospek perekonomian di Kabupaten Rembang masih memberikan optimisme dengan munculnya sektor-sektor ekonomi baru yang mengalami percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Maraknya industri pengolahan yang disokong tumbuhnya UMKM menjadi motor transformasi ekonomi dari perkembangan sektor pertanian yang semakin melambat. Inovasi pada sektor UMKM terlihat semakin mampu berdaya saing untuk menjadi tuan rumah dalam tataran perekonomian lokal dan regional. Demikian pula kemajuan teknologi informasi mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Kabupaten Rembang yang terutama disokong oleh maraknya kegiatan perdagangan elektronik. Menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Rembang semakin dirasakan berdampak ganda pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan munculnya usaha-usaha pariwisata di tingkat lokal. Sementara pemerintah pusat turut mendorong perputaran ekonomi daerah melalui kebijakan moneter yang semakin ekspansif.

Untuk merespon sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2019 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Rembang tahun 2019 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Dalam rangka mencapai target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka kondisiperekonomianKabupaten Rembang Tahun 2019 dapat diproyeksikan sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2019secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh sejumlah asumsi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional masih mengalami tekanan pelemahan nilai tukar rupiah serta meningkatnya inflasi sebagai dampak pencabutan subsidi energi.Terjadinya pelambatan laju pertumbuhan sektor pertanian akibat faktor struktural seperti benih, pupuk, sarana produksi pertanian, perubahan pola iklim serta cuaca serta regulasi sub sektor perikanan yang menjadi kendala produksi perikanan tangkap. Namun demikian, melalui kebijakan merevitalisasi sektor pertanian, meningkatkan arus investasi dan belanja pemerintah yang berkeadilan, perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan izin usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna maka diharapkan perekonomian Kabupaten Rembang akan tumbuh positif.Momentum pemilihan Kepala Daerah pada pertengahan Tahun 2018 yang diharapkan akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat serta menggerakkan sektor perdagangan, jasa dan informal lainnya. Berdasarkan asumsi tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang diproyeksikan pada kisaran $5\% \pm 1\%$. Disisi lain tingkat inflasi sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat, akan terkendali pada kisaran $3\% \pm 1\%$ melalui upaya optimalisasi peran TPID dalam menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga.
- b) Dengan target penurunan angka kemiskinan yang cukup drastis, percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembangdapat tercapaiapabila didukung pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dan inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Kebijakan pengentasan kemiskinan diprioritaskan pada upaya yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan sektoral berdimensi kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan tinggi, peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga.

Upaya pengentasan kemiskinan tersebut akan ditempuh melalui penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dengan memperbaiki data rumah tangga miskin, penyediaan akses kebutuhan dasar yg layak bagi keluarga miskin, pengembangan kemitraan dengan swasta dan lembaga lainnya terutama dalam penanganan PMKS dan RTLH serta pendampingan pemberdayaan masyarakat di desa merah dengan pendampingan OPD terkait. Dengan sejumlah upaya tersebut prosetase kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 diproyeksikan turun pada kisaran $16\% \pm 1\%$.

- c) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi $3\% \pm 1\%$ pada Tahun 2019 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja di sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan, penguatan hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja melalui skema BPJS Ketenagakerjaan;

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka menjawab tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2019 dan tahun 2020 maka kebijakan pembangunan daerah perlu didukung kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan keuangan daerah pada hakekatnya merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas

perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kesenambungan pertumbuhan ekonomi daerah memerlukan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai salah satu faktor injeksi dalam siklus ekonomi. Instrumen fiskal tersebut diwujudkan dalam bentuk belanja pemerintah serta dana transfer yang implementasinya disalurkan melalui mekanisme penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah yang sejalan dengan prinsip *value for money* yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada aspek pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Peningkatan peran dan porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun demikian, komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Rembang belum sebanding dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari PAD yang berarti meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2019 akan diarahkan pada sejumlah hal berikut:

- a) Meningkatkan penerimaan PAD melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan BLUD;
- b) Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana transfer umum dan Dana transfer khusus;
- c) Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan;
- d) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- e) Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas,

efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;

- f) Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- g) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

Kebijakan penetapan target pendapatan daerah pada tahun 2019 menggunakan pendekatan proporsional, dimana asumsi kenaikan Pendapatan Daerah akan selaras dengan rencana kenaikan Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, perencanaan pendapatan daerah dalam penyusunan RKPD mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD diperkirakan meningkat 3,38% dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama dua tahun terakhir serta perkiraan potensi masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undang yang berlaku;
2. Dana Perimbangan meliputi Dana transfer umum serta Dana transfer khusus diasumsikan meningkat dari pagu definitif Tahun Anggaran 2018 berdasarkan usulan kegiatan DAK tahun 2019.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan menurun 1,31% dengan mempertimbangkan potensi riil, sedangkan Bantuan Keuangan Provinsi diasumsikan meningkat dari pagu definitif Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan sejumlah asumsi tersebut, postur realisasi dan proyeksi pendapatan Daerah pada Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Rembang
Tahun 2016 s.d tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	PENDAPATAN	1,596,566,692,500	1,738,875,604,911	1,760,297,103,655	2,168,387,683,466	2,254,360,693,000
1.1	Pendapatan asli daerah	180,807,678,500	316,941,980,688	280,604,454,655	290,068,788,466	300,611,849,000
1.1.1	Pajak daerah	38,153,500,000	59,734,946,872	96,286,250,000	96,850,500,000	97,819,005,000
1.1.2	Retribusi daerah	27,853,821,500	20,730,064,301	23,158,499,000	20,994,964,395	21,456,854,000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6,340,000,000	9,212,738,532	9,257,000,000	10,030,000,000	11,033,000,000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	108,460,357,000	227,264,230,983	151,902,705,655	162,193,324,071	170,302,990,000
1.2	Dana perimbangan	970,288,185,000	1,075,045,860,549	1,097,531,488,000	1,336,921,134,000	1,405,387,534,000
1.2.1	Dana transfer umum	813,432,985,000	816,948,229,807	815,321,417,000	815,321,417,000	831,627,845,000
1.2.2	Dana transfer khusus	156,855,200,000	258,097,630,742	282,210,071,000	521,599,717,000	573,759,689,000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	445,470,829,000	346,887,763,674	382,161,161,000	541,397,761,000	548,361,310,000
1.3.1	Pendapatan hibah	1,566,904,000	1,711,800,674	58,432,800,000	58,432,800,000	58,432,800,000
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	75,549,967,000	92,803,709,000	95,000,000,000	90,000,000,000	94,500,000,000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	368,353,958,000	228,013,715,000	228,728,361,000	228,728,361,000	228,728,361,000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya		24,358,539,000		164,236,600,000	166,700,149,000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, 2018

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan belanja tidak langsung Kabupaten Rembang pada tahun 2019 akan diarahkan pada hal-hal berikut :

- a) Belanja Pegawai, diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai, yang sifatnya mengikat (*mandatory*).
- b) Bantuan Hibah, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- c) Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat untuk melindungi masyarakat/ kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian belanja hibah dan bantuan sosial harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum (*block grant*) dan bantuan khusus (*specific grant*), antara lain Alokasi Dana Desa (ADD).
- e) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Arah Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung Kabupaten Rembang pada tahun 2019 akan diarahkan pada aspek-aspek berikut:

- a) Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.
- b) Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program

penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif.

- c) Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan.
- d) Memprioritaskan alokasi anggaran pada program – program prioritas daerah pada tahun 2019.
- e) Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
- f) Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
- g) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada RKPD Kabupaten Rembang 2019, Perencanaan belanja daerah pada tahun 2019 dihitung dengan berdasar asumsi sebagai berikut :

- a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan meningkat sebesar 17,4% dibandingkan pagu definitif Tahun Anggaran 2018.
- b. Perhitungan gaji pegawai menggunakan basis data pegawai Bulan Mei tahun 2018.

Postur Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 s.d Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi pada Tahun 2020
2	BELANJA					
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,151,214,323,000	1,050,346,817,667	1,080,082,799,500	1,099,731,811,600	1,158,807,117,000
2.1.1	Belanja pegawai	808,954,601,000	622,547,261,167	668,770,123,000	667,534,278,000	684,222,635,000
2.1.2	Belanja bunga	37,000,000	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	8,237,928,000	46,450,880,000	57,659,800,000	56,024,600,000	56,864,969,000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	6,470,000,000	8,927,000,000	9,855,000,000	15,092,000,000	15,846,600,000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	6,455,961,000	6,437,223,500	6,455,961,000	11,944,474,900	12,541,699,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	320,058,833,000	365,168,845,000	336,341,915,500	348,136,458,700	388,331,214,000
2.1.8	Belanja tidak terduga	1,000,000,000	815,608,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2.2	Belanja Langsung	786,002,242,110	778,752,343,245	781,824,918,884	1,136,030,719,190	1,114,886,376,000
2.2.1	Belanja pegawai	138,340,513,800	174,582,051,301	149,950,699,200		
2.2.2	Belanja barang dan jasa	259,780,056,745	250,399,577,877	268,022,245,134		
2.2.3	Belanja modal	387,881,671,565	353,770,714,067	363,851,974,550		
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1,937,216,565,110	1,829,099,160,912	1,861,907,718,384	2,235,762,530,790	2,273,693,493,000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, 2018

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2019 diarahkan :

1. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2019 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
- b. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan;
- c. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
- f. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-model pembiayaan tanggung renteng ;
- g. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan oleh swasta dan masyarakat seperti penerbitan obligasi daerah;

2. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2019 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan meningkatkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 s.d Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	352,974,872,610	214,495,185,983	103,649,694,649	101,824,847,324	54,644,050,000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	352,974,872,610	214,495,185,983	103,649,694,649	101,824,847,324	54,644,050,000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12,325,000,000	8,228,389,150	2,039,079,920	34,450.000.000	35,311,250,000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah	12,270,000,000	8,189,000,000	2,000,000,000	34,450,000,000	35,311,250,000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	55,000,000	-	39,079,920	-	-
3.2.4	Restitusi atas kelebihan penetapan pajak	-	39,389,150	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	340,649,872,610	206,266,796,833	101,610,614,729	67,374,847,324	19,332,800,000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	116,043,240,832	-	-	-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Rembang, 2018

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah sejatinya adalah bentuk implementasi dari tujuan strategis pembangunan daerah mengingat daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan dampak pembangunan. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan baik yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan maupun di setiap sektor sehingga akan terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tidak semua kebijakan pembangunan daerah dapat terakomodasi menjadi prioritas pembangunan daerah terkait dengan penyesuaian kemampuan anggaran daerah serta tingkat urgensi permasalahan. Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, prioritas pembangunan di tahun sebelumnya apabila telah berhasil mencapai target pada masa berikutnya memungkinkan untuk dialihkan untuk prioritas lain meskipun tetap dijaga kesinambungannya. Demikian pula terhadap kemunculan permasalahan-permasalahan baru yang perlu segera tertangani dapat diakomodasi menjadi prioritas pembangunan daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, pada setiap misi telah dituangkan program-program unggulan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Dari program-program unggulan tersebut dirumuskan pula fokus program-program prioritas yang mempunyai daya ungkit untuk mengatasi permasalahan sekaligus untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan tema pembangunan setiap tahunnya yang menjadi benang merah menuju sasaran pembangunan. Memasuki tahun IV RPJMD Tema tahun 2019 adalah **“Pemberdayaan dan pengembangan SDM menuju masyarakat yang berdaya saing, inovatif dan kreatif”**. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi V yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”, Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan

membangun pendidikan yang mudah diakses seluruh masyarakat Kabupaten Rembang dengan penekankan pendidikan karakter, mewujudkan insan terdidik yang cerdas, trampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kepastian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang. Penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial masyarakat dan peningkatan keberdayaan masyarakat Rembang.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 harus pula memperhatikan aspek keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan harus tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi arah kebijakan kepala daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun pada saat pemilihan kepala daerah. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah akan diulas kembali hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran dalam RPJMD 2016 – 2021 sekaligus penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD yang dibahas secara singkat dalam uraian berikut.

Visi/Misi Dan Tujuan/Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut: **“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”**

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagai berikut, **Masyarakat sejahtera** adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan

kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. **Semangat Kebersamaan** adalah kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. **Kewirausahaan** adalah keberanian untuk melakukan usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan,

partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran dari masing masing misi pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Misi I

Dalam melaksanakan Misi I yaitu ***“Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”*** maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam pembangunan;

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I yaitu:

- a. Terwujudnya *Good Governance*, dengan indikator sasaran:
 - 1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - 2) Rata-rata nilai SKP
 - 3) Opini Laporan Keuangan BPK
 - 4) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - 5) Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)
 - 6) Tingkat maturitas SPIP
 - 7) Tingkat kapabilitas APIP
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian visi, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
 - 2) Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
 - 3) Persentase jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu
- c. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
 - 1) Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD
- d. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
 - 1) Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan
- e. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima, dengan indikator sasaran:
 - 1) Rata-rata Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik
 - 2) Persentase Perangkat Daerah telah memiliki website aktif
 - 3) Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan
 - 4) Ketersediaan Data Pembangunan Daerah

- 5) Persentase Surat/Santel yang dikelola
- 6) Pengelolaan arsip secara baku pada PD

2. Tujuan Misi II

Dalam melaksanakan Misi II yaitu ***“Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.”***, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Membangun kemandirian ekonomi daerah;
- b. Mengurangi angka pengangguran
- c. Menurunkan angka kemiskinan;
- d. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi II yaitu:

- a. Meningkatnya kinerja sektor pertanian, dengan indikator sasaran:
 - 1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
 - 2) NTP (Nilai Tukar Petani)
 - 3) Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian
- b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, kesejahteraan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI
 - 1) Produksi ikan
 - 2) Usaha produktif keluarga nelayan
- c. Meningkatnya kinerja industri dan Perdagangan, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase pertumbuhan ekspor
 - 2) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB
 - 3) Kontribusi sektor industri pengolahan
- d. Menurunnya angka pengangguran, dengan indikator sasaran:
 - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka
- e. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase Penduduk Miskin
- f. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)

3. Tujuan Misi III

Dalam melaksanakan Misi III yaitu “**Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.**”, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III yaitu:

- a. Meningkatnya nilai Investasi, dengan indikator sasaran:
 - 1) Realisasi investasi PMA dan PMDN
- b. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif, dengan indikator sasaran:
 - 1) Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk
 - 2) Presentase koperasi aktif
 - 3) Persentase KSP/USP dan koperasi sehat
- c. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase pertumbuhan pendapatan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)
 - 2) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

4. Tujuan Misi IV

Dalam melaksanakan Misi IV yaitu “**Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan**”, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur;
- b. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu:

- a. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik;

- 2) Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.
- c. Berkurangnya rumah tidak layak huni, dengan indikator sasaran:
 - 1) persentase rumah tidak layak huni yang terbangun
- d. Berkurangnya luas kawasan kumuh, dengan indikator sasaran:
 - 1) persentase luas kawasan kumuh.
- e. Meningkatnya cakupan akses air minum, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum.
- f. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak, dengan indikator:
 - 1) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak.
- g. Meningkatnya persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau).
- h. Meningkatnya ketersediaan air baku, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase Cakupan Air Baku.
- i. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur yang memadai, dengan indikator sasaran:
 - 1) Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai;
 - 2) Persentase angkutan umum yang laik jalan;
 - 3) Persentase ketersediaan angkutan pedesaan;
 - 4) Persentase rumah tangga yang berlistrik.

5. Tujuan Misi V

Dalam melaksanakan Misi V yaitu ***“Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”***, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna dan jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Membangun Sistem Pendidikan Yang Mudah Diakses Seluruh

Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan;

c. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga.;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi V yaitu:

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran:

- 1) AKI (Angka Kematian Ibu)
- 2) AKB (Angka Kematian Bayi)
- 3) Akaba (Angka Kematian Balita)
- 4) Prevalensi Gizi Buruk

b. Meningkatnya angka rata rata lama sekolah, dengan indikator sasaran: Rata Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif, dengan indikator sasaran:

- 1) APS (Angka Partisipasi Sekolah) Umur 7 – 12 tahun
- 2) APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 – 15 tahun
- 3) APK PAUD (Umur 3 – 6 tahun)

d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, dengan indikator sasaran:

- 1) Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik;

e. Meningkatnya potensi pemuda dan prestasi olahraga, dengan indikator sasaran:

- 1) Persentase organisasi kepemudaan yang dibina;
- 2) Jumlah medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan nasional

6. Tujuan Misi VI

Dalam melaksanakan Misi VI yaitu ***“Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.”***, maka tujuan yang ditetapkan

adalah:

- a. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak;
- d. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu;
- e. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VI yaitu:

- a. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator sasaran: Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk; Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, dengan indikator sasaran: Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres dan Pileg serta Pilgub.
- c. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS, dengan indikator sasaran: Persentase PMKS yang ditangani.
- d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, dengan indikator sasaran:
 - 1) Indeks Pembangunan Gender
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender
 - 3) Rasio KDRT
 - 4) Cakupan pemenuhan hak anak
 - 5) Cakupan desa ramah anak
 - 6) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah
 - 7) Posyandu aktif

- 8) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
- 9) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa
- e. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
- f. Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase pertumbuhan penduduk
 - 2) Cakupan peserta KB aktif;
 - 3) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO);
 - 4) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49;
 - 5) Cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)
- g. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase penduduk ber-KTP.;
 - 2) Persentase bayi ber-akte kelahiran.

7. Tujuan Misi VII

Dalam melaksanakan Misi VII yaitu ***“Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.”***, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan;
- b. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VII yaitu:

- a. Meningkatnya kemandirian dalam ketersediaan pangan, akses, kelancaran distribusi dan keamanan pangan, dengan indikator sasaran:
 - 1) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

- 2) skor PPH;
- b. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator sasaran:
 - 1) Pengeluaran konsumsi rumahtangga;
- c. Meningkatnya kontribusi produksi hasil pertanian dan perikanan pada ekonomi rumah tangga, dengan indikator sasaran:
 - 1) Indeks Produksi pertanian
 - 2) Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang

Berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat selama masa reses DPRD Kabupaten Rembang telah terinventarisasi sejumlah persoalan pembangunan daerah yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran sebagai berikut:

- a. Pertanian masih merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Rembang dengan serapan tenaga kerja terbesar dibanding sektor-sektor lain. Mendorong kembali pertumbuhan sektor pertanian mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dan sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan mengingat masyarakat miskin mayoritas berada di sektor pertanian. Upaya merevitalisasi kondisi usahatani di Kabupaten perlu disokong dengan peningkatan kondisi infrastruktur pertanian berupa pembangunan jalan pertanian dan jalan usahatani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Pada aspek budidaya pertanian diperlukan modernisasi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Demikian pula dalam pengembangan peternakan diperlukan upaya peningkatan populasi ternak pada kelompok-kelompok usaha peternakan yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.
- b. Peningkatan layanan pendidikan dasar harus tetap menjadi fokus perhatian kebijakan pembangunan Kabupaten Rembang. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai memerlukan penanganan yang terus menerus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman untuk proses belajar mengajar terutama di tingkat SD, TK dan PAUD. Disamping itu kelengkapan sarana prasarana belajar juga tidak boleh terabaikan terutama untuk menunjang kegiatan

pembelajaran di tingkat SMP. Kegiatan pembelajaran juga perlu didorong melalui keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai prakarsa masyarakat untuk meningkatkan kesempatan warga masyarakat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan.

- c. Kondisi infrastruktur jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Rembang yang mengalami kerusakan perlu segera mendapat penanganan agar tidak semakin parah dan menghambat aktivitas transportasi masyarakat maupun budidaya pertanian. Oleh karenanya perlu segera dilakukan kegiatan rehabilitasi pada poros jalan maupun jaringan irigasi di sejumlah tempat yang sedang mengalami kerusakan. Disamping masalah kerusakan, konstruksi pengaman jalan juga perlu dibangun secara bersamaan untuk tujuan meningkatkan umur teknis bangunan utamanya melalui perkuatan tebing jalan dan saluran drainase jalan
- d. Dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di sejumlah tempat di Kabupaten Rembang, dipandang perlu untuk meningkatkan penyediaan prasarana dasar air bersih (PAB) serta penataan jalan lingkungan, guna mewujudkan kualitas pemukiman yang lebih layak. Sementara melihat kondisi sejumlah besar keluarga miskin yang masih tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH), maka penanganan persoalan RTLH harus menjadi komitmen bersama baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.
- e. Sejalan dengan tema pembangunan 2019 yang terfokus pada pembangunan manusia, maka kebijakan pembangunan juga menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat di bidang sosial kemasyarakatan, kesiagaan bencana serta sektor ekonomi masyarakat.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2019 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Berpijak pada isu strategis pembangunan serta hasil evaluasi terhadap hasil capaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, maka pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2019 diarahkan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang berlandaskan pada sumberdaya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, maka prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, dengan fokus:

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal, Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, Optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di jenjang pendidikan dasar dengan fokus pada penguatan dan adopsi nilai-nilai budaya lokalitas dalam kurikulum dan manajemen sekolah, meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang berperan dalam pembangunan, Penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang, Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana olahraga. Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup pendidikan gratis bagi keluarga tidak mampu sampai jenjang SLTA, memberikan beasiswa di Perguruan Tinggi bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, memperkuat kelembagaan satuan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, DIKTI/AKN), meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.

b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan fokus:

Meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar, meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi penyelesaian masalah kesehatan, serta meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan

edukasi promotif dan preventif hidup sehat. Prioritas pembangunan tahun 2019 Meningkatkan status puskesmas rawat inap menjadi BLUD Meningkatkan pelayanan oleh dokter spesialis di puskesmas, membangun Sistem Informasi Kesehatan Daerah Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, menurunkan AKI dan AKB melalui deteksi dan penatalaksanaan risiko tinggi pada ibu dan anak, penanganan prevalensi balita *stunting* serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan gizi dan kesehatan lingkungan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

c. Penurunan Angka Kemiskinan, dengan fokus:

Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di kantong-kantong kemiskinan serta pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Prioritas pembangunan tahun 2019 adalah peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan padat karya perdesaan, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dengan memperbaiki data rumah tangga miskin, penyediaan akses kebutuhan dasar yg layak bagi keluarga miskin, pengembangan kemitraan dengan swasta dan lembaga lainnya dalam penanganan PMKS dan RTLH serta pendampingan pemberdayaan masyarakat di desa merah dengan pendampingan OPD terkait.

d. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dengan fokus:

Menggairahkan dinamika perekonomian Kabupaten Rembang melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rumah tangga yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga serta menyerap tenaga kerja. Bidang pertanian dan perikanan mencakup upaya revitalisasi pertanian melalui pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian, pengembangan perikanan budidaya secara intensif, pengembangan pola nafkah ganda bagi nelayan kecil serta peningkatan pelayanan TPI secara Terpadu. Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dengan mengembangkan kawasan sentra komoditi unggulan serta pembangunan PPI Sarang.

Bidang Perdagangan mencakup peningkatan ketersediaan, standarisasi perdagangan dan perlindungan konsumen, peningkatan fasilitas perdagangan dengan pengembangan pasar tradisional serta peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran. Prioritas pembangunantahun 2019 pembangunan pasar Kota Rembang, pembangunan pasar-pasar desa dan pengembangan BUMDes dan kemitraannya. Bidang industri Pengembangan industri skala kecil dan menengah, peningkatan promosi dan kemitraan investasi, peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi, revitalisasi peran koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat serta peningkatan fasilitasi, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif. Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup pengembangan industri rumah tangga, inkubator bisnis, kube, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, pengembangan Kawasan Industri Rembang, serta meningkatkan kemudahan berusaha melalui pengembangan sistem layanan perijinan dan investasi, kemudahan akses permodalan, penguatan kemitraan.

Bidang pariwisata mencakup peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata unggulan yang didukung kualitas SDM pariwisata. Prioritas pembangunantahun 2019 mencakup meningkatkan daya saing wisata melalui pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan memperbaiki aksesibilitas, amenitas, atraksi serta aktivitas untuk mendorong lama tinggal kunjungan wisata dan belanja wisatawan, pengembangan ekonomi kreatif melalui pertunjukan interaktif festival, revitalisasi kawasan kota pusaka dan wisata kecamatan Lasem, meningkatkan akses jalan menuju destinasi wisata serta meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan pariwisata.

e. Perluasan Kesempatan Kerja, dengan fokus:

Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja. Prioritas pembangunan tahun 2019 akan diupayakan dengan mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui peningkatan ketrampilan kewirausahaan kaum muda, penguatan

penyelenggaraan diklat vokasi, kerjasama dengan dunia usaha, mendorong perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi implementasi sistem informasi pencari kerja online serta meningkatkan produktivitas teknologi melalui pemanfaatan iptek dan hasil inovasi.

f. Kualitas Infrastruktur, dengan fokus:

Penyediaan infrastruktur dalam kondisi baik untuk menunjang aktivitas perekonomian dan pengembangan usaha di Kabupaten Rembang, penanganan Rumah Tidak Layak Huni serta peningkatan infrastruktur pariwisata pada destinasi pariwisata unggulan, serta pembangunan jaringan irigasi dan air minum berbasis embung, sungai, sumur bawah tanah yang disambungkan dengan instalasi pengolahan air. Prioritas pembangunan tahun 2019 adalah meningkatkan infrastruktur jalan dengan mendukung pembangunan jalan lingkar luar Rembang-Lasem, perbaikan dan peningkatan jalan, meningkatkan pengembangan jaringan irigasi, pengembangan sumber-sumber air baku untuk mendukung penyediaan air bersih dan irigasi pertanian, menyediakan akses hunian yang layak, meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman, menyediakan akses infrastuktur dasar yang layak, pembangunan sarana pasarana air bersih bagi masyarakat, penataan kota dengan pembuatan tugu perbatasan barat dan timur, penataan trotoar dan drainase, penataan stadion Krida Rembang, serta penambahan luasan RTH di kawasan perkotaan.

g. Perwujudan *Good Governance*, dengan fokus:

Meningkatkan budaya kerja aparatur yang berintegritas dan berkinerja tinggi, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) dan Standar operasional Prosedur serta Strandar Pelayanan Publik yang tepat fungsi dan konsisten, meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan perundang-undangan / tertib regulasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah, meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif, mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan penerapan open government

dengan fokus pada publikasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah, pelaporan kinerja instansi pemerintah, dan layanan informasi, penguatan sistem dan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi Pemerintah serta meningkatkan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup implementasi E-government dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan SIP@NDU, SIM online, Perijinan Online, SIMPELBANG, Si Harga, e-sakip, website OPD, meningkatkan standar pengukuran kinerja pegawai, menerapkan penilaian kinerja berbasis online serta memacu inovasi OPD melalui pemberian reward OPD terinovatif.

Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Rembang

a. Kondisi Pengembangan Wilayah Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang menjadi bagian dari pengembangan wilayah Banglor bersama dengan Kabupaten Blora. Potensi dan unggulan wilayah Kabupaten Rembang mencakup industri unggulan batik, garam; klaster genteng dan batu bata, garam rakyat, gula tumbu, batik tulis Lasem, bordir dan konveksi Kecamatan Sedan, mangga, pengolahan hasil perikanan; serta destinasi wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini dan Wana Wisata Mantingan. Arah pengembangan wilayah difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, ditunjang oleh koridor perkotaan Rembang-Lasem. Sedangkan PKL wilayah Banglor meliputi Rembang, dan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah Banglor adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Arah pengembangan sektor unggulan dilakukan dalam wadah kerjasama perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang disebut sebagai regionalisasi Ratubangnegoro (Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro). Sedangkan fokus pengembangan wilayah Banglor adalah pengembangan industri pertambangan dan kehutanan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana

tertuang dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terbagi menjadi tiga yaitu utara, tengah dan selatan. Pembagian tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik wilayahnya. Wilayah utara merupakan wilayah pesisir pantai yang pengembangannya diarahkan untuk sektor perikanan dan kelautan. Wilayah tengah dan selatan diarahkan untuk pengembangan potensi pertanian. Isu utama dalam pembangunan di Kabupaten Rembang adalah tingginya tingkat kemiskinan serta disparitas (kesenjangan) antar wilayah. Pembangunan ke depan diharapkan dapat menekan tingkat kesenjangan tersebut sehingga visi Kabupaten Rembang dapat semakin cepat terwujud. Kesenjangan tersebut dapat dinilai dari capaian indikator pembangunan masing-masing kecamatan. Capaian indikator pembangunan tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia. Tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat dari jumlah kepala rumah tangga usia 18-59 tahun yang tidak bekerja.

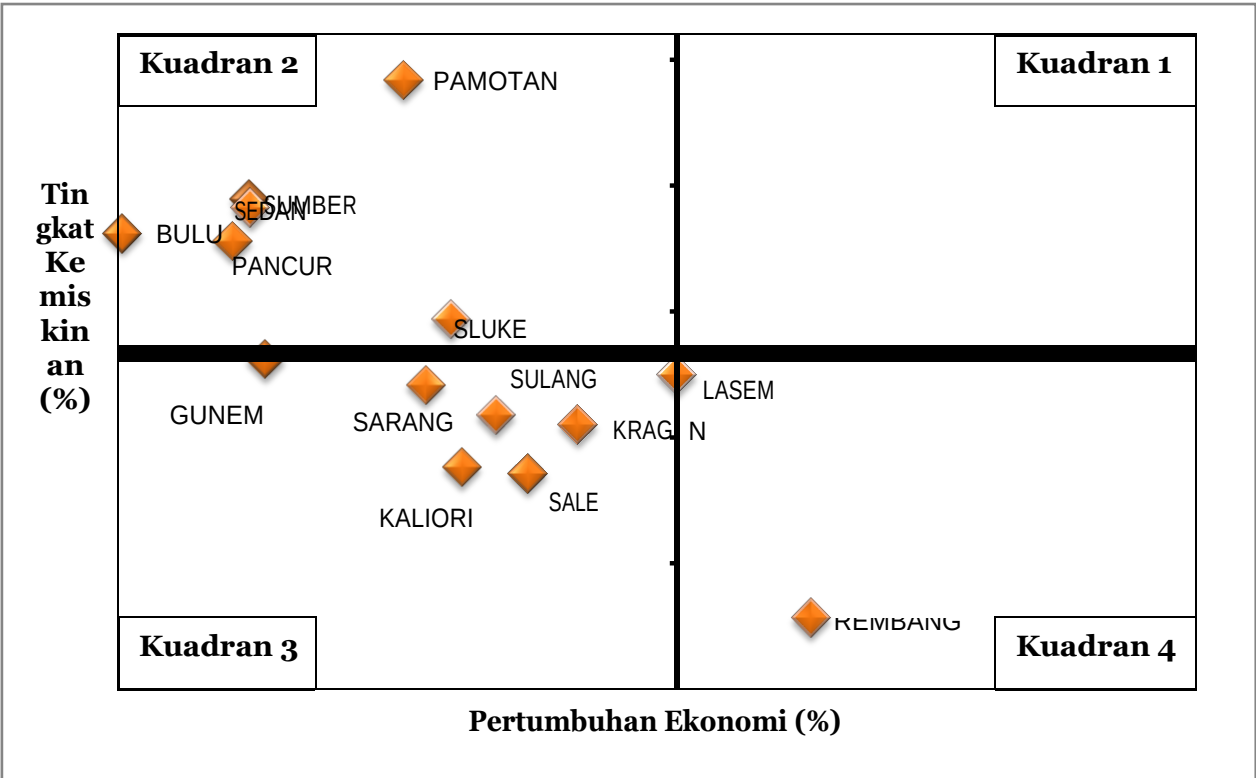
Hasil capaian tersebut apabila disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat kesenjangan yang terjadi antar wilayah. Hasil persandingan tersebut membagi kecamatan menjadi 4 kuadran. Pendekatan perencanaan pembangunan disesuaikan dengan masing-masing kuadran tersebut sehingga kesenjangan antar wilayah semakin berkurang. Gambaran persandingan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan

Persandingan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang, meliputi :

- a) Kuadran 1 yaitu kecamatan yang tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten. Hasil persandingan tersebut menyatakan bahwa tidak ada kecamatan yang pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinannya berada di atas kabupaten.
- b) Kuadran 2 yaitu kecamatan yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari Kabupaten dan pertumbuhan ekonominya berada di bawah kabupaten. Terdapat 6 kecamatan yang masuk dalam kuadran ini yaitu Kecamatan Pamotan,

- Kecamatan Sumber, Kecamatan Sedan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Sluke.
- c) Kuadran 3 yaitu kecamatan yang tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonominya berada di bawah Kabupaten Rembang. Kuadran tiga ini meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Sulang, Kecamatan Sarang, Kecamatan Gunem, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sale dan Kecamatan Kaliori.
- d) Kuadran 4 yaitu kecamatan yang tingkat kemiskinannya berada di bawah kabupaten dan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Hanya dua kecamatan yang berada di kuadran 2 yaitu Kecamatan Rembang yang merupakan ibukota Kabupaten Rembang dan Kecamatan Lasem. Kecamatan Lasem sendiri merupakan *sister city* dari Kecamatan Rembang dengan status Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp).



Sumber : BPS dan SPKD, 2017 (diolah)

Gambar 4.1
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rembang

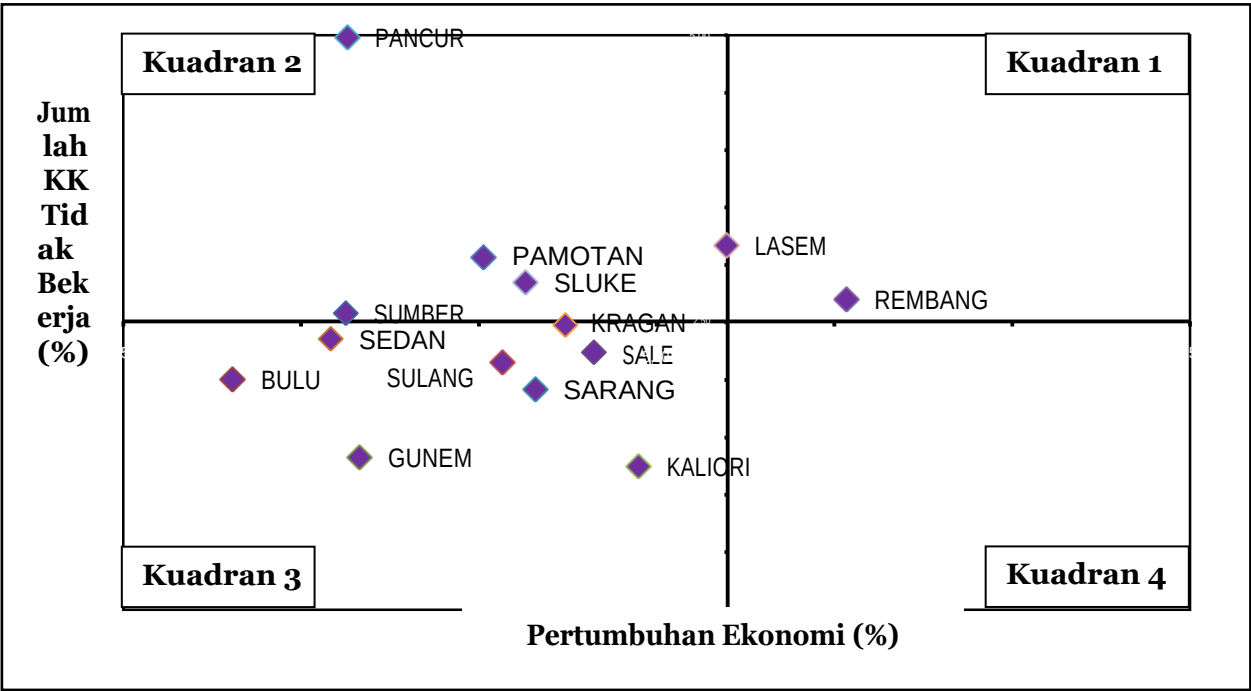
Dari hasil persandingan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak ada kecamatan yang berada di kuadran 1 yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan lebih

tinggi dari kabupaten.

2. Pertumbuhan ekonomi dengan jumlah kepala rumah tangga yang tidak bekerja

Pada tingkat kabupaten tersedia data tingkat pengangguran terbuka yang merupakan indikasi dari usia produktif yang bekerja. Hal tersebut diperlukan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu wilayah serta acuan dalam pembukaan lapangan kerja. Dikarenakan tidak tersedianya data tersebut di tingkat kecamatan, maka untuk melihat hal tersebut dilihat dari data jumlah kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Dari hasil persandingan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah kepala rumah tangga yang tidak bekerja, Kabupaten Rembang terbagi menjadi :

- a) Kuadran 1 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonomi dan jumlah KK yang tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Rembang. Hasil persandingan tersebut menyatakan bahwa Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem termasuk dalam kuadran 1.
- b) Kuadran 2 yaitu kecamatan yang pertumbuhannya berada di bawah kabupaten dan jumlah KK yang tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Rembang. Terdapat 4 kecamatan yang masuk dalam kuadran ini yaitu Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sumber, Kecamatan Pancur dan Kecamatan Sluke.
- c) Kuadran 3 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonomi dan jumlah KK yang tidak bekerja berada di bawah Kabupaten Rembang. Kuadran tiga ini meliputi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Sulang, Kecamatan Sarang, Kecamatan Gunem, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kaliori.
- d) Kuadran 4 yaitu kecamatan yang pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan kabupaten dan jumlah KK yang tidak bekerja lebih rendah dari Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang tidak ada kecamatan yang termasuk dalam kuadran 4 ini.



Sumber : BPS dan SPKD, 2017 (diolah)

Gambar 4.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Kepala Keluarga yang Tidak Bekerja di Kabupaten Rembang

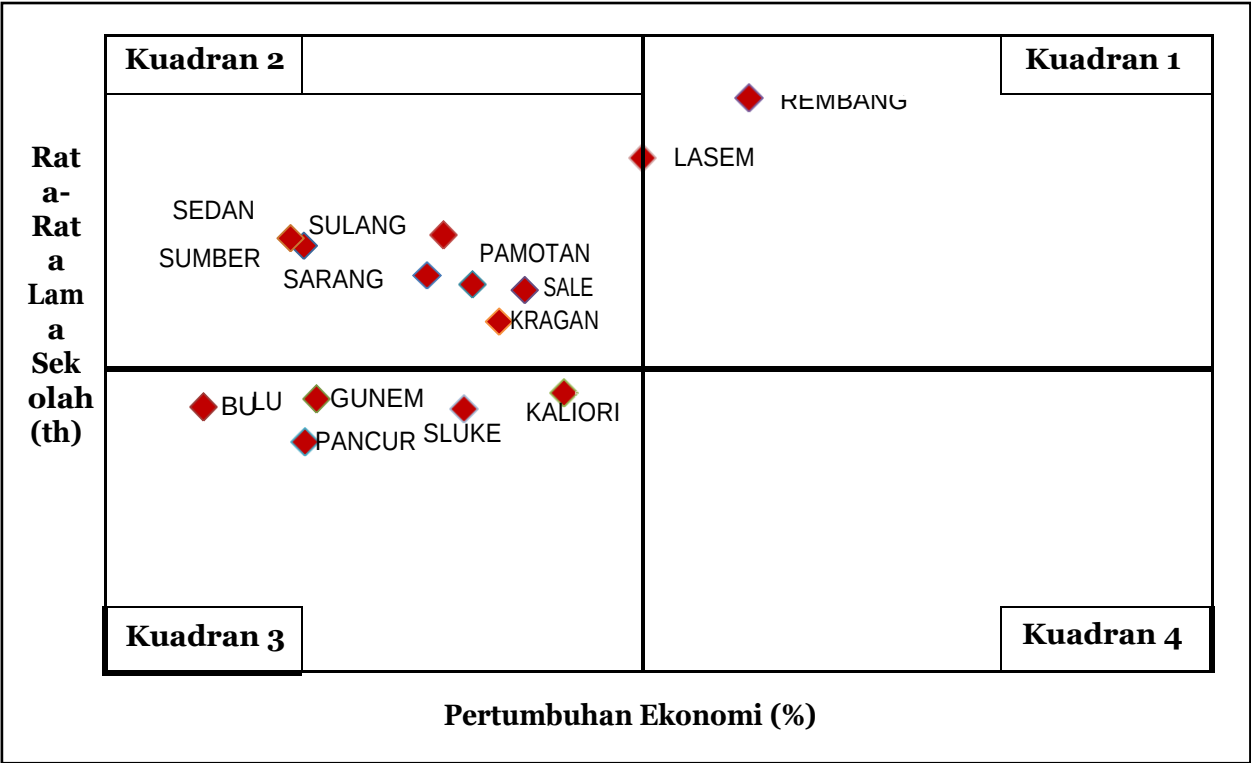
Dari hasil persandingan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah KK yang tidak bekerja dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan ketersediaan kesempatan kerja. Terdapat kecamatan yang pertumbuhan ekonominya rendah namun kesempatan kerja cukup tinggi dilihat dari jumlah KK yang tidak bekerja cukup rendah.

3. Pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata lama sekolah

Hasil persandingan antara pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi sebagian besar kecamatan lebih rendah dari kabupaten namun rata-rata lama sekolah di sembilan kecamatan justru lebih tinggi dari kabupaten. Hal tersebut menunjukan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Rembang cukup tinggi. Hasil persandingan tersebut sebagaimana gambar di bawah terbagi menjadi:

- a) Kuadran 1 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Rembang. Hasil persandingan tersebut menyatakan bahwa Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem termasuk dalam kuadran 1.

- b) Kuadran 2 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonominya berada di bawah kabupaten dan rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Rembang. Terdapat 7 kecamatan yang masuk dalam kuadran ini yaitu Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sulang, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sale.
- c) Kuadran 3 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah berada di bawah Kabupaten Rembang. Kuadran tiga ini meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke, Kecamatan Gunem, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kaliori.
- d) Kuadran 4 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan kabupaten dan rata-rata lama sekolah lebih rendah dari Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang tidak ada kecamatan yang termasuk dalam kuadran 4 ini.



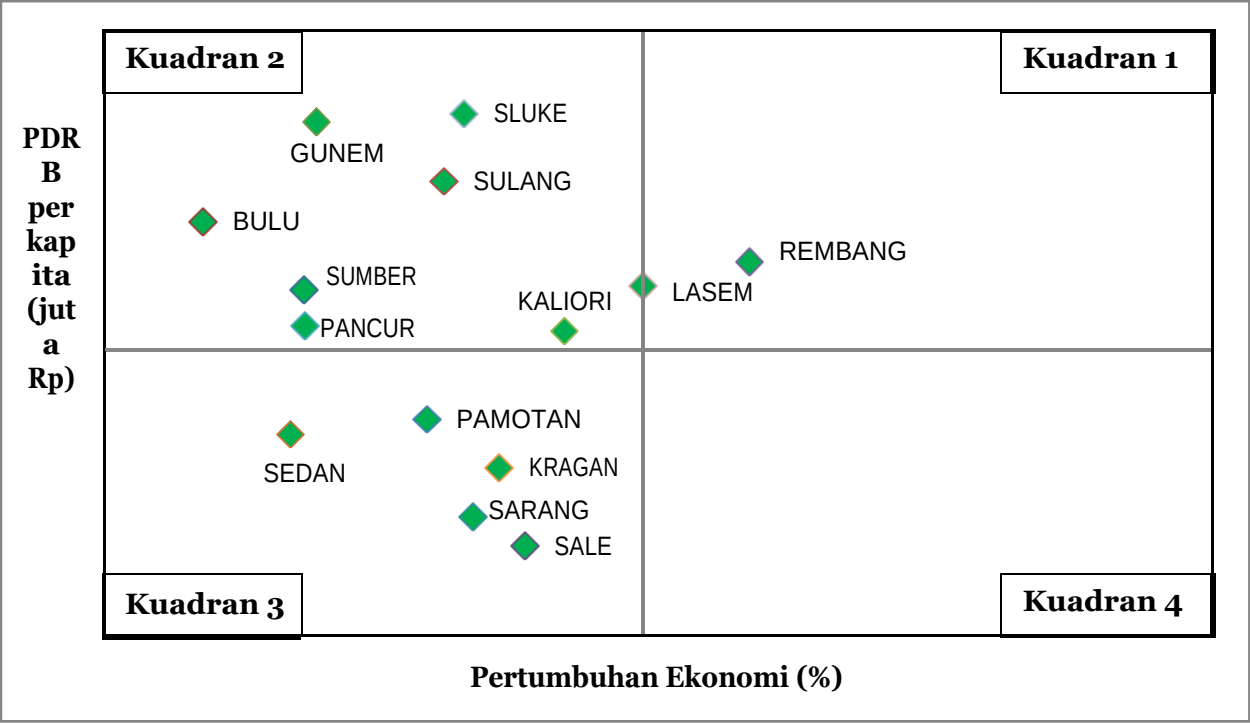
Sumber : BPS, 2017 (diolah)

Gambar 4.3
Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah
di Kabupaten Rembang

4. Pertumbuhan ekonomi dengan PDRB per kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak berarti pendapatan masyarakatnya juga tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil persandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan PDRB per kapita di Kabupaten Rembang. Kecamatan Sluke dan Kecamatan Ginem yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari kabupaten ternyata pendapatan per kapita masyarakatnya termasuk dalam pendapatan terbesar di Kabupaten Rembang. Hasil persandingan antara pertumbuhan penduduk dan PDRB per kapita tersebut mengelompokkan kecamatan di Kabupaten Rembang menjadi :

- a) Kuadran 1 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Rembang. Hasil persandingan tersebut menyatakan bahwa Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem termasuk dalam kuadran 1.
- b) Kuadran 2 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonominya berada di bawah kabupaten dan PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Rembang. Terdapat 7 kecamatan yang masuk dalam kuadran ini yaitu Kecamatan Gunem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sluke, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Pancur.
- c) Kuadran 3 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita berada di bawah Kabupaten Rembang. Kuadran tiga ini meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Kragan, kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale.
- d) Kuadran 4 yaitu kecamatan yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan kabupaten dan PDRB per kapita lebih rendah dari Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang tidak ada kecamatan yang termasuk dalam kuadran 4 ini.



Sumber : BPS dan SPKD, 2017 (diolah)

Gambar 4.4
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita di Kabupaten Rembang

b. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Rembang

Kondisi pengembangan wilayah tersebut menggambarkan bahwa kawasan pesisir Kabupaten Rembang berkembang lebih cepat daripada kawasan lainnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Rembang. Di samping kesenjangan (disparitas), tingginya tingkat kemiskinan juga menjadi masalah utama dalam pengembangan dan pembangunan wilayah di Kabupaten Rembang. Konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Rembang.

Sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan) menjadi kerangka utama dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang. Prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang (Brundtland, 1987). Pembangunan berkelanjutan tersebut memadukan tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagaimana tema RKPD tahun 2019 sekaligus permasalahan utama yang ada di Kabupaten Rembang maka aspek sosial menjadi sorotan utama dalam pengembangan wilayah kabupaten Rembang. Aspek fisik berupa pembangunan

infrastruktur diarahkan untuk mendukung ketiga aspek sustainable development diatas.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Rembang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing kecamatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah harus memperhatikan kondisi lingkungan wilayah tersebut. Diutamakan pertumbuhan ekonomi dapat memberdayakan masyarakat lokal, berbasis potensi lokal serta difokuskan pada industri serta usaha yang berbasis desa. Selain itu peningkatan minat dan iklim investasi di Kabupaten Rembang juga diperlukan untuk menambah kesempatan kerja bagi masyarakat.

1. Tujuan Pengembangan Wilayah

Tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah mewujudkan kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Perumusan tujuan tersebut tidak lepas dari karakteristik wilayah Kabupaten Rembang yang mempunyai panjang pantai sekitar 63 km. Di samping itu Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur juga merupakan pintu gerbang yang diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian Jawa Tengah bagian timur.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Rembang, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Rembang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, meliputi:

- a) pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan;
- b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- d) pengembangan potensi sektor industri;

- e) pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
- g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi yang ditempuh meliputi :

- a) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan meliputi:
 - 1) mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - 2) mengembangkan kawasan agropolitan;
 - 3) mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - 4) mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- b) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
 - 1). mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - 2). mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - 3). mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - 4). mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - 5). mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - 6). mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - 7). menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - 8). mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - 9). mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - 10). mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan

prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.

- c) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan meliputi:
 - 1) mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - 2) mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3) merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - 4) mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- d) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi:
 - 1) mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - 2) membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - 3) mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- e) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi:
 - 1) mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - 2) mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - 3) mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - 4) mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - 5) mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - 6) mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- f) Strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan meliputi:
 - 1) melestarikan kawasan hutan lindung;
 - 2) melestarikan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;

- 3) melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan
 - 4) mengelola kawasan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- g) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
- 1) mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - 4) turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Pertanian masih menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kabupaten Rembang walaupun kecenderungannya semakin menurun. Potensi pertanian di Kabupaten Rembang terletak di wilayah tengah dan selatan yaitu Kecamatan Sulang, Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan. Semua kecamatan tersebut pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten. Sebagian kecamatan tingkat kemiskinan dan PDRB per kapitanya lebih tinggi dari kabupaten, hal tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Pancur. Untuk mengoptimalkan sektor pertanian tersebut perlu ditempuh strategi pengembangan wilayah yang berbasis desa yaitu dengan pengembangan produk unggulan desa. Sedangkan untuk peningkatan pemasaran hasil pertanian maka perlu dikembangkan kawasan agropolitan dengan pusat kawasan agropolitan sebagaimana rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang ada di Kecamatan Sulang

dan Kecamatan Pamotan.

Selain pengembangan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan juga perlu di dukung pengembangan perekonomiannya dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Di lihat dari kondisi pengembangan wilayah pada subbab sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta menambah kesempatan kerja masyarakat. Dari hasil analisa data ditemukan bahwa jumlah Kepala Keluarga yang tidak bekerja di Kecamatan Rembang sangat tinggi. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu strategi yang tepat uuntuk meningkatkan daya saing Kabupaten Rembang terutama kaitannya dengan menarik minat investor untuk berusaha di Kabupaten Rembang. Salah satunya dengan pembangunan Kawasan Industri Rembang yang juga termasuk dalam rencana strategis Propinsi Jawa Tengah. Pengembangan industri tersebut diharapkan yang berbasis padat karya sehingga dapat memberdayakan masyarakat Rembang secara optimal.

Inovasi Kebijakan

a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang yang termasuk kategori kronis tidak dapat ditanggulangi dengan cara-cara konvensional. Paradigma kebijakan pemberian bantuan social kepada kelompok masyarakat miskin harus dirubah menjadi kebijakan yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Mengingat target RPJMD untuk penurunan persentase kemiskinan yang cukup drastis maka upaya pengentasan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui langkah-langkah akselerasi sebagai berikut:

- Memperkuat pendampingan lintas OPD pada desa kategori merah telah menjadi keputusan Bupati Rembang sebagaimanasurat keputusan No.050/1538/2017 tentang penetapan desa prioritas.
- Mengarahkan belanja daerah pada kegiatan padat karya disektor-sektor lapangan usaha yang menjadi kantong kemiskinan.
- Memperluas penanganan kemiskinan melalui *personal sosial responsibility* melalui kemitraan dengan lembaga Baznas maupun program keperdulian sosial kepada kelompok masyarakat rentan kemiskinan.

- Meningkatkan komitmen dalam penanganan RTLH 10 unit per desa melalui anggaran APBDes dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati No.141/0100/2017 Tanggal 15 Januari 2017.
- Pemberian CSR untuk modal masyarakat dari perusahaan-perusahaan.
- Pemberian bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan kategori desa sebagaimana Perbub Nomer 19 tahun 2017.

b. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan

Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan penganggaran terpadu (Sip@ndu) dalam penyusunan dokumen RKPD. Keunggulan dan spesifikasi aplikasi Sip@ndu adalah sebagai berikut:

- Aplikasi Sip@ndu telah mengintegrasikan seluruh tahapan dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi, yang dimulai baik dari RPJMD dan Renstra yang kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan mulai dari Musrenbang, Forum PD, Renja, RKPD, KUA PPAS, RKA, DPA, serta Penatausahaan Keuangan. Saat ini Bappeda Kabupaten Rembang tengah menyempurnakan seluruh modul aplikasi termasuk mengintegrasikan modul Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD dan Evaluasi Renja hingga informasi spasial.
- Dari Aplikasi Sip@ndu dapat diketahuitransparansi usulan pada setiap tahapan, yaitu mulai Musrenbang Kecamatan, Pokok-pokok pikiran DPRD, Forum Perangkat Daerah, Rancangan Renja, Musrenbang Kabupaten sampai dengan tersusunnya Rancangan akhir RKPD. Pada seluruh tahapan tersebut dapat dilakukan penelusuran kembali apakah usulannya disetujui atau tidak pada tahap di atasnya. Usulan-usulan yang belum dapat diakomodasi pada tahapan di atasnya akan dimasukkan ke daftar prioritas kedua. Melalui mekanisme ini maka dapat dipastikan hampir seluruh usulan kegiatan baik melalui Musrenbang maupun usulan kepentingan stakeholder dapat diakomodasi dalam RKPD Tahun 2019.

c. One map infrastruktur

Aplikasi sistem informasi ini akan menyatukan semua jenis infrastruktur dalam satu aplikasi serta terintegrasi dengan sistem

perencanaan dan penganggaran terpadu (Sip@ndu). Dengan demikian dapat meminimalisasi penanganan infrastruktur yang sama pada beberapa tahun anggaran, untuk pemerataan pembangunan. Aplikasi ini dapat diakses langsung oleh masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur diwilayahnya, yang selanjutnya dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2019 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2019 juga dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang dengan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah/Fokus	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal, Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, Optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di jenjang pendidikan dasar dengan fokus pada penguatan dan adopsi nilai-nilai budaya lokalitas dalam kurikulum dan manajemen sekolah, meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang berperan dalam pembangunan, Penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang, Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana olahraga. Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup pendidikan gratis bagi keluarga tidak mampu sampai jenjang SLTA, memberikan beasiswa di Perguruan Tinggi bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, memperkuat kelembagaan satuan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, DIKTI/AKN), meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Kualitas hidup dan daya saing SDM
2.	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar, meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi penyelesaian		

		masalah kesehatan, serta meningkatkan promosi komunikasi, informasi dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat. Prioritas pembangunan tahun 2019 Meningkatkan status puskesmas rawat inap menjadi BLUD Meningkatkan pelayanan oleh dokter spesialis di puskesmas, membangun Sistem Informasi Kesehatan Daerah Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta serta meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.		
3.	Penurunan Angka Kemiskinan	Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di kantong-kantong kemiskinan serta pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Prioritas pembangunan tahun 2019 adalah penyaluran bantuan sosial tepat sasaran (memperbaiki data rumah tangga miskin), penyediaan akses kebutuhan dasar yg layak bagi keluarga miskin, pengembangan kemitraan dengan swasta dan lembaga lainnya (Penanganan PMKS dan RTLH) serta pendampingan pemberdayaan masyarakat di desa merah dengan pendampingan OPD terkait.		Penanggulangankemiskinan
4.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Menggairahkan dinamika perekonomian Kabupaten Rembang melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rumah tangga yang mampu menyerap tenaga kerja. Bidang pertanian dan perikanan mencakup upaya revitalisasi pertanian melalui pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian, pengembangan perikanan budidaya secara intensif, pengembangan pola nafkah ganda bagi nelayan kecil serta peningkatan pelayanan TPI secara Terpadu. Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	Penguatan daya saing ekonomid daerah Ketahanan pangan dan energi

		upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dengan mengembangkan kawasan sentra komoditi unggulan serta pembangunan PPI Sarang. Bidang Perdagangan mencakup peningkatan ketersediaan, standarisasi perdagangan dan perlindungan konsumen, peningkatan fasilitas perdagangan dengan pengembangan pasar tradisional serta peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran. Prioritas pembangunan tahun 2019 pembangunan pasar Kota Rembang, pembangunan pasar-pasar desa dan pengembangan BUMDes dan kemitraannya. Bidang industri Pengembangan industri skala kecil dan menengah, peningkatan promosi dan kemitraan investasi, peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi, revitalisasi peran koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat serta peningkatan fasilitasi, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif. Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup pengembangan industri rumah tangga, inkubator bisnis, kube, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, pengembangan Kawasan Industri Rembang, serta meningkatkan kemudahan berusaha melalui pengembangan sistem layanan perijinan dan investasi, kemudahan akses permodalan, penguatan kemitraan. Bidang pariwisata mencakup peningkatan aksesibilitas, amenities, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata unggulan yang didukung kualitas SDM pariwisata. Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup meningkatkan daya saing wisata melalui pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan memperbaiki aksesibilitas, amenities, atraksi serta aktivitas untuk mendorong lama tinggal kunjungan wisata dan belanja wisatawan, pengembangan ekonomi kreatif melalui pertunjukan interaktif festival, revitalisasi kawasan kota pusaka dan wisata kecamatan Lasem, meningkatkan akses jalan menuju destinasi wisata		
--	--	--	--	--

		serta meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan pariwisata		
5.	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja. Prioritas pembangunan tahun 2019 akan diupayakan dengan mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui peningkatan ketrampilan kewirausahaan kaum muda, penguatan penyelenggaraan diklat vokasi, kerjasama dengan dunia usaha, mendorong perluasan kesempatan kerja melalui optimalisasi implementasi sistem informasi pencari kerja online serta meningkatkan produktivitas teknologi melalui pemanfaatan iptek dan hasil inovasi		
6.	Kualitas Infrastruktur	Penyediaan infrastruktur dalam kondisi baik untuk menunjang aktivitas perekonomian dan pengembangan usaha di Kabupaten Rembang, penanganan Rumah Tidak Layak Huni serta peningkatan infrastruktur pariwisata pada destinasi pariwisata unggulan, serta pembangunan jaringan irigasi dan air minum berbasis embung, sungai, sumur bawah tanah yang disambungkan dengan instalasi pengolahan air. Prioritas pembangunan tahun 2019 adalah meningkatkan infrastruktur jalan dengan mendukung pembangunan jalan lingkaran luar Rembang-Lasem, perbaikan dan peningkatan jalan, meningkatkan pengembangan jaringan irigasi, pengembangan sumber-sumber air baku untuk mendukung penyediaan air bersih dan irigasi pertanian, menyediakan akses hunian yang layak, meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman, menyediakan akses infrastruktur dasar yang layak, pembangunan sarana pasar air bersih bagi masyarakat, penataan kota dengan pembuatan tugu perbatasan barat dan timur, penataan trotoar dan drainase,	Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Koordinasi dan Kerjasama	Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup Kesenjangan wilayah

		penataan stadion Krida Rembang, serta penambahan luasan RTH di kawasan perkotaan.		
7.	Perwujudan <i>Good Governance</i>	Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) dan Standar operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Publik yang tepat fungsi dan konsisten, meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan perundang-undangan / tertib regulasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah, meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif, mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan penerapan open government dengan fokus pada publikasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah, pelaporan kinerja instansi pemerintah, dan layanan informasi, penguatan sistem dan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi Pemerintah serta meningkatkan kualitas manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah. Prioritas pembangunan tahun 2019 mencakup implementasi E-government dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan SIP@NDU, SIM online, Perijinan Online, SIMPELBANG, Si Harga, e-sakip, website OPD, meningkatkan standar pengukuran kinerja pegawai, menerapkan penilaian kinerja berbasis online serta memacu inovasi OPD melalui pemberian reward OPD terinovatif.	StabilitasKeamanan Nasionaldan KesuksesanPemilu.	Tatakelolapemerintahan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Rembang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Rembang tahun ke empat, maupun untuk pemenuhan standar layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasar kan akumulasi standar belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2019. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program-program yang menjadi prioritas pada tahun 2019 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dijabarkan kedalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana rincian penjelasan berikut.

Urusan Wajib Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Fokus program pada urusan Pendidikan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi APK PAUD, APS usia 7-12 th, APS usia 13-15 th, persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, RLS dan HLS. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)
- c. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f. Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah
- g. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- h. Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal

2. Kesehatan

Fokus program pada urusan Kesehatan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi AKI, AKB, Akaba, serta Prevalensi gizi buruk. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular
- i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
- k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita
- m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- n. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- o. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan
- p. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas
- q. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
- r. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019

yang meliputi meliputi persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik, persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik, jumlah pusat pertumbuhan baru, persentase RTH dan persentase akses irigasi dalam kondisi baik. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- f. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- g. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- h. Program pembangunan sistem informasi irigasi
- i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- j. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- k. Program penyediaan dan pengolahan air baku
- l. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- m. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- n. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- o. Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah
- p. Program pembinaan jasa konstruksi
- q. Program perencanaan tata ruang
- r. Program pengendalian pemanfaatan ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Fokus program pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi persentase luas kawasan kumuh, persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum, persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi layak, persentase cakupan air baku, serta persentase RTLH yang tertangani. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program lingkungan sehat perumahan

- b. Program pengembangan perumahan
 - c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - d. Program pengelolaan areal pemakaman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**
- Fokus program pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi rasio linmas per 1000 penduduk, Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih, cakupan penegakan perda dan perkada, serta program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
 - d. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - e. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - f. Program Penegakan Peraturan Daerah
 - g. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
 - h. Program Perencanaan Penanggulangan Bencana
 - i. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - j. Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama, Informasi dan Media Massa
 - k. Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - l. Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana
 - m. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
 - n. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana
 - o. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - p. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

6. Sosial

Fokus program pada urusan Sosial dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang hanya mencakup satu indikator yaitu persentase PMKS yang tertangani. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- g. Program Penanganan Anak Terlantar
- h. Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
- i. Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin
- j. Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Urusan Wajib Tidak Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Fokus program pada urusan Tenaga Kerja dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fokus program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi rasio KDRT, Cakupan desa ramah anak,

Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintahan, dan cakupan pemenuhan hak anak. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
- c. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- d. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
- e. Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak
- f. Program Pemberdayaan Perempuan anak

3. Pangan

Fokus program pada urusan Pangan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi skor PPH dan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- c. Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan
- d. Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan
- e. Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
- f. Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan
- g. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar
- h. Program Desa Mandiri Pangan

4. Pertanian

Fokus program pada urusan Pertanian dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 adalah persentase luas tanah yang bersertifikat. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian
- b. Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

- c. Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan

5. Lingkungan Hidup

Fokus program pada urusan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- g. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
- h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- i. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- j. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi persentase penduduk ber KTP serta persentase bayi berakte kelahiran. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- b. Program pengembangan data dan informasi kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi jumlah posyandu aktif dan persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Program

yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
- b. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
- c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa
- e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat
- f. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa
- g. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
- h. Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan
- i. Program Penanggulangan kemiskinan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi cakupan peserta KB aktif, cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi, CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, persentase DO KB serta cakupan PUS ber KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Keluarga Berencana
- b. Program Pelayanan Kontrasepsi
- c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
- d. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja
- e. Program Ketahanan Keluarga
- f. Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita
- g. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD

9. Perhubungan

Fokus program pada urusan Perhubungan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi persentase angkutan umum yang laik jalan serta persentase ketersediaan angkutan pedesaan. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- g. Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas
- h. Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

10. Komunikasi dan Informatika

Fokus program pada urusan Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi skor PeGi, persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan, serta persentase PD yang mempunyai website aktif. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
- b. Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
- c. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
- d. Program kerjasama informasi dan media massa
- e. Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Fokus program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi persentase koperasi aktif, rasio UMKM terhadap jumlah penduduk, serta persentase KSP/USP dan koperasi sehat. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
- b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha

- e. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- f. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
- g. Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru

12. Penanaman Modal

Fokus program pada urusan Penanaman Modal dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 adalah realisasi investasi PMA dan PMDN. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
- d. Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
- e. Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Fokus program pada urusan Kepemudaan dan Olahrag dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 meliputi jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga provinsi dan nasional serta persentase organisasi kepemudaan yang dibina. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- b. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

14. Statistik

Fokus program pada urusan Statistik dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yaitu persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

15. Persandian

Fokus program pada urusan Persandi dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 adalah persentase surat/santel

yang dikelola. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Persandian Daerah

16. Kebudayaan

Fokus program pada urusan Kebudayaan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi persentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program pengelolaan keragaman budaya
- d. Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya
- e. Program Pembinaan Kesenian Masyarakat
- f. Program Pembinaan Sejarah Lokal
- g. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

17. Perpustakaan

Fokus program pada urusan Perpustakaan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 adalah jumlah kunjungan perpustakaan per tahun. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan budaya baca
- b. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan

18. Kearsipan

Fokus program pada urusan Kearsipan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 adalah pengelolaan arsip secara baku. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
- c. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Fokus program pada urusan Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun yaitu pertumbuhan produksi perikanan budidaya per tahun. Program yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- b. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- d. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- e. Program pengembangan nelayan kecil
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha
- g. Program pengelolaan TPI terpadu

2. Pariwisata

Fokus program pada urusan Pariwisata dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi persentase pertumbuhan pendapatan ODTW dan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan
- d. Program pengembangan ekonomi kreatif

3. Pertanian

Fokus program pada urusan Pertanian dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi adalah NTP, produksi tanaman pangan, indeks peningkatan populasi ternak ruminansia serta indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- d. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
- e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- f. Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan
- g. Program Pengembangan Agribisnis
- h. Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian

- i. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)

4. Perdagangan

Fokus program pada urusan Perdagangan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi persentase pertumbuhan ekspor serta kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kemetrolgian dan perlindungan Konsumen
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi
- f. Program Pengembangan Sistem Distribusi
- g. Program Pembinaan Pedagang
- h. Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan
- i. Program Promosi Produk Unggulan Daerah
- j. Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting

5. Perindustrian

Fokus program pada urusan Perindustrian dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi kontribusi sektor industri pengolahan, persentase jumlah IKM serta jumlah klaster industri. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- e. Program Penataan Struktur Industri
- f. Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif
- g. Pembinaan Lingkungan Sosial
- h. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- i. Pembinaan Industri

6. Transmigrasi

Fokus program pada urusan Transmigrasi dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 jumlah transmigran yang

mendapat PDU. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Fokus program pada fungsi penunjang Perencanaandalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yangmencakuppersentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumenperencanaan, Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA/PPA, RAPBD dan Perda APBD, serta Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan
- b. Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek
- c. Program Perencanaan pembangunan daerah
- d. Program Perencanaan pembangunan ekonomi
- e. Program Perencanaan pembangunan sosial budaya
- f. Program Kerjasama Pembangunan
- g. Program Pengembangan wilayah perbatasan
- h. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- k. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- l. Program Perencanaan Tata Ruang
- m. Program Pemanfaatan Ruang
- n. Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
- o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- p. Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

2. Keuangan

Fokus program pada fungsi penunjang Keuangan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang mencakup opini laporan BPK dan persentase peningkatan PAD. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Pengawasan

Fokus program pada fungsi penunjang Pengawasan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi Tingkat maturitas SPIP dan Tingkat kapabilitas APIP. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fokus program pada fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yaitu rata-rata nilai SKP. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Kedinasan
- b. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5. Fungsi lainnya

Fokus program pada fungsi Penunjang Lainnya dalam rangka mendukung target capaian kinerja tahun 2019 yang meliputi Nilai PMPRB, Nilai SAKIP, Rata-rata Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- d. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e. Program pengembangan kualitas kebijakan publik
- f. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
- g. Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat
- h. Program Kerjasama Pembangunan
- i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- j. Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur
- k. Penunjang pemerintah Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator yang akan dicapai yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu kehadiran ASN tepat waktu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya diklat dan bintek aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya capaian laporan kinerja PD

Selanjutnya pendanaan indikatif untuk keseluruhan rencana program dan kegiatan menjadipagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2019. Pagu indikatif tiap Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1 dengan rincian terlampir dalam buku Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang.

Tabel 5.1**Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019**

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD P1	APBD P2
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	136,206,457,500	22,196,909,000
2	Dinas Kesehatan	125,697,068,600	24,152,500,000
3	RSUD Dr. R.Soetrasno	154,476,600,000	5,000,000,000
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	303,160,200,000	104,430,000,000
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	15,967,336,000	22,214,235,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6,991,100,000	9,081,800,000
7	Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	1,016,500,000	852,500,000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,586,000,000	16,139,000,000
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	18,332,549,000	8,999,400,000
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	6,857,750,000	2,107,000,000
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	68,576,376,000	33,860,000,000
12	Dinas Lingkungan Hidup	9,347,600,000	4,790,000,000
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,642,201,000	3,991,200,000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10,198,740,000	1,946,830,000
15	Dinas Perhubungan	20,138,700,000	15,250,000,000
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1,749,500,000	4,422,000,000
17	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5,242,000,000	32,896,000,000
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2,476,000,000	25,200,000,000
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	43,696,200,000	8,363,000,000
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	16,161,400,000	108,557,000,000
21	Sekretariat Daerah	42,876,333,750	10,709,203,000
22	Sekretariat DPRD	23,276,514,000	13,545,198,000
23	Kecamatan Rembang	3,506,884,000	1,208,790,000

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD P1	APBD P2
24	Kecamatan Kaliori	486,640,000	470,000,000
25	Kecamatan Sulang	810,200,000	303,000,000
26	Kecamatan Sumber	697,875,000	265,000,000
27	Kecamatan Bulu	498,360,000	310,800,000
28	Kecamatan Lasem	651,500,000	382,000,000
29	Kecamatan Pancur	510,960,000	353,000,000
30	Kecamatan Sluke	536,475,000	342,000,000
31	ecamatan Pamotan	884,260,000	167,000,000
32	Kecamatan Gunem	529,540,000	210,000,000
33	Kecamatan Sale	670,640,000	457,400,000
34	Kecamatan Kragan	826,465,000	855,300,000
35	Kecamatan Sedan	575,910,000	144,000,000
36	Kecamatan Sarang	741,700,000	642,220,000
37	Inspektorat	7,416,720,000	4,247,075,000
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,893,000,000	3,869,000,000
39	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	11,158,350,000	3,283,400,000
40	Badan Kepegawaian Daerah	7,011,600,000	812,400,000
	TOTAL	1,066,080,204,850	497,026,160,000

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir tahun perencanaan jangka pendek perlu penetapan indikator kinerja daerah tahun 2019. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberipandu dalam pencapaian kinerja tahunannya sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir tahun RKPD 2019 dapat dicapai. Pencapaian indikator kinerja tahunannya sekaligus menunjukkan ketepatan arah kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rembang periode tahun 2016-2021.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dapat dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.1

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun 2019

No	Aspek/Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Target Capaian 2019	Kondisi Akhir RPJMD	Menjawab Permasalahan/Isu strategis	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan Ekonomi	% (YoY)	5,73	5,90	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Seluruh PD
2	Laju Inflasi	% (YoY)	3,29	3,23	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
3	Peningkatan PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Ribu	23	24	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	

4	Indeks Gini	Indeks	0,28	0,26	Penurunan Angka Kemiskinan	
5	Persentase Penduduk Miskin	%	13,83	11,55	Penurunan Angka Kemiskinan	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Skor	68,9	69,8	Penurunan Angka Kemiskinan	
7	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,2	12,6	PeningkatanKualita sPelayananPendidik an	
8	Tingkat Pengeluaran Perkapita	Rp Ribu/ta hun	10.5	11.5	Penurunan Angka Kemiskinan	
9	Indeks Pembangunan Gender	Skor	87,1	87,5	Penurunan Angka Kemiskinan	
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	68,5	69,5	Penurunan Angka Kemiskinan	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00	3,90	Perluasan Kesempatan Kerja	
12	Persentase pertumbuhan penduduk	%	0,65	0,53	PeningkatanDerajat KesahatanMasyara kat	
B	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B.1.	PELAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	Urusan Pendidikan					
	APK PAUD (umur 3-6 tahun)	%	88	96	PeningkatanKualita sPelayananPendidik an	
	APS (Angka Partisipasi Sekolah) Umur 7 - 12 th	Skor	99,81	99,87	PeningkatanKualita sPelayananPendidik an	
	APS (Angka Partisipasi Sekolah) umur 13 - 15 th	Skor	100	100	PeningkatanKualita sPelayananPendidik an	
	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan secara baik	%	71,15	90,00	PeningkatanKualita sPelayananPendidik an	Pendidikan
	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	7,6	7,8	PeningkatanKualita sPelayananPendidik an	
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,2	12,6	PeningkatanKualita sPelayananPendidik an	
2	Urusan Kesehatan					
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	6	5	PeningkatanDerajat KesahatanMasyara kat	
	Kasus Kematian Bayi (AKB)	Kasus	115	105	PeningkatanDerajat KesahatanMasyara kat	Kesehatan
	Akaba (Angka Kematian Balita)	Kasus	125	105	PeningkatanDerajat KesahatanMasyara kat	
	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,14	0,1	PeningkatanDerajat KesahatanMasyara kat	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik.	%	72,43	85,00	Kualitas Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.	%	85,71	92,06	Kualitas Infrastruktur	
	Jumlah pusat pertumbuhan baru	Kawasa n	4	6	Kualitas Infrastruktur	

	dengan infrastruktur memadai					
	Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	%	17,89	20	Kualitas Infrastruktur	
	Persentase akses irigasi dalam kondisi baik.	%	89,44	98,12	Kualitas Infrastruktur	
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	0	0	Penurunan Angka Kemiskinan	
	Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	%	100	100	Penurunan Angka Kemiskinan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	%	100	100	Penurunan Angka Kemiskinan	
	Persentase cakupan air baku	%	80	88	Kualitas Infrastruktur	
	persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ditangani	%	9,35	11,07	Penurunan Angka Kemiskinan	
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
	Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		98,01	98,10	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Persentase Pemilih dalam menggunakan hak pilih melalui pemilu	%	85,00	85,00	Perwujudan <i>Good Governance</i>	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	- Pilpres dan Pileg					
	- Pilgub					
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	100	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	70	80	Kualitas Infrastruktur	Sub Urusan Kebencanaan
6	Urusan Sosial					
	Persentase PMKS yang ditangani	%	60,00	70,00	Penurunan Angka Kemiskinan	Sosial
B.2.	PELAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
1	Urusan Tenaga Kerja					
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00	3,90	Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Rasio KDRT	Ratio	6 / 178.530	6 / 178.530	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Cakupan desa ramah anak	%	75,00	95,00	Penurunan Angka Kemiskinan	
	Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah	%	32,00	34,00	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	65,00	75,00	Penurunan Angka Kemiskinan	
3	Urusan Pangan					Pangan
	Skor PPH	Skor	87,9	88,3	Penurunan Angka Kemiskinan	
	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kkal/ka pita	6.912	7.33	Penurunan Angka Kemiskinan	
4	Urusan Pertanahan					Pertanahan
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	1,4	1,8	Perwujudan <i>Good Governance</i>	



5	Urusan Lingkungan Hidup					
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%/th	5	5	Kualitas Infrastruktur	Lingkungan Hidup
	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	%	67	68	Kualitas Infrastruktur	
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk ber-KTP	%	100	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Persentase bayi ber-akte kelahiran	%	100	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Posyandu aktif	jumlah	1.225	1.225	PeningkatanDerajat KesehatanMasyarakat	
	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	1,4	1,6	Penurunan Angka Kemiskinan	
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan peserta KB aktif	%	100	100	PeningkatanDerajat KesehatanMasyarakat	
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	6,61	6,5	PeningkatanDerajat KesehatanMasyarakat	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	83,66	83,70	PeningkatanDerajat KesehatanMasyarakat	
	Persentase Droup Out (DO) Keluarga Berencana	%	10,54	9,00	PeningkatanDerajat KesehatanMasyarakat	
	Cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	93,17	93,72	PeningkatanDerajat KesehatanMasyarakat	
9	Urusan Perhubungan					Perhubungan
	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	90,00	90,00	Kualitas Infrastruktur	
	Persentase ketersediaan angkutan pedesaan	%	75,00	85,00	Kualitas Infrastruktur	
10	Urusan Komunikasi dan Informatika					Komunikasi dan Informatika
	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	Skor	3,20	3,50	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan	%	100	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	100	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Presentase koperasi aktif	%	90	100	Perluasan Kesempatan Kerja	
	Rasio UMKM terhadap Jumlah Penduduk	%	8,75	10	Perluasan Kesempatan Kerja	
	Persentase KSP/USP dan koperasi sehat	%	42	53	Perluasan Kesempatan Kerja	
12	Urusan Penanaman Modal					Penanaman Modal
	Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rp/tahun	4.747.479	5.259.020	Perluasan Kesempatan Kerja	



13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					
	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat prov dan nasional	Jumlah	40	50	PeningkatanDerajat KesahatanMasyara kat	Kepemudaa n dan Olah Raga
	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	100	100	Perluasan Kesempatan Kerja	
14	Urusan Statistik					Statistik
	Persentaseketersediaan data daninformasiPerencanaa n Pembangunan	%	85	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
15	Urusan Persandian					Persandian
	Persentase Surat/Santel Yang dikelola	%	100	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
16	Urusan Kebudayaan					Kebudayaa n
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	16	20	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
17	Urusan Perpustakaan					Perpustaka am
	Angka kunjungan perpustakaan per tahun	Orang	17.3	18	PeningkatanKualita sPelayananPendidik an	
18	Urusan Kearsipan					Kearsipan
	Pengelolaan arsip secara baku	%	85,1	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
B.3	PELAYANAN URUSAN PILIHAN					
1	Urusan Kelautan dan Perikanan					Kelautan dan Perikanan
	Pertumbuhan Produksi perikanan Budidaya per tahun	%/th	2%	2%	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
2	Urusan Pariwisata					Pariwisata
	Persentase pertumbuhan pendapatan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	%/th	5	5	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,3	2,5	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
3	Urusan Pertanian					Pertanian
	Nilai Tukar Petani	Skor	100,78	100,98	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
	Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	Ton/Ha	6,35	6,43	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
	Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	Skor	1,06	1,07	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
	Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	Skor	1,18	1,20	Perluasan Kesempatan Kerja	
4	Urusan Perdagangan					Perdagang an
	Persentase pertumbuhan ekspor	%	4	4	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	14,60	14,80	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
5	Urusan Perindustrian					Perindustri an
	Kontribusi sektor industri pengolahan	%	21,60	22,00	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	



	Prosentase jumlah usaha industri kecil dibandingkan jumlah seluruh industri	%	40,00	40,00	Perluasan Kesempatan Kerja	
	Jumlah Klaster Industri	klaster	11	15	Perluasan Kesempatan Kerja	
6	Urusan Transmigrasi					
	Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	Orang	10	10	Perluasan Kesempatan Kerja	Transmigrasi
B.4.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Fungsi Perencanaan Pembangunan					
	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan.	%	65	75	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	90	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Persentase kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPA, RAPBD dan Perda APBD	%	90	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
2	Fungsi Keuangan					
	Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	%	13.53%	13.64%	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	
3	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
	Rata-rata Nilai SKP	Skor	88	90	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
4	Fungsi Lainnya					
	Nilai PMPRB	Nilai	65	67	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Nilai SAKIP	Nilai	64	68	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Rata-rata Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Skor	78	80	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Opini Laporan Keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Tingkat maturitas SPIP	Nilai	3	4	Perwujudan <i>Good Governance</i>	
	Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	4	Perwujudan <i>Good Governance</i>	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2019 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja SKPD dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 ini selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 guna menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun 2019. Selain hal tersebut, RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya sangat dipengaruhi oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019, sehingga diharapkan mampu mendukung dan melanjutkan upaya menuju Visi Pembangunan Daerah yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”***

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ